

Katalog BPS : 8401007

NERACA SATELIT PARIWISATA NASIONAL (NESPARNAS)

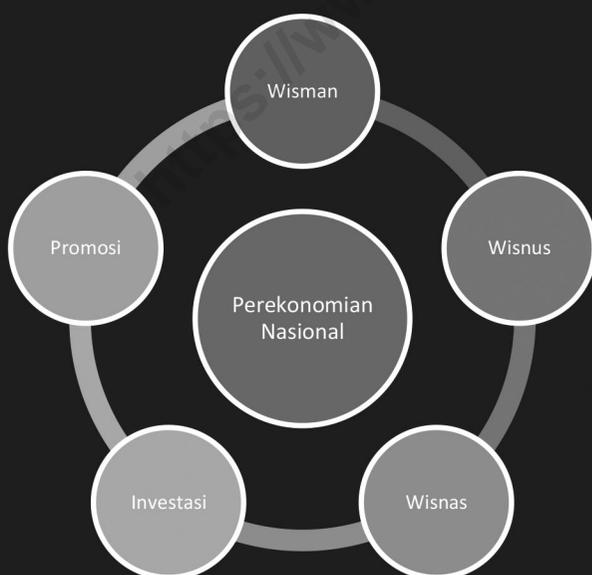
2017



BADAN PUSAT STATISTIK

NERACA SATELIT PARIWISATA NASIONAL (NESPARNAS)

2017



NERACA SATELIT PARIWISATA NASIONAL (NESPARNAS) 2017

ISBN : 978-602-438-274-2

No. Publikasi : 06330.1902

Katalog : 8401007

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: xii + 102 halaman

Naskah:

Subdirektorat Statistik Pariwisata

Penyunting :

Subdirektorat Statistik Pariwisata

Desain Kover oleh :

Subdirektorat Statistik Pariwisata

Penerbit :

©Badan Pusat Statistik

Pencetak:

Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi: -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

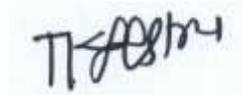
Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas) Tahun 2017 merupakan salah satu publikasi yang menggambarkan kondisi pariwisata Indonesia, baik dari sisi permintaan maupun penawaran, dan peranannya dalam perekonomian nasional tahun 2017. Publikasi Nesparnas 2017 ini menyajikan informasi mengenai struktur konsumsi wisatawan, nilai investasi terkait pariwisata, dan pengeluaran pemerintah di bidang pariwisata selama tahun 2017. Selain itu, disajikan juga informasi mengenai struktur tenaga kerja pada industri-industri yang terkait pariwisata, seperti usaha jasa penyediaan akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, dan usaha hiburan dan rekreasi.

Publikasi Nesparnas 2017 secara detil memberikan gambaran tentang peranan wisatawan, baik wisatawan mancanegara (wisman), wisatawan nusantara (wisnus), maupun orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri (wisnas), dalam melakukan transaksi ekonomi serta kaitannya dengan sektor-sektor ekonomi domestik yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. Publikasi Nesparnas 2017 ini juga menyajikan nilai investasi yang terkait pariwisata yang dilakukan pemerintah maupun swasta menurut jenis barang modal, serta pengeluaran pemerintah untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata pada semua level pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, publikasi ini dapat digunakan untuk mengukur dinamika dan skala ekonomi yang terjadi akibat kegiatan pariwisata, mata rantai sektor-sektor ekonomi terkait pariwisata, serta peranan pariwisata dalam perekonomian nasional seperti dalam pembentukan PDB, penciptaan lapangan kerja, penerimaan negara dari pajak dan retribusi, serta dalam ekspor barang dan jasa.

Saran dan masukan sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan dalam penyusunan Nesparnas di masa mendatang. Semoga buku

ini dapat dijadikan referensi dalam menyusun strategi dan kebijakan oleh semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Februari 2019
Direktur Statistik Keuangan, Teknologi
Informasi, dan Pariwisata



Titi Kanti Lestari

<https://www.bps.go.id>

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Titi Kanti Lestari

Editor : Titi Kanti Lestari
Rifa Rufiadi

Penulis : Akhmad Tantowi
Barudin
Endang Suryani
Rahmad Basuki

Pengolah Data/Penyiapan Draft : Nur Indah Kristiani
Yulia Tri Mardani
Dyah Soendari
Eko Sriyanto
Rahmad Basuki

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
TIM PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	v v
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	4
1.3. Tujuan	5
1.4. Institusi Terkait Dalam Penyusunan Nesparnas	5
BAB 2 PEMAHAMAN NESPARNAS, PENYUSUNAN DAN SUMBER DATA	
NESPARNAS	7
2.1. Pengertian Umum Nesparnas	7
2.2. Pemahaman <i>Supply</i> dan <i>Demand</i>	9
2.2.1. Penawaran (<i>Supply</i>)	10
2.2.2. Permintaan (<i>Demand</i>)	12
2.3. Penyusunan Pengeluaran Terkait Pariwisata	14
2.3.1. Struktur Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (<i>Inbound</i>)	14
2.3.2. Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara	17
2.3.3. Struktur Pengeluaran Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri (<i>Outbound</i>)	18
2.3.4. Struktur Investasi Pariwisata	19
2.3.5. Struktur Pengeluaran Lainnya Terkait Pariwisata ...	21
2.4. Jenis-Jenis Tabel/Subneraca Nesparnas	22
2.5. Model Pengukuran Dampak Pariwisata	24

BAB 3	STRUKTUR PENGELUARAN WISATAWAN, INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH UNTUK PARIWISATA	31
3.1.	Struktur Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	31
3.2.	Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara	35
3.3.	Struktur Pengeluaran Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri (Wisnas)	40
3.4.	Struktur Pengeluaran Pemerintah dan Swasta untuk Investasi Pariwisata	43
3.5.	Struktur Pengeluaran Pemerintah untuk Pariwisata	46
BAB 4	DAMPAK PARIWISATA TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL	49
4.1.	Peranan Pariwisata dalam Perekonomian	49
4.2.	Dampak Ekonomi Pariwisata	51
4.2.1.	Dampak Terhadap Output	56
4.2.2.	Dampak Terhadap Nilai Tambah Bruto	58
4.2.3.	Dampak Terhadap Kompensasi Tenaga Kerja	59
4.2.4.	Dampak Terhadap Pajak Atas Produksi Neto	61
BAB 5	TENAGA KERJA USAHA PARIWISATA	63
5.1.	Usaha Pariwisata	63
5.2.	Tenaga Kerja Usaha Pariwisata	64
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Input-Output Untuk Sistem Perekonomian dengan Tiga Sektor Produksi	25
Tabel 3.1. Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Indonesia Menurut Kebangsaan, Tahun 2013-2017	33
Tabel 3.2. Struktur Pengeluaran Wisman Menurut Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi, Tahun 2017	34
Tabel 3.3. Struktur Pengeluaran Wisnus menurut Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi, Tahun 2017	38
Tabel 3.4. Struktur Pengeluaran Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri Menurut Kategori Pengeluaran dan Jenis Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi, Tahun 2017	42
Tabel 3.5. Struktur Investasi Pariwisata Baik yang Bersifat Langsung maupun Tidak Langsung, Tahun 2017 (miliar rupiah)	45
Tabel 3.6. Struktur Pengeluaran Pemerintah untuk Promosi dan Pembinaan Pariwisata Tahun 2017 (miliar rupiah)	48
Tabel 4.1. Peranan Pariwisata terhadap PDB Indonesia dari Sisi Neraca Penggunaan, Tahun 2017 (triliun rupiah)	50
Tabel 4.2. Peranan Pariwisata dalam Investasi Nasional, Tahun 2017 (persen)	51
Tabel 4.3. Nilai Pengeluaran Pariwisata Tahun 2016-2017	52
Tabel 4.4. Ringkasan Pengeluaran Terkait Pariwisata Indonesia, Tahun 2017 (miliar rupiah)	53
Tabel 4.5. Dampak Ekonomi Pariwisata Tahun 2017	56
Tabel 4.6. Dampak Pariwisata terhadap PDB Menurut Sektor, Tahun 2017	60
Tabel 5.1. Jumlah Tenaga Kerja pada Usaha Pariwisata Menurut Status Pekerjaan Utama, Tahun 2017	65
Tabel 5.2. Jumlah Tenaga Kerja pada Usaha Pariwisata Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2017	69

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Ruang Lingkup Ekonomi Pariwisata dari Sisi Permintaan dan Penawaran	11
Gambar 3.1. Jumlah Kunjungan Wisman ke Indonesia, Tahun 2011-2017	32
Gambar 3.2. Jumlah Perjalanan Wisnus di Indonesia, Tahun 2011-2017	36
Gambar 3.3. Jumlah Perjalanan Wisnus di 10 Provinsi Tujuan Utama, Tahun 2017	37
Gambar 3.4. Total Pengeluaran Wisnus Menurut Provinsi Tujuan Utama, Tahun 2017	39
Gambar 3.5. Jumlah Perjalanan Penduduk Indonesia ke Luar Negeri, Tahun 2011-2017	41
Gambar 4.1. Dampak Ekonomi Pariwisata, Tahun 2017	62
Gambar 5.1. Jumlah Tenaga Kerja pada Usaha Pariwisata, Tahun 2011-2017	64
Gambar 5.2. Distribusi Tenaga Kerja pada Usaha Pariwisata Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017	66
Gambar 5.3. Distribusi Tenaga Kerja pada Usaha Pariwisata Menurut Kelompok Umur, Tahun 2017	67
Gambar 5.4. Distribusi Tenaga Kerja pada Usaha Pariwisata Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, Tahun 2017	68

<https://www.bps.go.id>

1.1. Latar Belakang

Pariwisata sekarang merupakan salah satu sektor ekonomi terbesar dan mempunyai tingkat pertumbuhan paling pesat di dunia. Pariwisata telah menjadi salah satu sumber utama penerimaan bagi banyak negara. Melalui penerimaan devisa, penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, serta pembangunan infrastruktur menjadikan pariwisata sebagai salah satu penggerak utama (*key driver*) kemajuan sosio-ekonomi suatu negara. Berdasar laporan *World Travel and Tourism Council (WTTC)* pada tahun 2017 sumbangan pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) dunia mencapai 10 persen. Sementara penerimaan dari kunjungan wisatawan internasional menyumbang tujuh persen dari total ekspor barang dan jasa dunia atau 30 persen dari total ekspor jasa dunia. Dilihat dari penciptaan lapangan kerja, satu dari 10 tenaga kerja diciptakan karena adanya kegiatan pariwisata (UNWTO, 2018).

Organisasi Pariwisata Dunia (*World Tourism Organization, UNWTO*) mencatat jumlah kunjungan wisatawan internasional pada tahun 2017 mencapai 1,33 juta kunjungan atau naik tujuh persen dibandingkan tahun 2016. Ini merupakan kenaikan tertinggi sejak krisis ekonomi global tahun 2009. UNWTO memperkirakan akan terus meningkat seiring membaiknya kondisi perekonomian dunia. Perkiraan UNWTO tersebut sudah tentu menggiurkan pelaku usaha pariwisata di berbagai negara. Sekarang muncul banyak daerah tujuan wisata baru di dunia di luar negara tujuan wisata yang secara tradisional menjadi tujuan favorit seperti Eropa dan Amerika Utara. Wilayah Asia dan Pasifik, dimana Indonesia berada di dalamnya, pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar enam persen dibanding tahun sebelumnya. Persaingan bukan hanya terjadi antar kawasan, negara-negara dalam satu kawasanpun saling berlomba untuk menarik wisatawan sebanyak-

banyaknya untuk berkunjung ke negaranya. Bagi Indonesia, ini merupakan peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan kepariwisataan nasional.

Di tengah kompetisi pariwisata dunia yang semakin ketat, maka dibutuhkan inovasi dan strategi yang tepat, serta produktif untuk merebut pasar pariwisata. Namun, menangani pariwisata bukanlah hal yang mudah karena pariwisata bukan sektor yang berdiri sendiri. Pembangunan pariwisata melibatkan hampir semua sektor ekonomi. Tidak hanya industri yang berkarakter pariwisata (*tourism characteristic industry*), seperti hotel dan restoran, pariwisata juga melibatkan industri yang sepiintas tidak berkaitan langsung dengan industri pariwisata, namun sebagian permintaannya (*demand*) berasal dari pariwisata (*tourism connected industry*), seperti usaha angkutan dan perbankan. Jumlah industri yang terkait dan menerima dampak dari kegiatan pariwisata sangat banyak. Keterkaitan lintas sektor pariwisata akan menjadi mata rantai pendukung bagi gerak ke depan (*moving forward*) pembangunan nasional.

Dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata nasional, pemerintah telah berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan pariwisata agar pariwisata Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain. Pemerintah telah menetapkan pariwisata sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Pemerintah berharap pariwisata dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui promosi yang intensif dan dibarengi dengan peningkatan pelayanan, serta didukung membaiknya situasi keamanan diharapkan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara (*wisman*) terus meningkat. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisman mencapai 14,04 juta kunjungan atau naik 21,88 persen dibanding jumlah kunjungan tahun sebelumnya.

Disamping peningkatan jumlah kunjungan wisman, faktor lain yang juga sangat berpengaruh terhadap industri pariwisata Indonesia adalah pergerakan wisatawan nusantara (*wisnus*). Wisnus mempunyai peran terbesar

dalam menciptakan dampak ekonomi. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) semakin gencar untuk mengajak penduduk Indonesia melakukan perjalanan atau wisata di dalam negeri. Dengan slogan “Pesona Indonesia” dan penyelenggaraan berbagai even, diharapkan semakin banyak penduduk Indonesia yang ingin mengetahui lebih banyak tentang negerinya sendiri. Pada tahun 2017 diperkirakan jumlah perjalanan wisnus mencapai 270,82 juta atau naik 2,45 persen dibanding jumlah perjalanan tahun 2016.

Dengan peningkatan jumlah kunjungan, baik wisman maupun wisnus, diharapkan akan tercipta konsumsi wisatawan di dalam negeri. Konsumsi atau belanja wisatawan tersebut menjadi faktor pendorong bagi pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. Peningkatan ini pada akhirnya akan mendorong perkembangan pariwisata khususnya dan perekonomian pada umumnya.

Nilai ekonomi pariwisata kadang tidak dapat diukur secara nyata dalam bentuk nominal. Nilai ekonomi tersebut seringkali terkesan hanya berhubungan dengan para pelaku pariwisata. Namun, sesungguhnya nilai ekonomi dari kegiatan pariwisata tidak hanya dinikmati oleh satu sektor tertentu, tapi juga dinikmati oleh berbagai sektor. Dengan meningkatnya jumlah konsumsi wisatawan, tentu akan semakin besar dampak ekonomi yang ditimbulkan, dan semakin banyak sektor yang terkena dampaknya.

Untuk melihat keterkaitan antarsektor serta dampak ekonomi yang diciptakan oleh kegiatan pariwisata, dibutuhkan data yang akurat, terpercaya, terkini, dan konsisten yang meliputi semua aspek yang terkait dengan pariwisata. Di samping itu, agar terlihat asas manfaat untuk masyarakat luas, perlu penyajian informasi yang jelas dan menyeluruh dalam bentuk laporan yang mudah dipahami. Dengan adanya informasi pariwisata yang komprehensif, masyarakat dan dunia usaha diharapkan akan lebih memberikan perhatiannya dan bersedia bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan sektor pariwisata di Indonesia.

Penyusunan suatu sistem yang dapat memperlihatkan peranan pariwisata secara komprehensif perlu dilakukan untuk dapat menjawab tantangan tersebut. Neraca Satelit Pariwisata Nasional atau yang disingkat dengan Nesparnas adalah suatu sistem neraca terpadu sektor pariwisata yang mampu menjawab tuntutan tersebut. Kajian dan analisis hasil pembangunan kepariwisataan yang selama ini baru mencakup sebagian aspek dan dilakukan secara terpisah-pisah. Diharapkan pada masa mendatang kajian yang menyeluruh dan konsisten dengan diterapkannya metode Nesparnas dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Penyusunan Nesparnas ini bertujuan agar dapat tersusun informasi pariwisata dan kegiatan yang terkait pariwisata secara lengkap, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Nesparnas merupakan suatu konsep dan metode tampilan informasi kuantitatif sektor pariwisata yang menyediakan perangkat analisis yang menyeluruh (*comprehensive*), kompak (*compact*), saling berkait (*interconnected*), konsisten (*consistent*), dan terkontrol (*controllable*). Sistem ini disusun untuk menjawab tantangan penyediaan informasi kuantitatif dan kualitatif yang dapat digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan kepariwisataan pada masa lalu serta sekaligus menjawab tantangan dan permasalahan pariwisata di masa datang. Penyusunan Nesparnas sangat penting sebagai salah satu bahan masukan dalam menetapkan arah kebijakan dan program pembangunan pariwisata maupun sebagai alat analisis yang lebih luas mengenai kinerja sektor pariwisata di Indonesia dan dampak ekonomi yang diciptakan.

1.2. Permasalahan

Permasalahan pokok dalam menjawab tantangan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya adalah bagaimana menyusun dan membentuk sistem dan kerangka informasi kuantitatif kepariwisataan Indonesia yang akurat, handal, konsisten, dan komprehensif, mencakup aspek mikro dan makro

ekonomi, serta akomodatif terhadap rekomendasi Badan-Badan Dunia (UNWTO, WTTC).

Submasalah yang diangkat dalam tahapan kegiatan penyusunan Nesparnas 2017 adalah bagaimana menyusun Nesparnas sesuai rekomendasi dari Badan Pariwisata Dunia (UNWTO) serta melengkapi data dasar, seperti jumlah wisatawan nusantara, tenaga kerja dan investasi baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan kegiatan pariwisata dan pengeluaran pemerintah dan dunia usaha untuk pariwisata pada tahun 2017.

1.3. Tujuan

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menyusun Nesparnas dan mempertajam data-data pokok yang akan digunakan dalam penyusunan tabel-tabel Nesparnas sesuai rekomendasi UNWTO. Nesparnas disusun dalam bentuk set data kuantitatif dan kualitatif yang berfungsi sebagai kerangka dasar pengembangan subsistem informasi untuk melihat kegiatan kepariwisataan dalam dimensi sektor ekonomi. Nesparnas disusun untuk melihat peranan atau sumbangan pariwisata terhadap perekonomian nasional yang meliputi peranan pariwisata dalam pembentukan PDB, peningkatan pendapatan masyarakat, penerimaan pajak pemerintah, dan penyerapan tenaga kerja.

1.4. Institusi Terkait Penyusunan Nesparnas

Kerja sama antar institusi/lembaga pemerintah sangat diperlukan dalam melakukan penyusunan Nesparnas ini. Dalam penyusunan Nesparnas ini, ada tiga institusi pemerintah yang terlibat langsung yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pariwisata, dan Bank Indonesia. Adapun tim utama dalam penyusunan Nesparnas ini adalah Badan Pusat Statistik, terutama yang bertanggung jawab dalam penyusunan Statistik Pariwisata dan Neraca Nasional. Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Bank Indonesia

menyediakan sumber data utama terkait data pengeluaran wisman di Indonesia.

Di dalam struktur organisasi BPS, terdapat tim Input-Output yang bertanggung jawab dalam penyusunan Tabel I-O. Tabel yang digunakan dalam penyusunan Nesparnas kali ini adalah tabel I-O 2010. Sebagian dari tim penyusunan tabel I-O terlibat juga dalam penyusunan Nesparnas ini, sehingga Tabel I-O tersebut dapat langsung diimplementasikan ke dalam Nesparnas.

<https://www.bps.go.id>

2.1. Pengertian Nesparnas

Nesparnas merupakan perangkat neraca yang berisikan data tentang peran kegiatan pariwisata dalam perekonomian nasional. Nesparnas disebut sistem karena terdiri dari berbagai elemen neraca, dimana satu dengan lainnya saling terkait dan saling mempengaruhi, yang digambarkan melalui keterkaitan berbagai jenis transaksinya. Secara spesifik Nesparnas berisikan data tentang perilaku pariwisata dalam melakukan transaksi ekonomi dengan berbagai institusi ataupun pelaku-pelaku ekonomi domestik dalam bentuk neraca dan matriks.

Nesparnas menggambarkan semua kegiatan dan transaksi ekonomi yang berhubungan dengan barang-barang dan jasa-jasa pariwisata, baik sisi penyediaan (*supply*) maupun sisi permintaan (*demand*). Sebagai suatu sistem data yang komprehensif, cakupan Nesparnas meliputi: (1) struktur pengeluaran wisatawan dan besarnya, (2) struktur sektor ekonomi yang terkait pariwisata, (3) struktur investasi pariwisata dan kontribusinya dalam investasi nasional, (4) struktur pengeluaran pemerintah terkait pariwisata, (5) peranan pariwisata pada perekonomian nasional, serta (6) struktur pekerja pada usaha pariwisata.

Sebagai perluasan dari Sistem Neraca Nasional (SNN), Nesparnas dapat digunakan antara lain untuk melihat keterkaitan transaksi yang terjadi antara pelaku pariwisata dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya (termasuk penyedia jasa pariwisata) secara mutual. Di samping itu, dapat mengetahui bagaimana peran dan berapa besar kontribusi kegiatan pariwisata dalam sistem ekonomi secara keseluruhan.

Meskipun secara konsep sangat dimungkinkan membangun neraca-neraca pendukung lainnya dalam Nesparnas dengan mengikuti struktur dan konsep SNN, tetapi kesulitan utama yang dihadapi adalah ketersediaan data

dasar. Dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang tersedia, Nesparnas yang dibangun di sini hanya akan difokuskan pada kegiatan di sektor produksi atau yang umumnya disebut sebagai sektor riil. Melalui perangkat ini dapat diketahui dampak kegiatan pariwisata dalam tatanan ekonomi nasional, yang juga bermanfaat bagi perbandingan di tingkat interdaerah.

Dengan demikian, maka Nesparnas yang akan disajikan hanya berisikan informasi tentang hubungan antara kegiatan pariwisata dengan kegiatan proses produksi barang dan jasa, dalam wilayah ekonomi Indonesia. Hubungan tersebut merupakan interaksi antara pelaku pariwisata dengan produsen pariwisata, dan antarprodusen pariwisata itu sendiri. Beberapa analisis akan diturunkan dari perangkat tersebut, diantaranya analisis tentang nilai tambah yang dihasilkan ataupun analisis tentang dampak pariwisata terhadap kegiatan ekonomi di sektor riil.

Hubungan transaksi antara pelaku pariwisata (fungsi konsumsi) dengan pelaku ekonomi (fungsi produksi) domestik tersebut dalam konteks makro disebut sebagai interaksi antara *Supply* dan *Demand*. Apabila pada keseimbangan makro *Supply* harus sama dengan *Demand*, maka teori ini tidak berlaku sepenuhnya bagi kegiatan ekonomi pariwisata. Tidak semua produk kegiatan ekonomi tersebut langsung dikonsumsi habis oleh pariwisata, karena ada kegiatan diluar pariwisata yang juga mengkonsumsi produk tersebut. Produk barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik tersebut apabila dikonsumsi oleh wisatawan mancanegara (*non-resident*) maka akan dicatat sebagai ekspor suatu negara. Begitu pula berlaku sebaliknya apabila produk negara lain dikonsumsi oleh wisatawan nusantara (*resident*) akan dianggap sebagai impor.

Selanjutnya struktur neraca yang akan disajikan dalam Nesparnas disini adalah keterkaitan *Demand* terhadap *Supply* pariwisata yang diturunkan dari neraca produksi, tabel Produk Domestik Bruto (PDB), serta tabel Input-Output. Dari neraca produksi dapat dilihat struktur neraca kegiatan ekonomi

khusus yang layanan/produknya memang sebagian besar ditujukan bagi permintaan wisatawan, baik dalam negeri (wisnus dan wisnas) maupun luar negeri (wisman). Hubungan tersebut menggambarkan transaksi langsung yang terjadi antara *Supply* dengan *Demand*. Sedangkan hubungan secara tidak langsung akan disajikan dalam tabel Input-Output. Tabel Input-Output yang disajikan dalam bentuk matriks tersebut juga akan menghitung dampak kegiatan pariwisata terhadap tatanan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan di sektor riil (*multiplier effect*).

Oleh sebab itu, untuk lebih memahami pengertian Nesparnas, disini difokuskan pada kegiatan produksi pariwisata yang berkaitan dengan sektor riil, yang diantaranya menghasilkan parameter-parameter ekonomi makro, seperti tentang output yang dihasilkan, struktur biaya antara, nilai tambah yang diperoleh, investasi fisik yang direalisasikan, serta ekspor dan impor. Informasi tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel-tabel maupun sel-sel matriks, yang semuanya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nesparnas.

Dengan demikian makna esensi Nesparnas sebenarnya adalah ingin melihat keseimbangan yang terjadi antara sisi penyediaan dan sisi permintaan jasa pariwisata dalam arti yang lebih spesifik. Selain itu, juga untuk melihat kontribusi kegiatan pariwisata dalam mendukung sistem perekonomian nasional.

2.2 Pemahaman *Supply* dan *Demand*

Meskipun mengacu pada konsepsi yang sama, *Supply* (penyediaan atau penawaran) dan *Demand* (permintaan) bagi kegiatan pariwisata disini mempunyai arti yang lebih spesifik. Interaksi ini lebih menggambarkan tentang keseimbangan transaksi ekonomi antara industri pariwisata dengan wisatawan dalam upaya pemenuhan kebutuhannya. Meningkatnya jumlah wisatawan secara luar biasa dalam satu dekade terakhir memberikan dampak bagi pertumbuhan industri pariwisata, baik secara kuantitas maupun kualitas. Penyelenggaraan paket-paket wisata yang ditawarkan oleh agen perjalanan

wisata atau biro perjalanan merupakan salah satu contoh bagaimana industri pariwisata selalu berusaha untuk memberikan layanan yang lebih baik sehingga wisatawan dapat menikmati layanan yang agak berbeda, bahkan jika dilihat dari segi biaya juga bisa lebih murah.

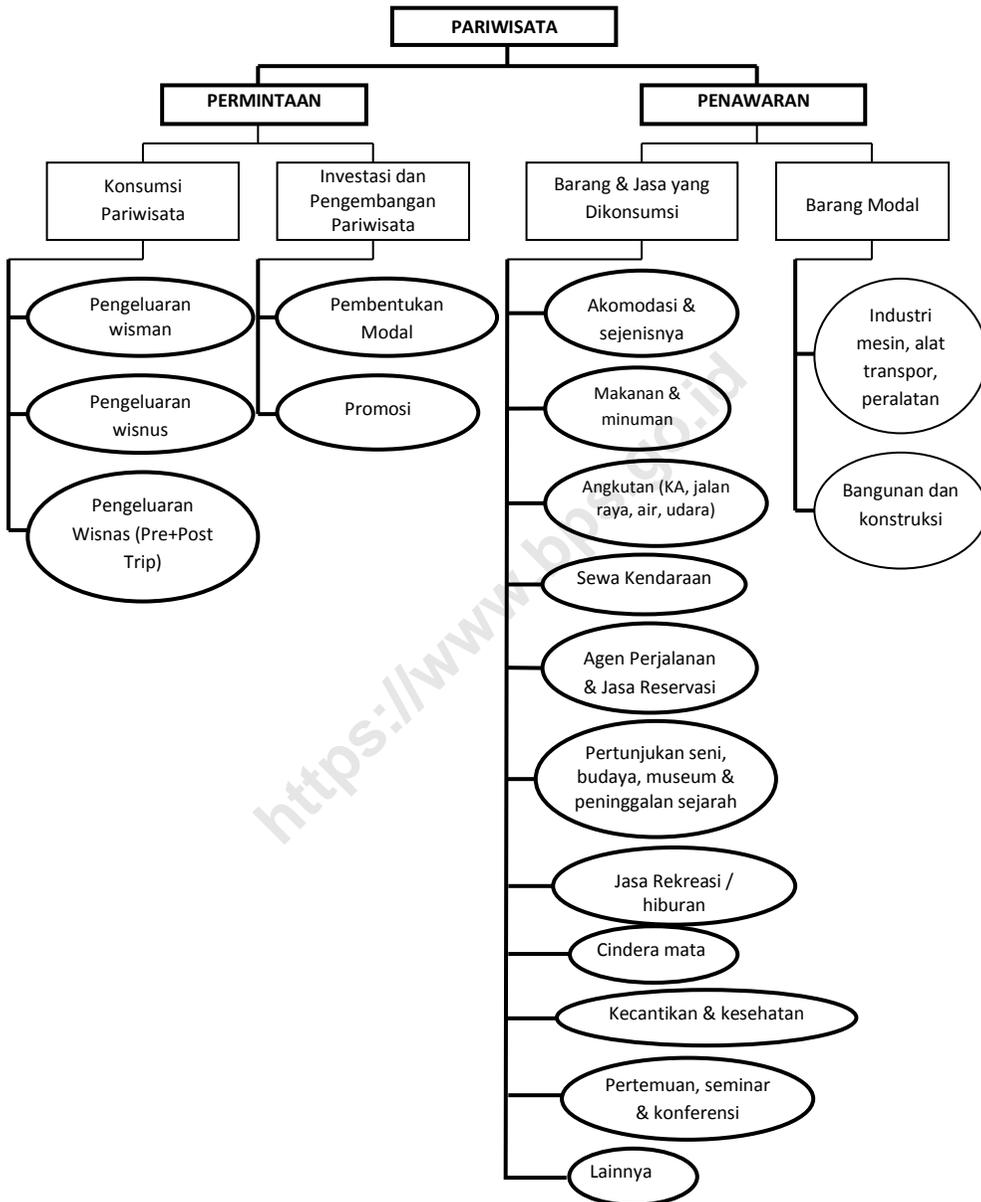
Dari sisi penyediaan produk jasa pariwisata, terdapat berbagai aktivitas seperti hotel, restoran, transportasi, agen perjalanan, rekreasi dan hiburan, objek wisata, serta kegiatan penunjang seperti persewaan, *money changer*, pusat industri kerajinan, pusat pertokoan, dan sebagainya. Termasuk juga disini penyediaan layanan pemerintah dalam hal keimigrasian, kepabeanan, informasi pariwisata, keamanan dan sejenisnya

Sedangkan sisi permintaan atau *tourist demand* merupakan permintaan akan barang dan jasa oleh wisatawan untuk tujuan dikonsumsi langsung yang jenisnya merupakan produk yang dihasilkan oleh industri pariwisata tersebut. Secara sederhana pemisahan antara sisi permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

2.2.1. Supply (Penyediaan/Penawaran)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, usaha pariwisata meliputi tiga belas jenis usaha utama, yaitu: daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, penyediaan makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan/ insentif/ konferensi/ dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultasi pariwisata, wisata tirta, serta spa. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk dijual dalam suatu lokasi tertentu, mempunyai catatan administrasi tersendiri dan ada salah satu orang yang bertanggung jawab.

Gambar 2.1. Ruang Lingkup Ekonomi Pariwisata dari Sisi Permintaan dan Penawaran



Untuk kepentingan analisis terkait kepariwisataan, pada tahun 2010 Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik telah menyusun Klasifikasi Lapangan Usaha Pariwisata Indonesia (KLUPI)

berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009 dan rekomendasi dari badan-badan internasional (UN dan UNWTO), seperti: *Standard International Classification of Tourism Activity* (SICTA), *Tourism Specific Product* (TSP) dan *International Standard of Industrial Classification* (ISIC). Sehingga klasifikasi tersebut sudah merupakan penggolongan operasional bagi kegiatan industri pariwisata yang telah berkembang di Indonesia selama ini. Klasifikasi ini lebih menekankan pada penggolongan kegiatan ekonomi menurut pelaku produksi (produsen).

2.2.2. Permintaan (*Demand*)

a. Klasifikasi

Sisi permintaan (*demand*) pariwisata mencakup aktivitas ekonomi konsumsi yang dilakukan oleh wisatawan, baik wisatawan mancanegara (wisman atau *inbound tourist*), wisatawan nusantara (wisnus atau *domestic tourist*), maupun wisatawan Indonesia ke luar negeri (wisnas atau *outbond tourist*). Sisi permintaan juga mencakup investasi, promosi dan pembinaan di sektor pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Konsep yang digunakan dalam penyusunan Nesparnas adalah permintaan pariwisata tetapi bukan konsumsi pariwisata karena Nesparnas mencoba untuk mencakup lebih banyak dan lebih luas dari kegiatan pariwisata.

b. Konsep Wisatawan Mancanegara, Wisatawan Nusantara, dan Penduduk Indonesia yang Melakukan Perjalanan ke Luar Negeri

Dengan demikian maka konsep dan definisi wisatawan apabila dilihat dari sisi permintaan adalah sebagai berikut:

Wisatawan Mancanegara (*inbound*)

Sesuai dengan rekomendasi *World Tourism Organization* (UNWTO), batasan/definisi wisatawan mancanegara atau wisman adalah setiap orang

yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. Definisi ini mencakup 2 (dua) kategori tamu mancanegara, yaitu:

- (1) Wisatawan (*Tourist*), yaitu pengunjung yang tinggal di negara yang dikunjungi paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, dengan maksud utama kunjungan:
 - a. Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan olah raga, keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain.
 - b. Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain.
- (2) Pelancong (*Excursionist*), yaitu pengunjung yang tinggal di negara yang dikunjungi kurang dari 24 jam, termasuk *cruise passenger* yang berkunjung ke suatu negara dengan kapal pesiar untuk tujuan wisata, lebih atau kurang dari 24 jam tetapi tetap menginap di kapal yang bersangkutan.

Wisatawan Nusantara (Wisnus)

Wisnus adalah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan di dalam wilayah teritorial Indonesia (perjalanan dalam negeri) secara sukarela kurang dari 6 (enam) bulan dan bukan untuk tujuan bersekolah atau bekerja (memperoleh upah/gaji), serta sifat perjalanannya bukan rutin, dengan kriteria:

- (1) Mereka yang melakukan perjalanan ke objek wisata komersial, tidak memandang apakah menginap atau tidak menginap di hotel/penginapan komersial serta apakah perjalanannya lebih atau kurang dari 100 km pp.

- (2) Mereka yang melakukan perjalanan bukan ke objek wisata komersial tetapi menginap di hotel/akomodasi komersial, walaupun jarak perjalanannya kurang dari 100 km pp.
- (3) Mereka yang melakukan perjalanan bukan ke objek wisata komersial dan tidak menginap di hotel/akomodasi komersial tetapi jarak perjalanannya lebih dari 100 km pp.

Wisatawan Indonesia yang ke luar negeri (*outbound*)

Konsep wisatawan Indonesia yang pergi ke luar negeri atau wisatawan nasional (wisnas) adalah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan ke negara lain bukan untuk bekerja pada penduduk negara yang dikunjungi dan tinggal tidak lebih dari 12 bulan dengan maksud kunjungan antara lain: (a) berlibur, (b) bisnis, (c) kesehatan, (d) pendidikan, (e) misi/pertemuan/kongres, (f) mengunjungi teman/keluarga, (g) keagamaan, (h) olahraga, dan (i) lainnya.

2.3 Penyusunan Pengeluaran Terkait Pariwisata

Dalam menyusun Nesparnas dibutuhkan berbagai jenis data baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan sektor pariwisata maupun data makro. Jenis data dalam Nesparnas pada umumnya berupa data kuantitatif yang bisa dipakai untuk mengukur kinerja sektor pariwisata dalam suatu perekonomian negara.

2.3.1 Struktur Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (*Inbound*)

Secara konsep penghitungan jumlah wisman dilakukan berdasarkan rekomendasi *World Tourism Organization* (UNWTO) yaitu melalui lembaga atau institusi yang mempunyai kewenangan terhadap pencatatan dan pengawasan lalu lintas orang yang masuk ke atau keluar dari suatu negara, yaitu kantor imigrasi. Untuk memilah siapa saja yang termasuk sebagai wisman berdasarkan konsep yang dijelaskan sebelumnya, maka digunakan

jenis visa yang dipakai bagi mereka yang berkewarganegaraan asing (WNA) dan jenis paspor bagi mereka warga negara Indonesia (WNI).

Tidak semua WNA yang datang ke Indonesia adalah wisman, karena WNA yang telah tinggal di Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun sudah tercatat sebagai penduduk Indonesia. Sehingga apabila mereka ingin pergi ke negara asal mereka kemudian kembali lagi ke Indonesia, mereka tidak dicatat sebagai wisman saat kembali ke Indonesia. Dokumen yang mereka gunakan bukan visa tetapi *Exit Reentry Permit* (ERP) atau *Multiple Exit Reentry Permit* (MERP). Sebaliknya, tidak semua WNI yang datang dari luar negeri tidak termasuk sebagai wisman. Bagi mereka yang sudah tinggal di luar negeri lebih dari 1 (satu) tahun atau berniat untuk tinggal lebih dari 12 bulan, mereka dicatat sebagai wisman saat datang ke Indonesia.

Untuk mendeteksi mana yang sebagai penduduk luar negeri (Penlu/Pendul) dan mana yang bukan, dari pencatatan laporan UPT Imigrasi belum dapat digunakan untuk data WNI pemegang paspor biasa termasuk di dalamnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Untuk memisahkan data WNI pemegang paspor biasa antara yang merupakan pendul atau bukan, maka perlu dilakukan survei khusus. Pada tahun 2008 dan diperbarui pada tahun 2017 Kemenpar dan BPS bekerja sama melakukan survei untuk mengetahui rasio WNI pemegang paspor biasa, termasuk TKI, yang dikategorikan sebagai penduduk luar negeri. Sedangkan bagi mereka yang menggunakan paspor dinas dan paspor diplomatik tidak dipisahkan antara mereka yang berdomisili di luar negeri atau di Indonesia. Untuk itu hanya digunakan perkiraan persentase (*rule of thumb*) bagi pemegang paspor dinas 10 persennya adalah wisman dan bagi pemegang paspor diplomatik 50 persennya adalah wisman. Besarnya persentase ini masih perlu dikaji kembali.

Mengingat luas dan banyaknya pintu masuk ke wilayah teritorial Indonesia, untuk melengkapi data wisman maka mulai tahun 2016 dilakukan survei untuk mendeteksi kedatangan wisman di pos-pos lintas batas yang belum dicatat oleh pihak imigrasi karena alasan lokasi maupun kekurangan

tenaga. Selain itu, mulai Oktober 2016 penghitungan wisman untuk daerah-daerah perbatasan juga memanfaatkan *Mobile Positioning Data* (MPD) mengingat luasnya dan banyaknya pintu-pintu masuk ke Indonesia.

Pencermatan juga dilakukan terhadap WNA pemegang KITAS karena adanya perubahan kebijakan keimigrasian terkait KITAS. Penerbitan KITAS yang sebelumnya hanya untuk WNA yang akan bekerja, sejak 2015 diperluas juga dapat diterbitkan untuk WNA sebagai wisman lanjut usia, rohaniwan, WNA dengan maksud kunjungan diklat, riset, dan lain-lain. Pada tahun 2017, BPS melakukan survei terkait WNA pemegang KITAS di beberapa pintu utama untuk menentukan besarnya rasio WNA pemegang KITAS yang dapat dikategorikan wisman sesuai definisi yang direkomendasikan UNWTO.

Dalam penyusunan Nesparnas, bukan hanya data jumlah kunjungan wisman, namun juga diperlukan nilai pengeluaran mereka selama di Indonesia. Secara ideal penghitungan devisa pariwisata baik yang diterima maupun yang dikeluarkan seperti yang dilakukan dalam penghitungan ekspor dan impor barang melalui dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Setiap barang yang keluar masuk dari dalam dan luar negeri harus mengisi daftar PEB atau PIB yang mencantumkan jenis barang, volume dan nilai dari barang tersebut. Namun, karena data tersebut tidak tersedia, maka untuk mendapatkan data pengeluaran wisman dilakukan survei yaitu *Passenger Exit Survey* (PES).

Survei PES dilaksanakan oleh Kemenpar setiap tahun. Tujuan utama PES adalah untuk mengetahui rata-rata pengeluaran wisman selama di Indonesia menurut negara tempat tinggal mereka, selain itu juga rata-rata lama tinggal mereka di Indonesia. Untuk melengkapi keakuratan hasil survei tersebut juga dilakukan studi mendalam ke biro-biro perjalanan wisata yang menyelenggarakan paket *inbound* guna lebih mencermati distribusi pengeluaran wisman. Total pengeluaran wisman merupakan perkalian antara jumlah wisman dengan rata-rata pengeluaran mereka selama di Indonesia.

2.3.2 Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara

Pengeluaran yang dicatat dalam pengumpulan data wisnus adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan di wilayah teritorial Indonesia. Karena jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 261,89 juta pada tahun 2017 dan kesejahteraan penduduk Indonesia yang terus meningkat, maka tingkat mobilitas penduduk Indonesia juga ikut meningkat. Peningkatan mobilitas penduduk ini mengindikasikan adanya peningkatan penduduk yang melakukan perjalanan “wisata”.

Sebelum tahun 2016, pengumpulan data wisnus dilakukan dengan pendekatan rumahtangga melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan metode sampel. Namun sejak tahun 2016 pengumpulan data wisnus dilakukan secara terpisah melalui survei rumahtangga hasil kerjasama Kementerian Pariwisata dan Badan Pusat Statistik. Adapun rincian tentang pengeluaran yang ditanyakan mencakup biaya-biaya untuk:

1. Akomodasi
2. Makan dan minum
3. Angkutan, baik angkutan kereta api, jalan raya, angkutan air, maupun angkutan udara
4. Sewa kendaraan
5. Paket perjalanan
6. Pemandu wisata
7. Hiburan dan rekreasi
8. Cenderamata atau oleh-oleh dan belanja
9. Kesehatan dan kecantikan
10. Lain-lain

Semua rincian biaya di atas adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh penduduk selama melakukan perjalanan, baik yang dibayar sendiri maupun yang dibayar oleh pihak lain. Pengeluaran tersebut juga termasuk kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh penduduk yang melakukan

perjalanan yang sudah menikmati barang atau jasa selama dalam perjalanan namun pembayaran atas barang atau jasa tersebut dilakukan setelah selesai melakukan perjalanan. Bahkan secara konsep pengeluaran perjalanan juga termasuk pengeluaran yang dilakukan sebelum melakukan perjalanan tetapi akan digunakan dalam perjalanan, seperti membeli makanan untuk bekal perjalanan. Dalam hal ini termasuk juga pengeluaran yang dilakukan setelah melakukan perjalanan yang masih berkaitan dengan perjalanan yang telah dilakukan, seperti biasa memperbaiki kendaraan yang rusak akibat digunakan untuk melakukan perjalanan.

2.3.3 Struktur Pengeluaran Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri (*outbound*)

Jumlah penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri akhir-akhir ini menunjukkan adanya peningkatan, terutama setelah membaiknya kondisi perekonomian Indonesia. Iklan paket wisata ke luar negeri yang cukup gencar di media massa menunjukkan bahwa pasar wisata ke luar negeri banyak diminati utamanya oleh mereka yang berkecukupan. Dari data yang ada, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah wisatawan Indonesia ke luar negeri (wisnas), untuk 18 pintu keluar utama, jumlahnya terus meningkat meskipun terjadi perlambatan pada beberapa tahun terakhir.

Untuk menghitung jumlah penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri bisa diperoleh dari Ditjen Imigrasi. Namun apabila ingin dilihat negara tujuan mereka di luar negeri masih belum bisa terpenuhi karena sejak tahun 2014 tidak ada kewajiban bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan berangkat ke atau datang dari luar negeri untuk mengisi kartu kedatangan dan keberangkatan (*A/D Card*). Sehingga data mengenai karakteristik wisnas saat ini belum tersedia sesuai dengan kebutuhan pariwisata.

Data pengeluaran penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri diperoleh melalui survei yang dilakukan di beberapa pintu keluar (*Outbound Survey*). Pendekatan yang dilakukan adalah mewawancarai mereka saat tiba di

Indonesia dan menanyakan berbagai karakteristik perjalanan mereka termasuk biaya perjalanan mereka di luar negeri. Dalam menanyakan pengeluaran biaya tiket perjalanan dari Indonesia ke luar negeri ataupun sebaliknya, dipisah (atau bahkan tidak ditanyakan) karena dalam konsep neraca, biaya tersebut sudah termasuk dalam neraca jasa-jasa (angkutan). Sementara itu biaya transportasi selama di luar negeri tetap dicatat. Namun, survei terhadap penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri tidak dilaksanakan setiap tahun, dan survei terakhir dilaksanakan pada tahun 2013. Sehingga untuk data konsumsi wisnas sejak tahun 2014 hingga saat ini menggunakan data proyeksi.

Jenis pengeluaran yang ditanyakan dalam survei outbound ini hampir sama dengan survei wisnus, yaitu:

1. Akomodasi
2. Makan dan minum
3. Angkutan, baik angkutan darat, angkutan air, maupun angkutan udara yang dilakukan di luar negeri (tidak termasuk angkutan dari dan ke Indonesia)
4. Rekreasi dan hiburan
5. Belanja/Cenderamata
6. Pendidikan
7. Kesehatan dan kecantikan
8. Lain-lain

Dalam rincian pengeluaran di atas juga termasuk pengeluaran sebelum maupun sesudah melakukan perjalanan dari luar negeri yang masih berkaitan dengan perjalanannya seperti contoh dalam wisnus.

2.3.4 Struktur Investasi Pariwisata

Investasi diartikan sebagai suatu kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan untuk memperoleh benefit atau manfaat pada masa yang akan datang. Investasi dibutuhkan untuk mendukung

keberlangsungan pembangunan ekonomi suatu negara. Dari informasi yang tersedia menunjukkan bahwa trend investasi menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan di berbagai bidang.

Dari studi empiris yang dilakukan di berbagai negara hampir dipastikan bahwa keberhasilan pembangunan suatu negara akan sangat dipengaruhi oleh pola dan struktur investasinya, bahkan juga sumber investasi tersebut apakah dari dana domestik atau dari luar negeri. Investasi dapat terbentuk karena terjadinya surplus usaha yang pada gilirannya kan membentuk tabungan yang merupakan sumber dana utama investasi.

Secara konsep investasi dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu **“investasi finansial”** dan **“investasi non-finansial”**. Investasi finansial lebih dititik beratkan pada investasi dalam bentuk kepemilikan instrumen finansial seperti uang tunai, emas, tabungan, deposito, saham dan sejenisnya. Sedangkan investasi fisik lebih menekankan pada realisasi berbagai jenis investasi fisik seperti bangunan, kendaraan, mesin-mesin dan sejenisnya. Untuk selanjutnya yang dimaksud dengan investasi dalam kaitannya dengan sektor pariwisata disini adalah investasi fisik saja.

Secara definitif yang dimaksud dengan investasi pariwisata adalah pengeluaran dalam rangka pembentukan modal yang dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelaku investasi tersebut adalah produsen penghasil produk barang dan jasa, baik pemerintah, BUMN/BUMD maupun pihak swasta (termasuk rumah tangga).

Investasi fisik tersebut berupa pembuatan bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal (hotel, kantor, tempat hiburan dan sebagainya), pembangunan infrastruktur, pembelian mesin, kendaraan dan barang modal lainnya, termasuk juga perbaikan besar yang dilakukan guna meningkatkan kapasitas barang modal atau memperpanjang umur pemakaian barang modal tersebut.

Selanjutnya untuk mengukur besarnya investasi di sektor pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut digunakan data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang diturunkan dari data PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Investasi tersebut direalisasikan dalam bentuk berbagai jenis barang modal, diberbagai kegiatan ekonomi dan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sumber data utama yang digunakan dalam menyusun investasi pariwisata adalah data nilai penyediaan domestik maupun impor yang diturunkan dari tabel Input-Output 2010 dan PDB tahun 2017. Sebagai data banding digunakan data investasi yang dikompilasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam bentuk persetujuan investasi berdasarkan fasilitas yang diberikan yang dibedakan menurut asal modal perusahaan, yaitu PMA dan PMDN.

2.3.5 Struktur Pengeluaran Lainnya Terkait Pariwisata

Pengeluaran lainnya terkait pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah, mencakup pengeluaran promosi, pembinaan serta pengeluaran lainnya yang bersifat non investasi atau modal. Pengeluaran ini terdiri dari pengeluaran promosi, periklanan pada kegiatan yang terkait dengan pariwisata seperti kegiatan perhotelan, restoran, industri pengolahan dan pertanian yang terkait dengan pariwisata, serta sektor jasa yang terkait dengan pariwisata. Secara garis besar pengeluaran ini akan tergambar dalam belanja barang dalam pengeluaran rutin pemerintah. Termasuk pula balas jasa dalam rangka pembinaan pegawai pemerintah yang bergerak di sektor pariwisata yang tercermin dari belanja pegawai dari anggaran rutin pemerintah.

Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan pengeluaran lainnya terkait pariwisata oleh pemerintah berasal dari pengeluaran rutin APBN untuk pemerintah pusat di Kementerian Keuangan, serta pengeluaran rutin APBD seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Bappenas. Disamping itu, juga dari publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi yang

mencakup pengeluaran rutin APBD Tingkat I seluruh provinsi dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mencakup pengeluaran rutin APBD Tingkat II seluruh kabupaten/kota, serta Statistik Keuangan Pemerintah Desa K3 yang mencakup pengeluaran rutin dari pemerintahan desa yang berasal dari BPS. Disamping itu dipergunakan pula tabel I-O Indonesia tahun 2010 dari BPS.

Pengeluaran pemerintah (*current expenditure*) dalam promosi dan pembinaan pariwisata adalah cerminan dari pelaksanaan sebagian besar anggaran rutin yang berasal dari APBN maupun APBD yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata beserta seluruh jajarannya, dan Dinas Pariwisata pemerintah daerah tingkat I/provinsi dan pemerintah daerah tingkat II/kabupaten/kota, yang berhubungan dengan sektor kepariwisataan. Jadi lingkup pengeluaran ini lebih luas dari lingkup investasi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah yang telah dibicarakan sebelumnya.

2.4 Jenis-Jenis Tabel/Subneraca Nesparnas

Ada 10 (sepuluh) jenis tabel ikhtisar dan tabel subneraca yang digunakan sebagai bagian analisis dalam kerangka Neraca Pariwisata (*Tourism Satellite Account*) yang direkomendasikan oleh UNWTO. Tabel-tabel standar ini disusun sedemikian rupa agar kinerja sektor pariwisata dan posisinya dalam ekonomi makro daerah dapat dijelaskan secara terukur dan memadai. Namun demikian struktur tabel dalam Nesparnas ini berbeda dengan sepuluh tabel yang direkomendasikan oleh UNWTO, karena keterbatasan data di Indonesia dan adanya perbedaan klasifikasi dari produk pariwisata. Sebagai contoh data *same day visitors* tidak tersedia secara rinci. Berdasarkan hasil kajian data yang tersedia, tabel-tabel yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

- (1) Tabel 1, menggambarkan struktur pengeluaran wisatawan mancanegara (wisman) menurut jenis-jenis produk barang dan jasa yang dikonsumsi dan negara asal
- (2) Tabel 2, menggambarkan struktur pengeluaran wisatawan nusantara menurut jenis produk barang dan jasa yang dikonsumsi dan Provinsi asal (Tabel 2.a) serta Provinsi tujuan (Tabel 2.b)
- (3) Tabel 3, menggambarkan struktur pengeluaran wisatawan Indonesia yang bepergian ke luar negeri, menurut jenis produk barang dan jasa yang dikonsumsi dan kategori pengeluarannya (yaitu pengeluaran dalam negeri berkaitan dengan *pre dan post-trip* dan pengeluaran di luar negeri berkaitan dengan *trip*-nya sendiri).
- (4) Tabel 4, merupakan penggabungan dari tabel 1, tabel 2 dan tabel 3 yang menggambarkan struktur pengeluaran seluruh wisatawan (wisman, wisnus dan outbound) menurut jenis produk barang dan jasa yang dikonsumsi dan jenis wisatawannya.
- (5) Tabel 5, (subneraca) menggambarkan tentang struktur input industri (sektor-sektor) yang terkait dengan pariwisata. Baris-baris pada subneraca ini menunjukkan input yang digunakan dalam suatu proses produksi yang dibagi dalam dua jenis input yaitu: (a) berbagai produk barang dan jasa yang digunakan sektor pariwisata sebagai input antara, dan (b) balas jasa faktor (nilai tambah) yang diciptakan oleh sektor pariwisata, atau disebut juga sebagai input primer. Subneraca ini lebih menggambarkan sebagai bagian dari suatu sistem produksi yang transaksinya diantaranya disajikan dalam tabel input-output. Dari tabel tersebut dapat dicerminkan keseimbangan sisi penawaran dan sisi permintaan barang dan jasa dalam berbagai aktivitas ekonomi pariwisata.
- (6) Tabel 6, (subneraca), memperlihatkan struktur pembentukan modal tetap bruto (investasi fisik) yang merupakan bagian dari investasi yang direalisasikan untuk menunjang kegiatan pariwisata. Investasi fisik tersebut dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah) maupun swasta (daerah dan

asing) dalam bentuk bangunan hotel, restoran, mesin dan peralatan, alat angkutan, dan barang modal penunjang lainnya.

- (7) Tabel 7, (subneraca), menggambarkan jumlah pekerja yang terlibat pada industri pariwisata menurut sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata
- (8) Tabel 8, (subneraca), memperlihatkan struktur pengeluaran pemerintah (pusat dan daerah) dan dunia usaha dalam promosi dan pembinaan sektor pariwisata (*current expenditure*), dirinci menurut jenis aktivitas yang dilakukan
- (9) Tabel 9, (sub-neraca), memperlihatkan peranan pariwisata dalam struktur Output dan PDB menurut sektor produksi (Neraca Produksi)

2.5 Model Pengukuran Dampak Pariwisata

Pariwisata dengan segala aspeknya dapat memberikan dampak kepada berbagai aspek kehidupan, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Secara ekonomi, dampak pariwisata menjadi potensi besar dalam penerimaan devisa negara dari konsumsi wisman terhadap produk barang dan jasa. Tidak kalah pentingnya adalah perjalanan wisnus yang memberi porsi besar dalam penciptaan ekonomi daerah maupun regional.

Model Input-Output digunakan untuk mengukur dampak pariwisata terhadap perekonomian Indonesia. Model ini didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi yang memiliki asumsi homogenitas (kesatuan output), proporsionalitas (hubungan linear input dan output) dan aditivitas. Model ini menggunakan Tabel Input Output (I-O) berupa suatu matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dan periode tertentu. Kerangka dasar Tabel I-O menggambarkan transaksi produksi barang dan jasa yang dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama (kolom) menunjukkan struktur input sektor-sektor ekonomi, komposisi nilai tambah yang dihasilkan dan struktur permintaan akhir (*final demand*) terhadap barang dan jasa. Sisi kedua (baris)

menunjukkan distribusi (alokasi) output barang dan jasa untuk proses produksi, *final demand*, dan impor.

Tabel I-O yang digunakan dalam mengukur dampak pariwisata tahun 2017 adalah Tabel I-O 2010. Beberapa masalah timbul karena sisi penyediaan (*supply*) pariwisata tidak sama dengan struktur yang ada di Tabel I-O. Perbedaan tersebut muncul karena hasil dari penghitungan pengeluaran wisatawan tidak dimanfaatkan dalam kompilasi tabel I-O sehingga menyebabkan ketidak-konsistenan antara sisi permintaan dan penawaran.

Tabel 2.1. Input-Output Untuk Sistem Perekonomian dengan Tiga Sektor Produksi

Struktur Input		Alokasi Output	Permintaan Antara			Permintaan Akhir	Jumlah Output
			Sektor Produksi				
		1	2	3			
Input Antara	Sektor 1	1	X_{11}	X_{12}	X_{31}	F_1	X_1
	Produksi 2	2	X_{21}	X_{22}	X_{32}	F_2	X_2
	3	3	X_{31}	X_{23}	X_{33}	F_3	X_3
Input Primer			V_1	V_2	V_3		
Jumlah Input			X_1	X_2	X_3		

Dalam analisis dampak pariwisata terhadap kinerja perekonomian, permintaan akhir yang terdiri dari (1) pengeluaran wisnus, wisman, serta pre dan post trip dari wisatawan Indonesia yang keluar negeri, (2) investasi sektor pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta, dan (3) pengembangan dan promosi pariwisata oleh pemerintah, menjadi faktor eksogen yang mendorong penciptaan nilai produksi barang dan jasa. Pengeluaran dari wisnus dan *pre* dan *post trip* wisnas adalah bagian dari konsumsi rumahtangga, pengeluaran wisman merupakan bagian dari ekspor

barang dan jasa, pengeluaran untuk investasi sektor pariwisata adalah bagian dari pembentukan modal tetap dan pengeluaran untuk promosi merupakan bagian dari pengeluaran konsumsi pemerintah sedangkan pengeluaran wisatawan Indonesia di luar negeri merupakan impor barang dan jasa.

Dalam pengukuran dampak pariwisata, masing-masing struktur pengeluaran dari permintaan akhir diklasifikasikan kembali sesuai klasifikasi sektor dari Tabel I-O dan dampaknya diperoleh dengan mengalikannya dengan koefisien multiplier Leontief (dikenal dengan matriks A).

Dalam analisis dampak pariwisata terhadap kinerja ekonomi nasional, permintaan akhir menjadi faktor eksogen yang mendorong penciptaan nilai produksi barang dan jasa. Dalam kaitannya dengan dampak pariwisata, faktor pendorong (*exogenous variable*) berupa konsumsi wisatawan mancanegara (wisman), wisatawan nusantara (wisnus), wisatawan Indonesia ke luar negeri (wisnas) terhadap produk dalam negeri, investasi pariwisata dan pengeluaran pemerintah untuk pariwisata (APBN), serta lembaga-lembaga nirlaba yang ikut andil dalam kegiatan pariwisata. Dengan model IO dampak kepariwisataan dapat dihasilkan sebagai berikut:

1. Dampak Terhadap Output

Pengeluaran konsumsi pariwisata akan berdampak terhadap penciptaan nilai produksi barang dan jasa sektoral. Hubungan antara konsumsi kepariwisataan dengan nilai output dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$X_i = (I-A^d)^{-1} \cdot C_i \dots\dots\dots (1)$$

dimana:

X_i = output yang diciptakan akibat konsumsi kepariwisataan.

$(I-A^d)^{-1}$ = invers matriks berfungsi sebagai koefisien regresi dalam model.

C_i = konsumsi kepariwisataan, mencakup 1) wisman, 2) wisnus, 3) wisnas, 4) investasi pariwisata, dan 5) pengeluaran pemerintah untuk pariwisata.

i = 1, 2, 3, 4, 5.

Persamaan (1) mendasarkan hubungan linier antara permintaan akhir, dalam hal ini konsumsi pariwisata dengan output. Semakin besar jumlah permintaan terhadap produk barang dan jasa maka output yang harus disediakan harus bertambah mengikuti matriks pengganda sebagai koefisien regresinya. Persamaan di atas menghasilkan nilai output barang dan jasa setiap sektor akibat dari konsumsi pariwisata. Dapat diketahui dampak output akibat masing-masing komponen konsumsi pariwisata terhadap sektor-sektor ekonomi. Misalkan, pengeluaran wisman di Indonesia akan berdampak terhadap penambahan nilai produksi barang dan jasa. Demikian pula akibat adanya aktifitas wisnus, investasi pariwisata dan pengeluaran pemerintah untuk pengembangan pariwisata akan memberikan dampak terhadap perekonomian nasional.

2. Dampak Terhadap Nilai Tambah Bruto

Nilai tambah bruto (NTB) merupakan bagian dari nilai output sektor ekonomi. Sebagai balas jasa atas faktor produksi, NTB mencakup kompensasi tenaga kerja, surplus usaha, dan pajak dikurangi subsidi lainnya atas produksi (pajak atas produksi neto). Sebagaimana model I-O untuk menghasilkan nilai output akibat konsumsi pariwisata, nilai tambah yang diciptakan juga berbanding lurus dengan permintaan atau konsumsi kepariwisataan. Formulasi yang menunjukkan hubungan tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} V_i &= v (I-A^d)^{-1} . C_i \\ &= v . X_i \dots\dots\dots (2) \end{aligned}$$

dimana:

- V_i = nilai tambah bruto karena dampak konsumsi kepariwisataan.
- v = matriks diagonal koefisien nilai tambah bruto, yaitu rasio antara nilai tambah bruto sektor tertentu dengan outputnya.
- C_i = konsumsi kepariwisataan, mencakup 1) wisman, 2) wisnus, 3) wisnas, 4) investasi pariwisata, dan 5) pengeluaran pemerintah untuk pariwisata
- i = 1, 2, 3, 4, 5.

Persamaan (2) menunjukkan hubungan searah antara nilai tambah bruto dengan nilai outputnya. Ini juga berarti bahwa terdapat hubungan antara konsumsi kepariwisataan dengan penciptaan nilai tambah sektor ekonomi, yaitu pengeluaran wisman, wisnus, investasi pariwisata, dan lainnya.

3. Dampak Terhadap Kompensasi Tenaga Kerja dan Pajak Neto

Salah satu komponen nilai tambah bruto adalah kompensasi tenaga kerja dan pajak kurang subsidi lainnya atas produksi (pajak atas produksi neto). Pajak lainnya atas produksi adalah pajak yang dikenakan dalam rangka proses produksi. Pajak lainnya atas produksi mencakup pajak yang dibayar atas lahan, aset, tenaga kerja, dan lainnya dalam aktivitas produksi. Dari model I-O dapat diturunkan hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kepariwisataan. Hubungan tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 V_{ji} &= v_j (I-A^d)^{-1} \cdot C_i \\
 &= v_j \cdot X_i \dots\dots\dots(3)
 \end{aligned}$$

dimana:

V_{ji} = Kompensasi tenaga kerja dan pajak atas produksi neto akibat konsumsi kepariwisataan.

v_j = matriks diagonal koefisien kompensasi tenaga kerja dan pajak atas produksi neto, yaitu rasio antara upah/gaji dan pajak tak langsung sektor tertentu dengan outputnya.

j = 1) kompensasi tenaga kerja, 2) pajak atas produksi neto.

C_i = konsumsi kepariwisataan, mencakup 1) wisman, 2) wisnus, 3) wisnas, 4) investasi pariwisata, dan 5) pengeluaran pemerintah untuk pariwisata

i = 1, 2, 3, 4, 5.

Persamaan (3) ini mengindikasikan adanya keterkaitan antara konsumsi kepariwisataan dengan kompensasi tenaga kerja sektor-sektor ekonomi dan penerimaan pajak bagi pemerintah dari aktivitas ekonomi tersebut.

4. Dampak Pariwisata Terhadap Kesempatan Kerja

Dalam setiap aktivitas ekonomi dan produksi, dibutuhkan sejumlah faktor produksi, diantaranya yang penting adalah tenaga kerja. Dalam hubungan yang sederhana, setiap unit produk yang dihasilkan akan membutuhkan input tenaga kerja. Dengan demikian, pengeluaran wisatawan terhadap barang dan jasa akan dapat dihitung pula dampaknya pada kesempatan kerja.

Pariwisata memiliki dimensi yang sangat luas dan lintas sektor. Usaha pariwisata tidak terbatas pada sektor usaha yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pariwisata atau Dinas Pariwisata, tetapi juga mencakup berbagai sektor usaha lain yang pembinaannya di bawah kewenangan kementerian/ lembaga lain.

Pada tahun 2010 Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pariwisata telah menyusun Klasifikasi Lapangan Usaha Bidang Pariwisata Indonesia untuk mengidentifikasi usaha atau industri yang berkaitan langsung dengan kegiatan

pariwisata. Klasifikasi tersebut merupakan sinkronisasi antara usaha pariwisata sesuai Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Kepariwisata beserta turunannya dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Selain bermanfaat untuk pembinaan, klasifikasi tersebut juga sangat bermanfaat dalam penyusunan data statistik terkait usaha pariwisata, antara lain mengetahui jumlah usaha, jumlah tenaga kerja yang terserap, dan karakteristik lainnya terkait industri atau usaha yang dikategorikan industri pariwisata.

Namun, mengingat luasnya cakupan usaha pariwisata, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, pembahasan tenaga kerja pada analisis ini hanya akan difokuskan pada tenaga kerja yang bekerja pada industri atau usaha yang terkait langsung dengan kegiatan pariwisata (lihat Lampiran A). Sumber data yang digunakan berasal dari Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS setiap tahun.

Dampak pariwisata terhadap perekonomian sangat ditentukan oleh: (1) struktur pengeluaran wisatawan dan besarnya, (2) struktur investasi pariwisata dan nilainya, dan (3) struktur dan nilai pengeluaran pemerintah untuk pariwisata. Pendekatan yang digunakan untuk melihat dampak kegiatan pariwisata terhadap perekonomian adalah menggunakan analisis dampak dengan model input-output.

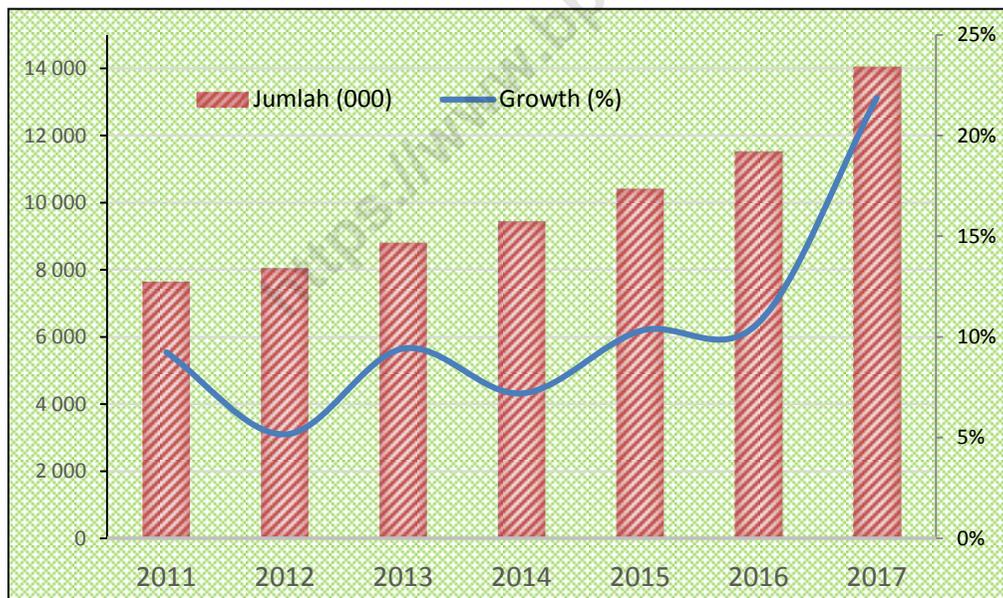
3.1 Struktur Pengeluaran Wisatawan Mancanegara

Meningkatnya jumlah kunjungan wisman ke Indonesia akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi perkembangan kepariwisataan di Indonesia. Hal ini dapat dipahami dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisman maka uang yang dibelanjakan juga akan meningkat. Nilai konsumsi wisman menempati urutan terbesar kedua dalam struktur pengeluaran pariwisata di Indonesia di bawah wisnus.

Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisman pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisman mencapai 14,04 juta kunjungan atau naik 21,88 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman tahun 2016 yang tercatat 11,52 juta kunjungan. Kenaikan jumlah kunjungan wisman tahun 2017 ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari dalam (*internal factors*) maupun luar (*external factors*). Gencarnya promosi pariwisata Indonesia di berbagai negara dan media internasional dengan branding *Wonderful Indonesia*, diyakini sebagai salah satu pendorong meningkatnya jumlah kunjungan wisman ke Indonesia. Kenaikan jumlah wisman ini terjadi hampir di semua pintu masuk utama ke Indonesia. Hal lain yang cukup mendukung kedatangan wisman pada tahun ini adalah kondusifnya situasi keamanan dalam negeri, serta

perkembangan perekonomian yang masih menunjukkan pertumbuhan yang positif khususnya di negara-negara pemasok wisman ke Indonesia, seperti Malaysia, Tiongkok, Singapura, dan Australia. Di sisi lain, walaupun masalah keamanan global kurang kondusif pada beberapa tahun terakhir, terutama di kawasan Timur Tengah, namun dampaknya pada kunjungan wisman ke Indonesia di tahun 2017 relatif kecil. Faktor yang cukup menekan kedatangan wisman ke Indonesia adalah bencana alam. Salah satu bencana alam yang terjadi pada tahun 2017 adalah gunung meletus, seperti Gunung Agung di Bali. Meletusnya Gunung Agung menyebabkan kedatangan wisman ke Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata Indonesia terganggu.

Gambar 3.1. Jumlah Kunjungan Wisman ke Indonesia, Tahun 2011-2017



Sumber: BPS

Sebagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2017 jumlah kunjungan terbanyak berasal dari warga negara Malaysia yang mencapai 2,12 juta orang atau 15,11 persen dari total kedatangan wisman, kemudian diikuti oleh wisman berkebangsaan Tiongkok dan Singapura dengan

kontribusi masing-masing sebesar 14,91 persen dan 11,07 persen. Kedekatan geografis menjadi faktor utama besarnya jumlah wisman dari negara-negara tersebut. Selain kedekatan geografis, kedatangan wisman berkebangsaan Malaysia ke Indonesia juga disebabkan karena faktor hubungan historis sesama rumpun Melayu. Selanjutnya wisman berkebangsaan Australia menempati urutan keempat terbesar dengan menyumbang 1,26 juta wisatawan atau 8,95 persen. Sementara negara-negara lain yang masuk sepuluh besar lainnya sebagai penyumbang wisman ke Indonesia adalah Timor Leste, Jepang, India, Korea Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat.

Tabel 3.1. Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Indonesia Menurut Kebangsaan, Tahun 2013-2017

Kebangsaan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Malaysia	1 380 686	1 418 256	1 458 593	1 541 197	2 121 888
Tiongkok	858 140	1 052 705	1 260 700	1 556 771	2 093 171
Singapura	1 432 060	1 559 044	1 624 058	1 515 701	1 554 119
Australia	983 911	1 145 576	1 099 058	1 302 292	1 256 927
Timor Leste	29 673	27 969	27 895	43 781	960 026
Jepang	497 399	505 175	549 705	545 392	573 310
India	231 266	267 082	319 608	422 045	536 902
Korea Selatan	351 154	352 004	387 473	386 789	423 191
Inggris	236 794	244 594	292 745	352 017	378 131
Amerika Serikat	236 375	246 397	276 027	316 782	344 766
Lainnya	2 346 771	2 396 396	2 865 162	3 281 379	3 797 368
Jumlah	8 802 129	9 435 411	10 406 759	11 519 275	14 039 799

Sumber: BPS

Sementara dilihat dari besarnya uang yang dibelanjakan wisman selama mengunjungi Indonesia, pada tahun 2017 total konsumsi wisman di Indonesia mencapai Rp 198,89 triliun. Jika dibandingkan dengan nilai konsumsi wisman pada tahun 2016 yang sebesar Rp 176,23 triliun, konsumsi wisman tahun 2017 mengalami peningkatan (12,86 persen). Peningkatan jumlah konsumsi wisman ini disebabkan selain karena kenaikan jumlah

kunjungan wisman ke Indonesia, juga karena melemahnya mata uang Rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

Pengeluaran wisman selama di Indonesia terbesar adalah untuk membayar jasa hotel atau akomodasi lainnya dan produk makanan dan minuman masing-masing mencapai 40,14 persen dan 18,14 persen dari total pengeluaran. Pengeluaran lain yang cukup besar adalah untuk biaya transportasi yang meliputi angkutan rel, jalan raya, air, udara dan penyewaan kendaraan yang mencapai 18,0 persen. Pengeluaran untuk membeli cinderamata juga cukup besar, yaitu mencapai 6,26 persen.

Tabel 3.2. Struktur Pengeluaran Wisman Menurut Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi, Tahun 2017

Produk (1)	Nilai (miliar rupiah) (2)	Distribusi (%) (3)
A. Produk karakteristik pariwisata		
1. Akomodasi dan sejenisnya	79 827,4	40,14
2. Makanan dan minuman	36 085,0	18,14
3. Angkutan KA	1 134,0	0,57
4. Angkutan jalan raya	14 578,9	7,33
5. Angkutan air	2 429,0	1,22
6. Angkutan udara	17 343,2	8,72
7. Sewa kendaraan	324,0	0,16
8. Agen perjalanan dan jasa reservasi	3 319,0	1,67
9. Pertunjukan seni, budaya, museum dan peninggalan sejarah	1 031,2	0,52
10. Jasa rekreasi/hiburan	9 281,0	4,67
11. Cinderamata	12 457,6	6,26
12. Kecantikan dan kesehatan	4 477,0	2,25
13. Pertemuan, seminar, konferensi	1 106,3	0,56
B. Produk konsumsi lainnya		
14. Belanja	13 798,0	6,94
15. Bahan bakar dan pelumas	-	-
16. Lainnya	1 700,1	0,85
Jumlah	198 891,6	100,00

Sumber: Kementerian Pariwisata, 2018 (diolah)

Selanjutnya pengeluaran wisman yang terkait kegiatan berekreasi dan hiburan, seperti untuk membayar agen perjalanan lokal, biaya jasa rekreasi, hiburan, pertunjukan seni, budaya dan sebagainya masih relatif kecil. Pengeluaran terbesar terkait rekreasi dan hiburan adalah untuk biaya jasa rekreasi/hiburan yang mencapai 4,67 persen. Demikian pula halnya wisman dengan tujuan kesehatan dan kecantikan, yang masih kecil porsinya. Hal ini karena memang wisman yang datang ke Indonesia dengan tujuan kesehatan/berobat dan kecantikan sangat kecil jumlahnya disebabkan Indonesia belum merupakan daerah tujuan wisata kesehatan seperti halnya Malaysia dan Singapura.

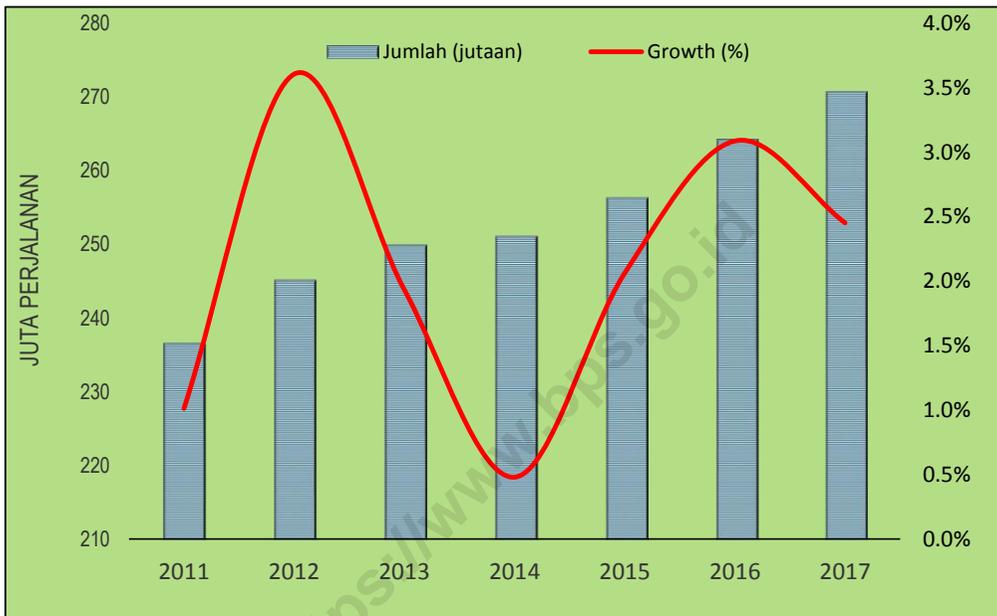
3.2 Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara

Kondisi perekonomian yang terus tumbuh akan berimbas pada meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat membelanjakan sebagian penghasilannya untuk hal-hal di luar kebutuhan pokok, salah satunya untuk melakukan perjalanan wisata. Jumlah perjalanan wisnus terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, jumlah perjalanan wisnus mencapai 270,82 juta, naik sebesar 2,45 persen dibanding tahun 2016 yang sebanyak 264,34 juta.

Provinsi-provinsi di Pulau Jawa masih menjadi tujuan utama perjalanan wisnus. Hal ini wajar karena jumlah penduduk di pulau Jawa merupakan yang terbesar. Sepuluh provinsi tujuan utama perjalanan wisnus adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, dan Sulawesi Selatan. Provinsi dengan jumlah kunjungan terbanyak adalah Jawa Timur yaitu mencapai 44,49 juta perjalanan atau 16,43 persen dari total perjalanan, diikuti Jawa Barat dan Jawa Tengah masing-masing sebanyak 44,14 juta dan 40,99 juta. Sementara Bali yang merupakan daerah wisata tujuan bagi wisman, jumlah perjalanan wisnus mencapai 9,23 juta perjalanan atau 3,41 persen dari total perjalanan. Demikian

juga dengan DI Yogyakarta sebagai salah satu tujuan wisata utama mendapat kunjungan sebanyak 13,76 juta perjalanan atau 5,08 persen dari total perjalanan.

Gambar 3.2. Jumlah Perjalanan Wisnus di Indonesia, Tahun 2011-2017

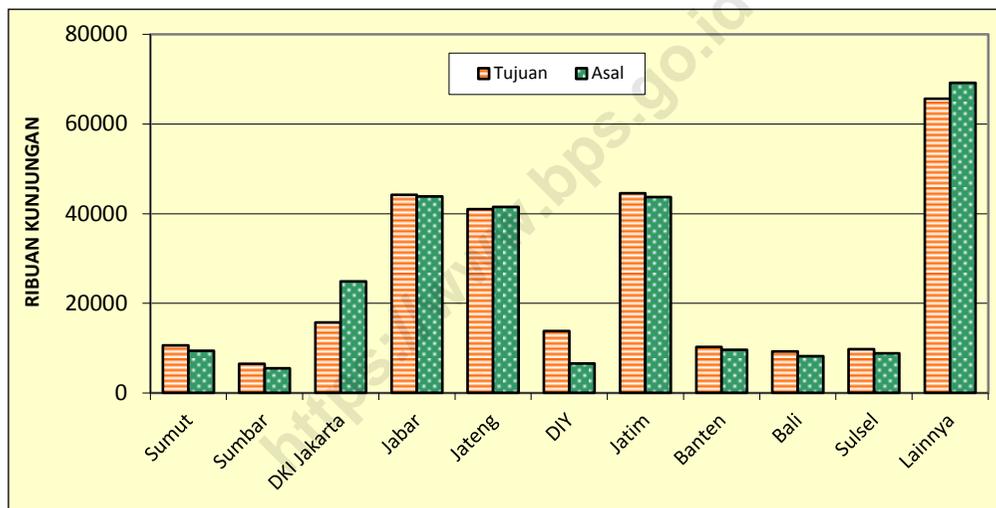


Sumber: BPS

Bila dilihat *travel balance* menurut provinsi, secara jumlah pada tahun 2017 jumlah perjalanan wisnus yang berkunjung ke suatu provinsi tidak berbeda jauh dengan mereka yang berasal dari provinsi tersebut, kecuali DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. DKI Jakarta jumlah perjalanan yang berkunjung ke DKI Jakarta lebih kecil daripada perjalanan yang dilakukan penduduk DKI Jakarta. Angka ini menunjukkan banyak penduduk DKI Jakarta lebih banyak yang melakukan perjalanan ke luar wilayah DKI Jakarta. Sebaliknya untuk Provinsi DI Yogyakarta jumlah perjalanan yang berkunjung ke DI Yogyakarta lebih besar daripada perjalanan yang dilakukan penduduk DI Yogyakarta. Ini menunjukkan perjalanan wisnus di DI Yogyakarta banyak berasal dari penduduk provinsi lain.

Selain DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, dari sepuluh provinsi tujuan utama hampir menunjukkan yang masuk lebih besar daripada yang keluar dengan angka yang bervariasi kecuali Jawa Tengah. Artinya provinsi-provinsi tersebut secara jumlah mempunyai *travel balance* positif atau surplus. Sementara Jawa Tengah merupakan provinsi tujuan utama perjalanan wisnus yang secara jumlah mempunyai *travel balance* negatif atau defisit. Sedangkan untuk provinsi-provinsi di luar 10 provinsi tujuan utama mengalami defisit.

Gambar 3.3. Jumlah Perjalanan Wisnus di 10 Provinsi Tujuan Utama, Tahun 2017



Sumber: BPS

Perjalanan wisnus ke suatu daerah akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, sehingga perjalanan wisnus selain ikut memperkenalkan budaya daerah kepada wisatawan, juga bisa merupakan sarana pemerataan pendapatan antar daerah. Dari 270,82 juta perjalanan wisnus pada tahun 2017, jumlah pengeluaran konsumsinya mencapai Rp 253,47 triliun atau rata-rata pengeluaran per perjalanan mencapai Rp 935,54 ribu. Bagian terbesar pengeluaran ini digunakan untuk makanan dan minuman, yaitu 30,20 persen, sementara pengeluaran untuk akomodasi hanya mencapai 6,43 persen. Ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang

melakukan perjalanan domestik banyak yang tidak menggunakan jasa akomodasi komersial. Hal ini dapat dipahami karena sebagian besar perjalanan wisnus tujuan utamanya adalah mengunjungi keluarga atau saudara.

Sementara pengeluaran untuk angkutan yang meliputi angkutan kereta api, jalan raya, air, udara, dan sewa kendaraan mencapai 28,88 persen. Angkutan udara mempunyai persentase terbesar mencapai 14,21 persen, diikuti angkutan jalan raya dan sewa kendaraan yang masing-masing 6,79 persen dan 4,41 persen. Sementara yang terkecil adalah untuk angkutan kereta api yang hanya sebesar 0,96 persen.

Tabel 3.3. Struktur Pengeluaran Wisnus menurut Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi, Tahun 2017

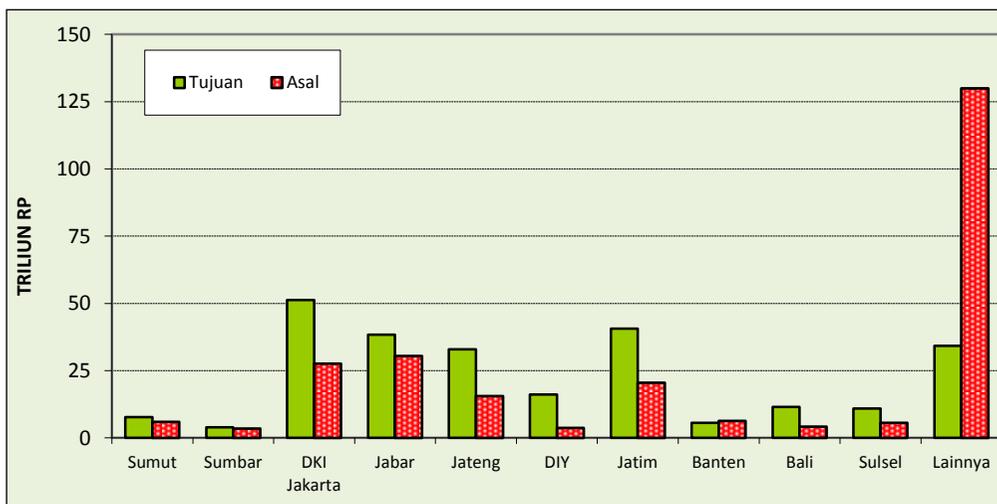
Jenis Produk (1)	Nilai (miliar rupiah) (2)	Distribusi (%) (3)
A. Produk Karakteristik Pariwisata		
1. Akomodasi dan sejenisnya	16 290,97	6,43
2. Makanan dan minuman	76 545,38	30,20
3. Angkutan KA	2 439,77	0,96
4. Angkutan jalan raya	17 207,36	6,79
5. Angkutan air	6 350,40	2,51
6. Angkutan udara	36 021,61	14,21
7. Sewa kendaraan	11 177,55	4,41
8. Agen perjalanan dan jasa reservasi	1 665,77	0,66
9. Pertunjukan seni, budaya, museum dan peninggalan sejarah	901,69	0,36
10. Jasa rekreasi/hiburan	6 331,49	2,50
11. Cinderamata	11 844,49	4,67
12. Kecantikan dan kesehatan	7 933,93	3,13
13. Pertemuan, seminar, konferensi	741,60	0,29
B. Produk konsumsi lainnya		
14. Belanja	42 274,73	16,68
15. Bahan bakar dan pelumas	11 573,38	4,57
16. Lainnya	4 174,21	1,65
Total Pengeluaran	253 474,34	100,00

Sumber: BPS

Pengeluaran yang digunakan untuk membeli cinderamata juga cukup besar, yaitu mencapai 4,67 persen. Sedangkan pengeluaran yang terkait kegiatan kepariwisataan seperti untuk paket wisata, agen perjalanan, jasa hiburan dan rekreasi, dan jasa seni dan budaya masih relatif kecil. Pengeluaran terbesar terkait kegiatan berwisata adalah untuk jasa rekreasi dan hiburan yang mencapai 2,50 persen. Kecilnya pengeluaran untuk kegiatan kepariwisataan ini salah satu sebabnya sebagian besar tujuan utama wisnus melakukan perjalanan selain berlibur adalah untuk mengunjungi keluarga atau bersilaturahmi. Selain itu banyak obyek-obyek wisata di Indonesia yang tidak berbayar atau berbayar tetapi dengan harga yang sangat murah.

Selanjutnya Gambar 3.4 memperlihatkan pengeluaran wisnus menurut provinsi asal dan tujuan di sepuluh provinsi tujuan utama. Bagi provinsi yang menerima kunjungan, maka seluruh pengeluaran wisnus di provinsi tersebut merupakan “devisa” yang diperoleh dari luar provinsi. Namun apabila wisnus hanya melakukan perjalanan dalam provinsi di mana mereka tinggal, maka pengeluarannya hanya berdampak pada sektor usaha di provinsi itu sendiri.

Gambar 3.4. Total Pengeluaran Wisnus Menurut Provinsi Tujuan Utama, Tahun 2017



Sumber: BPS, 2017

Berbeda dengan jumlah kunjungan wisnus, dari sisi jumlah pengeluaran, hampir semua provinsi tujuan utama mengalami surplus kecuali Banten, sementara provinsi lainnya defisit. Ini menunjukkan bahwa nilai ekonomi kegiatan pariwisata memang sangat menguntungkan bagi provinsi-provinsi yang menjadi tujuan perjalanan wisnus. Ini juga menjadi tantangan bagi daerah lain untuk memacu daerahnya menjadi daerah tujuan wisata provinsi asal wisnus. Provinsi dengan penerimaan terbesar dari perjalanan wisnus adalah DKI Jakarta, diikuti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Keempat provinsi tersebut masing-masing menerima kontribusi 20,24 persen, 16,01 persen, 15,17 persen, dan 12,99 persen dari total pengeluaran wisnus.

Hal ini wajar karena jumlah penduduk di pulau Jawa merupakan yang terbesar. Selain itu, struktur ini juga menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih merupakan daerah tujuan wisata bagi penduduk Indonesia. Sementara itu Bali yang merupakan daerah wisata tujuan bagi wisman, ternyata tidak demikian halnya bagi wisnus. Distribusi pendapatan dari wisnus di Provinsi Bali hanya 4,54 persen dari total pengeluaran wisnus.

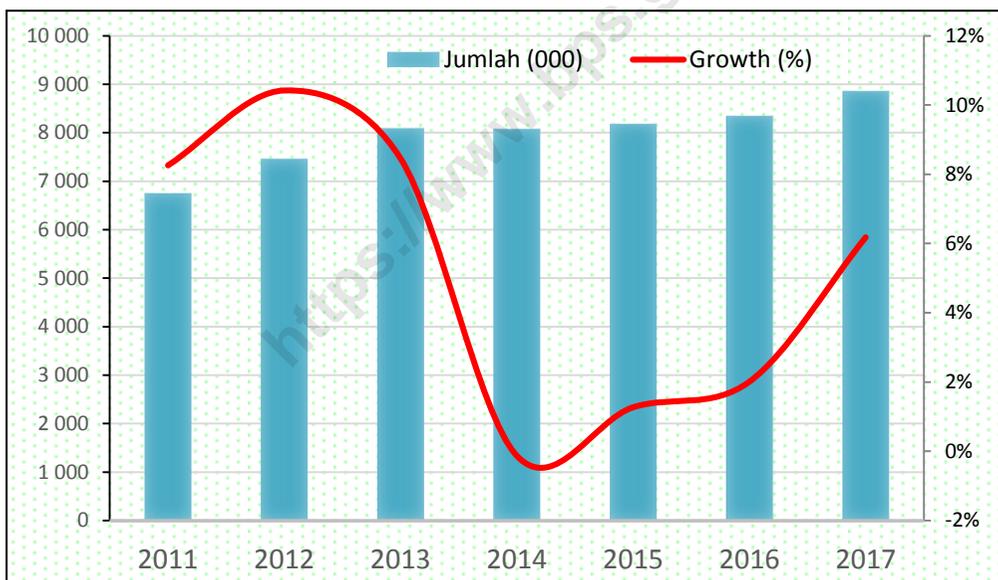
3.3 Struktur Pengeluaran Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri

Selama beberapa tahun terakhir, jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke luar negeri (wisnas) menunjukkan trend peningkatan, meskipun ada sedikit perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. Di samping adanya peningkatan kemampuan masyarakat yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita penduduk sekitar lima persen per tahun. Hal lain yang ikut mempengaruhi penduduk Indonesia melakukan perjalanan ke luar negeri antara lain faktor kenyamanan dan keamanan di negara yang dikunjungi, serta harga perjalanan yang harus dibayar. Dengan berkembang pesatnya angkutan bertarif murah dan persaingan antar maskapai penerbangan serta gencarnya promosi dari negara-negara lain, terutama

negara-negara tetangga (ASEAN), menjadi pemicu penduduk Indonesia melakukan perjalanan ke luar negeri.

Dilihat dari sisi neraca pembayaran sektor jasa yang diterbitkan Bank Indonesia, dalam hal ini komponen *travel* (pariwisata), masih mengalami *surplus* hingga akhir tahun 2017. Namun demikian seiring meningkatnya jumlah perjalanan penduduk Indonesia ke luar negeri, ada kekhawatiran *surplus* tersebut akan semakin berkurang dan dapat menjadi *balance* ataupun negatif. Pada tahun 2017, jumlah kunjungan wisnas mencapai 8,86 juta kunjungan atau naik 6,18 persen dibanding tahun 2016.

Gambar 3.5. Jumlah Perjalanan Penduduk Indonesia ke Luar Negeri, Tahun 2011-2017



Sumber: BPS

Dari hasil *survey outbound* (terakhir 2013), wisnas terbanyak berkunjung ke negara tetangga terutama Malaysia dan Singapura. Meningkatnya jumlah kunjungan ke kedua negara tersebut karena selain kedekatan geografis juga karena menariknya promosi dari kedua negara tersebut, terutama dalam hal pelayanan kesehatan. Dengan demikian semakin banyak penduduk Indonesia, khususnya dari wilayah Sumatera dan

Kalimantan yang pergi berobat ke Malaysia maupun Singapura. Demikian juga orang yang pergi ke luar negeri dengan tujuan keagamaan, terutama umroh, terus mengalami peningkatan. Sementara itu dari sisi konsumsi wisatawan Indonesia yang ke luar negeri, pengeluaran dilakukan mulai dari perencanaan dan persiapan dalam melakukan perjalanan biasanya dibuat jauh hari sebelum perjalanan tersebut dilakukan. Terlebih lagi perjalanan ke luar negeri, yang harus dibekali dengan dokumen perjalanan, seperti paspor dan visa.

Tabel 3.4. Struktur Pengeluaran Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri Menurut Kategori Pengeluaran dan Jenis Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi, Tahun 2017

Jenis Produk	Kategori Pengeluaran (miliar Rp)				Dist (%)
	Pre-Trip	Trip	Post-Trip	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Produk Karakteristik Pariwisata					
1. Akomodasi dan sejenisnya	69,2	36 068,7	32,6	36 170,6	30,42
2. Makanan dan minuman	774,1	16 382,0	364,7	17 520,9	14,73
3. Angkutan KA	32,0	68,7	15,1	115,8	0,10
4. Angkutan jalan raya	225,7	904,6	106,4	1 236,7	1,04
5. Angkutan air	83,3	1 963,3	39,3	2 085,9	1,75
6. Angkutan udara	472,6	3 728,1	222,6	4 423,3	3,72
7. Sewa kendaraan	146,6	666,1	69,1	881,9	0,74
8. Agen perjalanan dan jasa reservasi	1 340,9	2 327,3	631,8	4 299,9	3,62
9. Pertunjukan seni, budaya, museum dan peninggalan sejarah	-	1 388,7	-	1 388,7	1,17
10. Jasa rekreasi/hiburan	-	5 554,8	-	5 554,8	4,67
11. Cinderamata	-	18 109,7	-	18 109,7	15,23
12. Kecantikan dan kesehatan	-	11 036,9	-	11 036,9	9,28
13. Pertemuan, seminar, konferensi	-	1 551,5	-	1 551,5	1,30
B. Produk konsumsi lainnya					
14. Belanja	2 006,2	9 751,4	945,2	12 702,7	10,68
15. Bahan bakar dan pelumas	151,8	-	71,5	223,4	0,19
16. Lainnya	149,0	1 393,0	70,2	1 612,2	1,36
Jumlah	5 451,6	110 894,8	2 568,4	118 914,8	100,00

Sumber: BPS dan Kementerian Pariwisata

Dalam analisis Nesparnas ini sebenarnya pengeluaran wisatawan Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri tidak hanya uang yang mereka belanjakan di luar negeri saja (merupakan pengurang devisa) tetapi juga uang yang mereka belanjakan di Indonesia baik sebelum maupun sesudah mereka kembali ke Indonesia tetapi masih dalam rangkaian perjalanan mereka ke luar negeri. Secara keseluruhan biaya sebelum meninggalkan Indonesia (*pre-trip*) dan sesudah tiba di Indonesia (*post-trip*) yang dikeluarkan relatif kecil, yaitu masing-masing 4,58 persen dan 2,16 persen dari total pengeluaran mereka yang mencapai Rp 118,91 triliun.

Dilihat dari keseluruhan pengeluaran yang mereka lakukan, porsi terbesar adalah untuk akomodasi, yaitu 30,42 persen. Sementara itu untuk keperluan makan/minum di restoran dan sejenisnya, mereka mengeluarkan dana sekitar 14,73 persen dari total pengeluarannya. Sedangkan untuk keperluan kesehatan dan kecantikan mereka mengeluarkan uang dengan porsi 9,28 persen.

3.4 Struktur Pengeluaran Pemerintah dan Swasta untuk Investasi Pariwisata

Untuk mengukur besarnya investasi di sektor pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung digunakan data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang diturunkan dari data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2016. Dalam pemahaman PDB, investasi dimaksud juga sebagai PMTB. Dari data PDB tersebut terlihat bahwa total investasi swasta yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pariwisata adalah sebesar 3,66 persen dari total investasi yang berjumlah sebesar Rp 4.370,56 triliun. Investasi pariwisata ini terdiri dari investasi oleh dunia usaha atau swasta sebesar Rp 159,56 triliun atau sebesar 99,73 persen, sedangkan sisanya sebesar 0,27 persen dilakukan oleh pemerintah atau senilai Rp 0,42 triliun.

Dari tabel 3.4 dapat dilihat struktur investasi sektor pariwisata baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang dirinci menurut jenis barang modal dan pelaku investasinya. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak melakukan investasi untuk pembangunan gedung atau bangunan yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata langsung, seperti bangunan hotel dan restoran dan sebagainya. Hal ini antara lain disebabkan oleh minim dan terbatasnya anggaran pemerintah utamanya anggaran pembangunan, disamping upaya pemerintah memberikan peluang seluas-luasnya kepada dunia usaha dan swasta untuk berkiprah dan melakukan investasi di sektor pariwisata.

Di lain pihak diharapkan kalangan swasta sudah semakin sadar dan memahami pentingnya investasi di bidang pariwisata ini untuk menangkap peluang semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Kondisi ini tentunya sangat berbeda dengan keadaan pada tahun 1990-an, dimana kemampuan swasta pada waktu itu masih sangat terbatas, sehingga pemerintah mengambil peran yang lebih besar dalam pengembangan dan pembangunan fasilitas dan akomodasi untuk menampung jumlah wisatawan yang mulai meningkat jumlahnya.

Meskipun demikian, pemerintah masih melakukan investasi untuk bangunan bukan tempat tinggal dan bangunan yang berhubungan dan menunjang kegiatan kepariwisataan, seperti bangunan untuk olahraga, rekreasi, hiburan, seni dan budaya. Namun, nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan yang dikeluarkan pihak swasta. Biasanya pembangunan yang dilakukan pemerintah berupa fasilitas bangunan yang bersifat pelayanan publik dan masyarakat, sehingga nilainya pun tidak akan memenuhi profit keekonomian. Begitu juga pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan) yang terkait pariwisata kalau dilihat secara besaran nilainya memang juga masih terlalu kecil. Tetapi sesuai dengan tugas pemerintah sebagai agen pembangunan di segala bidang, maka cerminan ini lebih kepada melayani masyarakat untuk menunaikan tujuan wisatanya.

Tabel 3.5. Struktur Investasi Pariwisata Baik yang Bersifat Langsung maupun Tidak Langsung, Tahun 2017 (miliar rupiah)

Jenis Barang Modal	Swasta/RT/ BUMN/ BUMD	Pemerintah		Jumlah
		Pusat	Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bangunan Hotel & Akomodasi lainnya	24 433,2	-	-	24 433,2
2. Bangunan Restoran & sejenisnya	12 055,0	-	-	12 055,0
3. Bangunan Bukan Tempat Tinggal	25 902,4	6,5	7,1	25 916,0
4. Bangunan OR, rekreasi, hiburan, seni & budaya	11 645,8	16,6	16,7	11 679,2
5. Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Pelabuhan)	37 958,5	14,1	12,0	37 984,7
6. Bangunan Lainnya	16 528,1	-	-	16 528,1
7. Mesin dan Peralatan	10 722,0	127,7	119,7	10 969,4
8. Alat Angkutan	6 350,6	40,0	59,0	6 449,6
9. Barang modal Lainnya	13.969,1	1,7	3,6	13 974,4
Jumlah	159 564,7	206,6	218,1	159 989,4
Distribusi (%)	99,73	0,13	0,14	100,00

Sumber: BPS

Dari seluruh investasi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta, terlihat bahwa investasi terkait sektor pariwisata pada tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 investasi mencapai Rp 159,99 triliun sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp 148,96 triliun. Sementara itu investasi yang dilakukan pemerintah terbesar adalah untuk mesin dan peralatan serta alat angkutan masing-masing sebesar Rp 247,43 miliar dan Rp 98,99 miliar atau masing-masing sebesar 58,26 persen dan 23,31 persen dari total investasi pemerintah. Investasi mesin dan peralatan serta alat angkutan ini pada umumnya adalah barang modal dan alat-alat pemerintah yang dipergunakan di kantor-kantor pemerintah yang mengurus kepariwisataan seperti Kementerian Pariwisata beserta seluruh jajarannya baik di tingkat pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Dinas

Pariwisata pada pemerintah daerah tingkat I/provinsi dan pemerintah daerah tingkat II/kabupaten/kota.

Seperti tahun sebelumnya, tahun 2017 pihak swasta paling banyak melakukan investasi untuk pembangunan infrastruktur senilai Rp 37,96 triliun atau 23,79 persen terhadap total investasi swasta, diikuti dengan bangunan bukan tempat tinggal sebesar Rp 25,90 triliun, dan bangunan hotel dan akomodasi lainnya, serta bangunan lainnya masing-masing sebesar Rp 24,43 triliun dan Rp 16,53 triliun. Investasi hotel ini disamping adanya penambahan hotel baru, termasuk juga renovasi besar beberapa hotel dan akomodasi lainnya pada tahun 2017, dan pembangunan gedung-gedung untuk kegiatan budaya dan pariwisata.

Secara keseluruhan, investasi yang terbesar adalah pada infrastruktur (23,74 persen) dari total investasi, dimana peran swasta sangat besar, diikuti investasi untuk bangunan bukan tempat tinggal dan bangunan hotel dan akomodasi lainnya masing-masing 16,20 persen dan 15,27 persen.

3.5 Struktur Pengeluaran Pemerintah untuk Promosi dan Pembinaan Pariwisata

Dalam rangka upaya meningkatkan jumlah wisman maupun wisnus di Indonesia diperlukan berbagai usaha yang terencana dan terintegrasi. Salah satu cara untuk memperkenalkan citra dan potensi pariwisata Indonesia adalah dengan melakukan promosi secara intensif dan ekstensif baik di dalam maupun dari luar negeri.

Telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa sektor pariwisata sangat sensitif terhadap isu perubahan dan kejadian luar biasa. Oleh karena itu, diupayakan untuk membangun opini yang lebih baik tentang Indonesia, baik sosial maupun politik sangat penting. Upaya yang dilakukan adalah membangun informasi yang lebih proporsional mengenai situasi dan kondisi yang sebenarnya, sekaligus memperkenalkan budaya bangsa dan sumber daya

pariwisata lainnya. Dengan demikian pariwisata tetap diharapkan secara berkesinambungan menjadi penghasil devisa terbesar di masa mendatang.

Promosi pariwisata yang efektif dan efisien yang dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah dengan swasta akan berdampak positif bila dapat menarik lebih banyak minat wisman untuk mengunjungi Indonesia. Dari sisi penyediaan (*supply*), dilakukan pembinaan usaha-usaha yang bergerak di sektor pariwisata serta promosi pariwisata untuk penduduk Indonesia sendiri agar lebih mengenal budayanya.

Untuk tujuan-tujuan di atas, kemudian Pemerintah mengalokasikan sedikit anggarannya untuk sejumlah kegiatan yang mendukung pengembangan pariwisata. Pengeluaran pemerintah yang dimaksud di sini adalah pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan operasional, bukan investasi, dengan ciri-ciri produk yang dibeli habis digunakan pada saat dipakai. Dalam kajian ini, jenis-jenis pengeluaran yang dicakup adalah 1) promosi pariwisata, 2) perencanaan dan koordinasi pembangunan pariwisata, 3) penyusunan statistik dan informasi pariwisata, 4) penelitian dan pengembangan pariwisata, 5) penyelenggaraan dan pelayanan informasi pariwisata, 6) keamanan dan perlindungan pariwisata, 7) pengawasan dan pengaturan, serta 8) lainnya.

Sebagian besar sumber pembiayaan kegiatan pemerintah di atas berasal dari anggaran rutin baik dari APBN maupun APBD, termasuk di dalamnya kegiatan yang bersumber dari anggaran Kementerian Pariwisata beserta seluruh jajarannya dan Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota sepanjang berhubungan dengan sektor kepariwisataan. Jadi lingkup pengeluaran ini lebih luas dari lingkup investasi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah yang telah dibicarakan sebelumnya.

Tabel 3.5. memperlihatkan pengeluaran pemerintah yang berhubungan dengan promosi dan pembinaan pariwisata pada tahun 2017 sebesar Rp 13,62 triliun, dengan komposisi 46,61 persen atau Rp 6,35 triliun dikeluarkan oleh pemerintah pusat sedangkan sisanya sebesar Rp 7,27 triliun oleh pemerintah daerah.

Seperti tahun sebelumnya, pada tahun 2017 pengeluaran pemerintah terbesar digunakan untuk promosi pariwisata dengan porsi 34,46 persen dari total pengeluaran atau sebesar Rp 4,70 triliun, diikuti oleh pengeluaran untuk perencanaan dan koordinasi pembangunan pariwisata 21,10 persen dari total pengeluaran pemerintah. Sementara itu pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan 19,60 persen atau sebesar Rp 2,67 triliun. Pengeluaran yang cukup rendah adalah untuk pengawasan dan pengaturan, serta pengamanan dan perlindungan wisatawan dengan porsi masing-masing sebesar 2,35 persen dan 1,64 persen. Hal ini mungkin disebabkan komponen ini telah banyak dilakukan oleh pihak swasta.

Tabel 3.6. Struktur Pengeluaran Pemerintah untuk Promosi dan Pembinaan Pariwisata Tahun 2017 (miliar rupiah)

Jenis Aktivitas (1)	Pemerintah			Dist (%) (5)
	Pusat (2)	Daerah (3)	Jumlah (4)	
1. Promosi pariwisata	3 223,4	1 471,9	4 695,3	34,46
2. Rencana dan koordinasi Pembangunan Pariwisata	959,5	1 914,8	2 874,3	21,10
3. Penyusunan statistik dan Informasi Pariwisata	521,7	1 203,0	1 724,7	12,66
4. Penelitian dan Pengembangan	1 316,9	1 354,0	2 671,0	19,60
5. Penyelenggaraan dan Pelayanan Informasi Pariwisata	10,2	644,3	654,5	4,80
6. Pengamanan dan Perlindungan Wisatawan	3,9	219,3	223,1	1,64
7. Pengawasan dan Pengaturan	48,0	272,2	320,2	2,35
8. Lainnya	266,7	194,9	461,6	3,39
Jumlah	6 350,3	7 274,4	13 624,7	100,00
Distribusi (%)	46,61	53,39	100,00	

Sumber: BPS

4.1. Peranan Pariwisata dalam Perekonomian

Kegiatan pariwisata mampu menghasilkan devisa, menciptakan lapangan kerja, dan kesempatan berusaha bagi negara atau daerah yang dikunjungi. Sebagai contoh, pembangunan fasilitas kepariwisataan, seperti hotel dan restoran di sekitar obyek wisata akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar dan dapat pula menciptakan kesempatan berusaha bagi penduduk lokal seperti pembuatan cinderamata atau bingkisan.

Pariwisata bukan merupakan sektor yang berdiri sendiri, tetapi banyak terkait dengan sektor lain. Untuk mengukur peranannya dalam perekonomian tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi melalui identifikasi semua sektor yang terkait dengan kegiatan ini. Dengan menggunakan pendekatan model I-O dapat diperkirakan peran pariwisata di masing-masing sektor yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peranan pariwisata dalam Produk Domestik Bruto (PDB) menurut penggunaan (sisi *demand*) dapat diidentifikasi melalui: (1) porsi konsumsi rumah tangga untuk kegiatan wisata dalam negeri dan pengeluaran wisatawan Indonesia ke luar negeri sebelum meninggalkan dan setelah tiba di Indonesia; (2) porsi pengeluaran konsumsi pemerintah, untuk berbagai kegiatan terkait pariwisata; (3) porsi ekspor yang mencakup pengeluaran wisatawan mancanegara selama mereka berada di Indonesia; (4) porsi impor yang mencakup pengeluaran wisatawan Indonesia selama mereka berada di luar negeri; dan (5) porsi investasi untuk pengembangan dan pembangunan pariwisata. Tabel 4.1. memperlihatkan besarnya porsi pariwisata di masing-masing komponen penggunaan PDB seperti disebutkan di atas. Sedangkan untuk melihat peran pariwisata dalam investasi nasional secara rinci disajikan dalam tabel tersendiri.

Berdasarkan Tabel 4.1, terlihat bahwa peranan pariwisata dalam konsumsi rumah tangga mencapai 3,43 persen. Sementara peranan pariwisata dalam pengeluaran konsumsi pemerintah relatif kecil, yaitu hanya 1,10 persen dari total pengeluaran (*current expenditure*) konsumsi pemerintah.

Tabel 4.1. Peranan Pariwisata terhadap PDB Indonesia dari Sisi Neraca Pengeluaran Tahun 2017 (triliun rupiah)

Komponen	Konsumsi rumah tangga	Konsumsi pemerintah	Investasi	Ekspor	Impor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pariwisata	261,5	13,6	160,0	198,9	110,9
PDB Nasional	7.627,0	1.236,9	4.370,6	2.768,1	2.604,4
Share pariwisata (%)	3,43	1,10	3,66	7,19	4,26

Sumber : BPS

Selanjutnya, peranan pariwisata dalam ekspor barang dan jasa mencapai 7,19 persen, ditentukan dari besarnya konsumsi wisman pada tahun 2017. Sementara peranan pariwisata dalam impor mencapai 4,26 persen. Apabila ingin melihat "*accommodation balance*", maka komposisi besaran nilai antara ekspor dan impor untuk produk terkait pariwisata menjadi sangat menentukan. Namun analisis kali ini lebih ditekankan pada peranan pariwisata dalam masing-masing struktur konsumsi yang ada dalam PDB.

Peranan investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional dapat dilihat pada Tabel 4.2. Tabel tersebut juga menyajikan peranan investasi sektor pariwisata yang dirinci menurut jenis barang modal yaitu (1) bangunan, yang terdiri dari bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal; (2) infrastruktur, misalnya: jalan, jembatan, bandara dan dermaga; (3) bangunan lainnya; (4) mesin dan peralatan, (5) alat angkutan; dan (6) barang modal lainnya.

Meskipun secara nominal meningkat, tetapi peranan investasi pariwisata terhadap investasi nasional pada tahun 2017 mengalami penurunan dibanding 2016, yaitu dari 3,69 persen menjadi 3,66 persen. Dilihat dari jenis barang modal, maka peranan pariwisata tertinggi ada pada jenis barang modal bangunan dengan persentase 3,92 persen dari investasi nasional, sedangkan untuk porsi terendah adalah investasi pada mesin dan peralatan yaitu 2,70 persen.

Tabel 4.2. Peranan Pariwisata dalam Investasi Nasional Tahun 2017 (persen)

Struktur Investasi	Peranan pariwisata dalam investasi
(1)	(2)
1. Bangunan	3,92
2. Mesin dan peralatan	2,70
3. Alat angkutan	2,76
4. Barang modal lainnya	3,12
Jumlah	3,66

Sumber: BPS

4.2. Dampak Ekonomi Pariwisata

Kegiatan pariwisata secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak ekonomi dan sosial baik bagi masyarakat sekitar maupun nasional secara umum. Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, pengukuran kinerja pariwisata menggunakan total nilai transaksi ekonomi yang diciptakan karena adanya kegiatan pariwisata. Transaksi ekonomi pariwisata sendiri dibentuk oleh keseimbangan antara *supply* dan *demand* dari barang dan jasa dalam kaitan pariwisata. Pertemuan antara *supply* dan *demand*

pariwisata tersebut dirangkum dalam Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas).

Nilai transaksi ekonomi yang diciptakan akibat kegiatan pariwisata (*direct economic transaction*) pada tahun 2017 mencapai Rp 634,0 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 8,40 persen dibanding tahun 2016 yang sebesar Rp 584,89 triliun. Peningkatan terbesar terjadi pada pengeluaran pemerintah untuk mendukung pariwisata, baik untuk promosi maupun pengembangan pariwisata, yang mencapai 29,60 persen. Hal ini tentu tidak mengejutkan karena pariwisata sekarang telah menjadi sektor unggulan pemerintah dalam pembangunan nasional. Peningkatan yang cukup besar juga terjadi pada belanja wisman yang mencapai 12,89 persen dibanding tahun sebelumnya. Konsumsi wisnus juga mengalami kenaikan dari Rp 241,67 triliun menjadi Rp 253,47 triliun (4,88 persen), sementara transaksi ekonomi wisnas juga mengalami kenaikan sebesar 6,77 persen. Sementara investasi pariwisata mengalami kenaikan sebesar 7,41 persen.

Tabel 4.3. Nilai Pengeluaran Pariwisata Tahun 2016-2017

Jenis Pengeluaran	Nilai Pengeluaran (miliar Rp)		Pertumbuhan (%)
	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Konsumsi Wisatawan			
a. Wisman	176 228,5	198 891,6	12,86
b. Wisnus	241 674,9	253 474,3	4,88
c. Wisnas (Pre+Post)	7 511,7	8 020,0	6,77
2. Investasi Pariwisata	148 956,9	159 989,4	7,41
3. Pengeluaran Pemerintah	10 513,3	13 624,7	29,60
Jumlah	584 885,2	634 000,1	8,40

Sumber: BPS

Tabel 4.4. Ringkasan Pengeluaran Terkait Pariwisata Indonesia Tahun 2017
(miliar rupiah)

Sektor terkait Pariwisata	Pengeluaran Terkait Pariwisata						Jumlah
	Wisman	Wisnus	Outbound		Investasi	Promosi	
			Pre-Trip	Post-Trip			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Konsumsi Wisatawan							
1. Akomodasi & sejenisnya	79.827,4	16.291,0	69,2	32,6			96.220,2
2. Restoran dan sejenisnya	36.085,0	76.545,4	774,1	364,7			113.769,2
3. Angkutan KA	1.134,0	2.439,8	32,0	15,1			3.620,9
4. Angkutan jalan raya	14.578,9	17.207,4	225,7	106,4			32.118,4
5. Angkutan air	2.429,0	6.350,4	83,3	39,3			8.901,9
6. Angkutan udara	17.343,2	36.021,6	472,6	222,6			54.060,0
7. Sewa kendaraan	324,0	11.177,5	146,6	69,1			11.717,3
8. Agen perjalanan & jasa reservasi	3.319,0	1.665,8	1.340,9	631,8			6.957,4
9. Pertunjukan seni, budaya, museum & peninggalan sejarah	1.031,2	901,7	-	-			1.932,9
10. Jasa rekreasi/hiburan	9.281,0	6.331,5	-	-			15.612,5
11. Cinderamata	12.457,6	11.844,5	-	-			24.302,1
12. Kecantikan & kesehatan	4.477,0	7.933,9	-	-			12.410,9
13. Pertemuan, seminar, konferensi	1.106,3	741,6	-	-			1.847,9
14. Belanja	13.798,0	42.274,7	2.006,2	945,2			59.024,1
15. Bahan bakar & pelumas	-	11.573,4	151,8	71,5			11.796,8
16. Lainnya	1.700,1	4.174,2	149,0	70,2			6.093,5
Investasi Pariwisata							
1. Bangunan hotel dan akomodasi					24.433,2		24.433,2
2. Bangunan restoran dan sejenisnya					12.055,0		12.055,0
3. Bangunan bukan tempat tinggal					25.916,0		25.916,0
4. Bangunan OR, rekreasi, hiburan, seni & budaya					11.679,2		11.679,2
5. Infrastruktur					37.984,7		37.984,7
6. Bangunan lainnya					16.528,1		16.528,1
7. Mesin dan peralatan					10.969,4		10.969,4
8. Alat angkutan					6.449,5		6.449,5
9. Barang modal lainnya					13.974,3		13.974,3
Pengeluaran Pemerintah						13.624,7	13.624,7
Jumlah	198.891,6	253.474,3	5.451,6	110.894,8	159.989,4	13.624,7	634.000,1

Sumber: BPS

Dari total nilai transaksi sebesar Rp 634,0 triliun pada tahun 2017, nilai transaksi yang diciptakan oleh konsumsi wisnus menyumbang 39,98 persen terhadap total nilai transaksi pariwisata, kemudian disusul oleh nilai transaksi yang diciptakan wisman yang mencapai Rp 198,89 triliun atau 31,37 persen. Sementara itu, kontribusi ketiga terbesar adalah dalam rangka investasi yang mencapai Rp 159,99 triliun atau 25,23 persen.

Dari hasil pencatatan konsumsi/transaksi tersebut ternyata kontribusi wisnus pada ekonomi pariwisata lebih besar dibanding wisman dan ini telah berlangsung sejak tahun 1998. Meskipun rata-rata pengeluaran wisnus per perjalanan lebih kecil daripada pengeluaran wisman, namun dari sisi jumlah kunjungan, jumlah perjalanan wisnus jauh lebih besar dari pada jumlah kunjungan wisman. Namun demikian dalam beberapa tahun terakhir kontribusi konsumsi wisnus cenderung menurun, sementara wisman cenderung meningkat. Banyak faktor yang mempengaruhi fenomena ini, antara lain melemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat, pertumbuhan perjalanan wisnus yang relatif kecil, sementara kunjungan wisman terus tumbuh pesat, serta harga minyak dunia yang rendah sehingga dapat menekan biaya transportasi.

Ukuran kemajuan pariwisata Indonesia yang selama ini hanya menggunakan jumlah wisman yang datang ke Indonesia belum menggambarkan keutuhan kegiatan pariwisata. Dengan kata lain kebijakan pengembangan pariwisata yang lebih terfokus kepada fluktuasi jumlah wisman sebenarnya kurang tepat sebab secara ekonomi peranan wisnus jauh lebih besar. Indikator perkembangan jumlah wisman tetap penting bagi Indonesia secara politis karena menyangkut aspek pencitraan serta keamanan dan kenyamanan bagi warga asing untuk berkunjung ke Indonesia.

Selanjutnya untuk mengukur peranan ekonomi pariwisata atau dampak kegiatan pariwisata terhadap keseluruhan ekonomi nasional tahun 2017 dihitung dengan menggunakan multiplier input-output berdasarkan Tabel Input-Output Indonesia tahun 2010. Aspek ekonomi yang diukur adalah

peranan pariwisata dalam output nasional, produk domestik bruto (PDB) nasional, kompensasi tenaga kerja, dan pajak atas produksi neto baik keseluruhan maupun sektoral. Karena transaksi ekonomi pariwisata dilakukan oleh pihak-pihak yang mengkonsumsi pariwisata secara independen (wisnis, wisnas, wisman, investor dan promosi) maka proses penghitungan dimungkinkan dilakukan secara parsial untuk masing-masing pihak tersebut.

Seperti diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, pengeluaran wisatawan (mancanegara, nusantara, dan nasional), investasi di bidang kepariwisataan, dan pengeluaran pemerintah untuk promosi pariwisata adalah bagian dari permintaan akhir. Timbulnya pengeluaran-pengeluaran di sektor kepariwisataan tersebut akan berdampak positif pada penciptaan sejumlah variabel makro ekonomi, disamping dampak negatif seperti meningkatnya impor dan dampak non-ekonomi. Dengan menggunakan Tabel Input-Output, permintaan akhir tersebut diklasifikasikan kembali mengikuti klasifikasi sektor dalam Tabel I-O dan dampaknya diperoleh dengan mengalikannya dengan koefisien pengganda Leontief.

Tabel 4.4 menyajikan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata terhadap sejumlah variabel ekonomi makro, yaitu output, produk domestik bruto (PDB), kompensasi tenaga kerja, dan pajak atas produksi neto pada tahun 2017. Apabila dibandingkan kondisi tahun 2016, meskipun secara nominal nilainya meningkat, namun peran pariwisata pada seluruh sektor di tahun 2017 ini mengalami sedikit penurunan. Penurunan peran pariwisata terhadap nilai ekonomi nasional dapat diartikan bahwa meskipun pariwisata mengalami kenaikan tetapi kenaikannya masih dibawah rata-rata kenaikan seluruh sektor. Berdasarkan harga berlaku, pertumbuhan NTB dan PDB seluruh sektor mencapai 9,21 persen dan 9,53 persen, sementara nilai transaksi pariwisata hanya tumbuh 8,40 persen. Adapun sektor-sektor yang tumbuh di atas rata-rata nasional antara lain ketenagalistrikan (17,89 persen), pertambangan dan penggalian (15,48 persen), informasi dan komunikasi (14,85 persen), dan transportasi dan pergudangan (13,99 persen).

Tabel 4.5. Dampak ekonomi Pariwisata, Tahun 2017

Uraian	Output (triliun Rp)	NTB (triliun Rp)	Kompensasi TK (triliun Rp)	Pajak atas Produksi Neto (triliun Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Ekonomi Nasional	26 160,94	13 064,51	4 423,27	110,20
B. Nilai Ekonomi Pariwisata	1 122,65	536,78	171,66	4,18
1. Wisman	339,88	175,09	51,72	1,33
2. Wisnus	444,72	214,25	66,83	1,68
3. Wisnas	14,14	6,75	2,10	0,05
4. Investasi	302,21	128,22	42,25	1,09
5. Promosi & Pembinaan oleh Pemerintah	21,70	12,47	8,75	0,03
C. Peranan Pariwisata (persen)	4,29	4,11	3,88	3,79
1. Wisman	1,30	1,34	1,17	1,21
2. Wisnus	1,70	1,64	1,51	1,52
3. Wisnas	0,05	0,05	0,05	0,05
4. Investasi	1,16	0,98	0,96	0,99
5. Promosi & Pembinaan oleh Pemerintah	0,08	0,10	0,20	0,03

Sumber: BPS

4.2.1. Dampak Terhadap Output

Output sektor produksi terbentuk karena permintaan domestik dan luar negeri. Untuk menghasilkan output komoditi sektor-sektor ekonomi tersebut diperlukan input antara (*intermediate input*) berupa bahan-bahan dan jasa untuk proses produksi termasuk jasa faktor produksi. Dorongan permintaan terhadap produk barang dan jasa akan menciptakan perubahan nilai produksi. Permintaan atau pengeluaran wisatawan mancanegara (wisman), wisatawan nusantara (wisnus), pre dan post trip wisatawan Indonesia ke luar negeri, investasi pemerintah dan swasta di sektor pariwisata, belanja pemerintah untuk pariwisata dan biaya promosi kepariwisataan akan

berdampak pada penciptaan output di seluruh sektor ekonomi. Dampak yang ditimbulkan secara ekonomi adalah dampak langsung berupa konsumsi barang dan jasa, serta dampak tak langsung berupa interaksi antar sektor yang terjadi akibat perubahan output barang dan jasa yang dikonsumsi.

Seperti telah dibahas pada bagian sebelumnya, peranan wisnus lebih besar dan lebih menentukan perkembangan pariwisata dibanding wisman. Selain itu kedatangan wisman lebih sensitif terhadap kondisi keamanan dan kenyamanan di negara yang dikunjungi. Dengan kondisi keamanan yang kurang menjamin (menurut pandangan mereka), maka dengan cepat jumlah wisman akan menurun.

Disamping menyajikan dampak secara total, Tabel 4.5 juga menunjukkan dampak langsung dan tidak langsung atas setiap jenis pengeluaran wisatawan, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Berdasarkan Tabel Input Output tahun 2010, dengan struktur pengeluaran institusi kepariwisataan sebagaimana sub-bab terdahulu, diperoleh nilai output akibat adanya kegiatan pariwisata secara keseluruhan sebesar Rp 1.122,65 triliun yang tersebar di seluruh sektor ekonomi. Kontribusi nilai output akibat kegiatan pariwisata tersebut terhadap output/produksi nasional mencapai 4,29 persen. Dilihat menurut komponennya, dampak yang diciptakan akibat pengeluaran wisnus memberikan andil paling besar yaitu Rp 444,72 triliun atau 1,70 persen terhadap output nasional, diikuti konsumsi wisman Rp 339,88 triliun atau 1,30 persen terhadap output nasional.

Sementara investasi pariwisata memberikan dampak sebesar Rp 302,21 triliun atau 1,16 persen terhadap output nasional. Komponen lainnya adalah pre dan post trip bagi wisatawan Indonesia ke luar negeri, meskipun dampak outputnya hanya sebesar Rp 14,14 triliun atau 0,05 persen dari output nasional, tetapi perlu mendapat perhatian karena nilainya yang cenderung meningkat setiap tahun. Biaya promosi dan pembinaan pariwisata berdampak pada penciptaan output yang hampir sama, yaitu sebesar Rp 21,70 triliun atau memiliki porsi 0,08 persen dari output nasional.

Ada dua faktor yang mempengaruhi perubahan peranan masing-masing pelaku pariwisata pada penciptaan output nasional: (1) perubahan dari besaran pengeluaran belanja itu sendiri, semakin besar pengeluaran semakin besar pula output yang dapat diciptakan, (2) pola pengeluarannya, artinya bila porsi pengeluaran lebih besar pada produk yang memiliki daya penyebaran besar, akan besar pula output yang tercipta di berbagai sektor.

4.2.2. Dampak Terhadap Nilai Tambah Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara dalam periode tertentu adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atau Nilai Tambah Bruto (NTB), baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku. NTB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Secara konsep, NTB merupakan bagian dari output, yaitu merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi atau jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi. Besarnya NTB yang dihasilkan biasanya sejalan dengan nilai output yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi. Demikian pula dengan permintaan produk pariwisata akan memberi perubahan pula pada besarnya NTB seluruh unit usaha.

Dampak kegiatan pariwisata terhadap NTB pada tahun 2017 mencapai Rp. 537,69 triliun atau memberikan kontribusi sebesar 4,11 persen dari total PDB nasional. Seperti halnya pada dampak terhadap output, dampak pariwisata pada NTB paling besar diciptakan oleh belanja wisnus dengan peran 1,64 persen dari NTB nasional. Hal ini memang sejalan dengan teori dimana NTB merupakan bagian dari output nasional. Sementara itu, dampak konsumsi wisman terhadap NTB sebesar 1,34 persen, investasi pemerintah dan swasta 0,98 persen, biaya promosi dan pembinaan 0,10 persen, serta pre dan post-trip dari wisatawan Indonesia ke luar negeri 0,05 persen. Potensi besar dari pengeluaran wisatawan terhadap perekonomian nasional menjadi

pendorong usaha-usaha non pariwisata untuk ikut mendukung kegiatan di bidang kepariwisataan.

Apabila dilihat menurut industri sebagaimana terlihat pada Tabel 4.6 diketahui bahwa industri manufaktur menerima dampak terbesar mencapai Rp. 118,57 triliun atau 22,52 persen dari dampak total, meskipun kontribusinya hanya 4,33 persen. Sektor lain yang cukup besar menerima dampak kegiatan pariwisata adalah pertanian, penyediaan akomodasi dan penyedia makan minum, masing-masing sebesar Rp 69,47 triliun, Rp. 59,09 triliun, dan Rp. 51,41 triliun.

Apabila dilihat menurut kontribusinya terhadap NTB nasional, pariwisata memberikan kontribusi terbesar pada usaha jasa penyediaan akomodasi, dimana kontribusi pariwisata terhadap NTB sektor penyediaan akomodasi mencapai 64,35 persen. Ini artinya usaha jasa penyediaan akomodasi sangat tergantung pada adanya kegiatan pariwisata. Tanpa adanya kegiatan pariwisata, usaha jasa penyediaan akomodasi tidak akan berkembang atau tutup. Hal ini dapat dipahami karena usaha jasa penyediaan akomodasi merupakan industri yang berkarakter pariwisata (*tourism characteristic industry*). Pariwisata juga mempunyai share yang cukup besar pada usaha penyediaan makan minum (17,39 persen) dan angkutan kereta api (15,04 persen). Selain itu pengeluaran untuk jenis angkutan lainnya juga cukup besar seperti untuk angkutan darat sebesar 8,39 persen, angkutan udara 8,51 persen dan jasa penunjang angkutan 7,58 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa angkutan menjadi salah satu sektor yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan pariwisata. Dengan kata lain tanpa adanya kegiatan pariwisata, sektor angkutan akan mengalami penurunan pendapatan yang cukup besar.

4.2.3. Dampak Terhadap Kompensasi Tenaga Kerja

Sebagaimana diuraikan pada bahasan sebelumnya, adanya aktivitas pariwisata dipercaya akan menciptakan lapangan pekerjaan, yang selanjutnya akan menciptakan kompensasi tenaga kerja berupa balas jasa pekerja.

Tabel 4.6. Dampak Pariwisata terhadap NTB Menurut Sektor, Tahun 2017

Industri	PDB akibat Pariwisata (miliar Rp)	NTB Nasional (miliar Rp)	Share (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Pertanian	69 469,2	1 785 880,7	3,89
02. Pertambangan dan Penggalian	26 183,2	1 028 772,2	2,55
03. Industri Manufaktur	118 574,4	2 739 415,0	4,33
04. Listrik, Gas, Air, dan Daur ulang	4 028,9	172 060,2	2,34
05. Bangunan	47 415,8	1 409 833,8	3,36
06. Perdagangan	40 842,0	1 767 718,3	2,31
07. Penyediaan akomodasi	59 085,9	91 822,7	64,35
08. Penyediaan makan minum	51 411,4	295 644,4	17,39
09. Angkutan Kereta Api	1 379,9	9 172,0	15,04
10. Angkutan Darat	27 531,2	328 306,7	8,39
11. Angkutan Air	3 545,3	57 063,3	6,21
12. Angkutan Udara	18 795,8	220 966,6	8,51
13. Jasa Penunjang angkt.	9 069,7	119 721,0	7,58
14. Komunikasi	14 218,9	515 888,9	2,76
15. Jasa Lainnya	45 224,9	2 522 240,7	1,79
Jumlah	536 776,5	13 064 506,5	4,11

Sumber: BPS

Secara konsep, kompensasi tenaga kerja adalah balas jasa yang diterima oleh pekerja yang didasarkan pada latar belakang (*background*) pendidikan, kemampuan (*skill*), kompetensi pekerjaan maupun sektor usahanya. Dalam memproduksi barang dan jasa, faktor tenaga kerja merupakan bagian penting dari proses produksi disamping barang modal dan teknologi. Tingkat upah dapat pula mencerminkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi perekonomian nasional melalui konsumsi. Kompensasi tenaga kerja dalam model ini merupakan bagian dari nilai tambah berupa balas jasa faktor tenaga kerja.

Permintaan terhadap produk barang dan jasa dalam kegiatan pariwisata berdampak pula terhadap permintaan upah dan gaji di setiap sektor ekonomi. Sesuai dengan asumsi linearitas pada model Input Output, perubahan upah dan gaji akan sejalan dengan perubahan nilai output yang dihasilkan.

Pada Tabel 4.5 diperlihatkan peranan upah dan gaji dari kegiatan pariwisata terhadap nilai kompensasi tenaga kerja secara nasional pada tahun 2017, yang besarnya mencapai Rp 171,66 triliun atau 3,88 persen terhadap upah nasional. Sebagaimana dampak terhadap NTB, pengeluaran wisnus juga memberi dampak paling besar terhadap upah dan gaji yaitu 1,51 persen dari upah nasional, disusul konsumsi wisman yang berperan 1,17 persen. Investasi sektor pariwisata berdampak terhadap upah dan gaji pekerja di seluruh sektor ekonomi sebesar 0,96 persen dari upah nasional, sedangkan dampak yang diberikan promosi pariwisata serta pre dan post-trip dari wisatawan Indonesia ke luar negeri masing-masing hanya berperan 0,20 persen dan 0,05 persen.

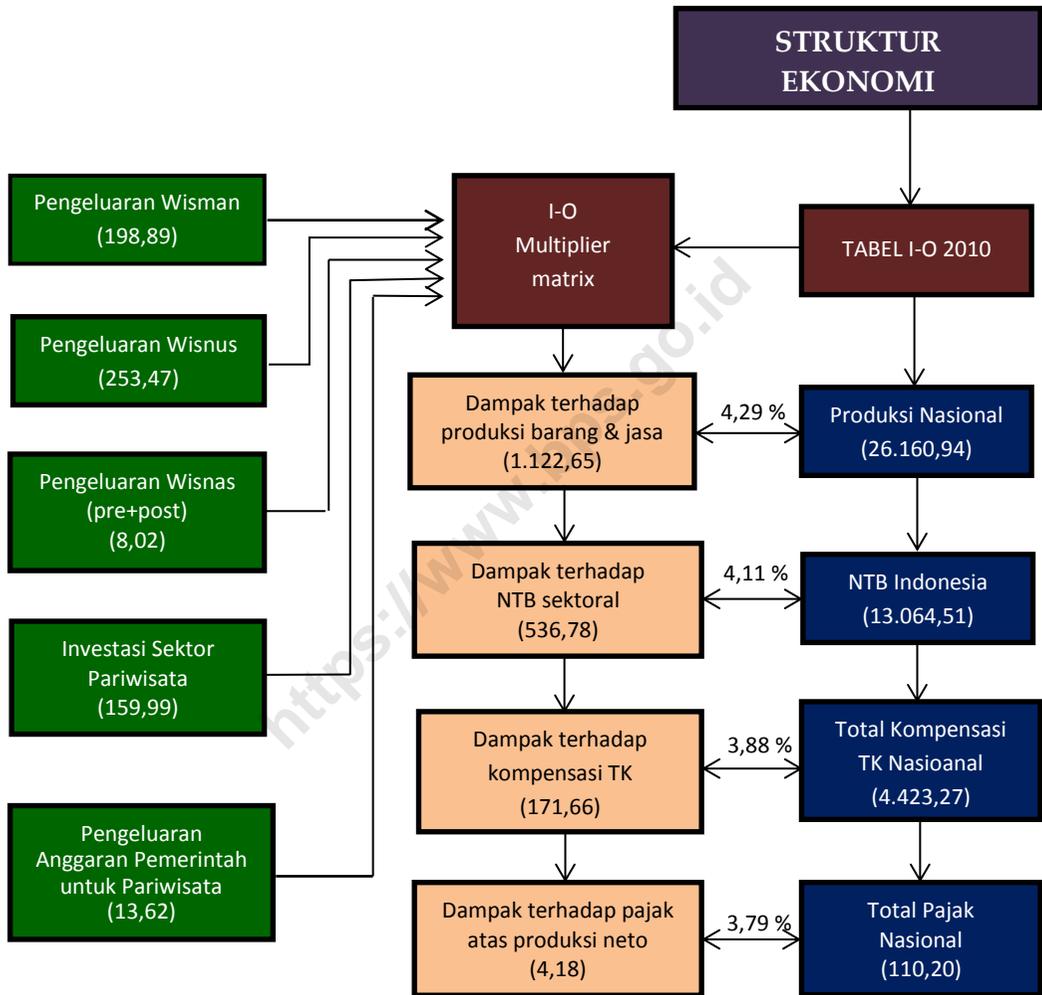
4.2.4. Dampak Terhadap Pajak atas Produksi Neto

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Dalam struktur Tabel I-O 2010 ada dua jenis pajak, yaitu pajak atas produksi neto sebagai bagian dari nilai tambah bruto (NTB) dan pajak atas produk neto. Pajak lainnya atas produksi adalah pajak yang dikenakan dalam rangka proses produksi. Pajak lainnya atas produksi mencakup pajak yang dibayar atas lahan, aset, tenaga kerja, dan lainnya dalam aktivitas produksi, bukan merupakan pajak yang dibayar per unit output dan tak dapat dikurangkan dari harga produsen. Pajak ini dicatat sebagai pajak yang dikeluarkan dari nilai tambah produsen atau sektor bersangkutan secara individu.

Tabel 4.5 menyajikan bahwa dampak kegiatan pariwisata terhadap pajak atas produksi neto. Tercatat bahwa pajak atas produksi neto yang dihasilkan dari kegiatan pariwisata mencapai Rp 4,18 triliun atau memberi sumbangan pada pajak atas produksi neto nasional sebesar 3,79 persen. Sumbangan terbesar diberikan oleh pengeluaran wisnus yang mencapai 1,52 persen, konsumsi wisman 1,21 persen, investasi pariwisata 0,99 persen, pengeluaran pre dan post trip dari wisatawan Indonesia ke luar negeri dan pengeluaran promosi pariwisata masing-masing 0,05 persen dan 0,03 persen.

Untuk lebih jelasnya dampak ekonomi dari kegiatan pariwisata pada tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1. Dampak Ekonomi Pariwisata, Tahun 2017



- Angka dalam triliun rupiah

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, selain harus diimbangi dengan jumlah sarana dan prasarana, juga harus diimbangi dengan kualitas pelayanan. Selain dipengaruhi jumlah fasilitas (*sisi supply*), kualitas pelayanan juga dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja profesional pada usaha yang melayani secara langsung permintaan wisatawan, seperti perhotelan, usaha objek daya tarik wisata, dan restoran. Tenaga kerja yang profesional dapat dilihat dari berbagai aspek seperti tingkat pendidikan, keahlian, dan lain-lain. Adanya tenaga kerja yang profesional dan terlatih akan memberikan kesan yang positif bagi wisatawan, sehingga dapat mendorong mereka untuk berkunjung lagi ke tempat tersebut.

5.1 Usaha Pariwisata

Pariwisata memiliki dimensi yang sangat luas. Usaha pariwisata tidak terbatas pada usaha yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pariwisata atau Dinas Pariwisata. Usaha pariwisata mencakup berbagai usaha yang bersinggungan langsung dengan wisatawan yang pembinaannya di bawah kewenangan berbagai kementerian/lembaga.

Untuk mendapatkan gambaran keseluruhan jenis usaha pariwisata, maka pada tahun 2010 Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pariwisata telah menyusun Klasifikasi Lapangan Usaha Bidang Pariwisata Indonesia. Klasifikasi tersebut merupakan sinkronisasi antara usaha pariwisata sesuai Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Kepariwisatahan beserta turunannya serta manual dari lembaga-lembaga internasional seperti UNWTO, EUROSTAT dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Selain bermanfaat untuk pembinaan, klasifikasi tersebut juga sangat bermanfaat dalam penyusunan data statistik terkait usaha pariwisata, antara lain

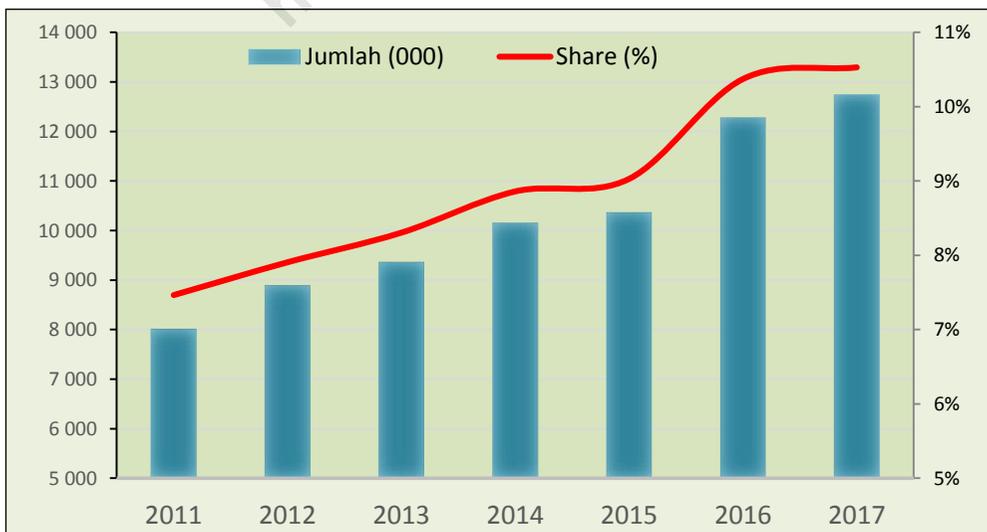
mengetahui jumlah tenaga kerja yang bekerja pada industri-industri yang dikategorikan industri pariwisata.

Namun, mengingat luasnya cakupan usaha pariwisata, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, pembahasan tenaga kerja pada bagian ini hanya akan difokuskan pada tenaga kerja yang bekerja pada industri atau usaha yang terkait langsung dengan kegiatan pariwisata sebagai mana dijabarkan pada Lampiran.

5.2 Tenaga Kerja Usaha Pariwisata

Berdasar data Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas), tenaga yang terserap pada usaha-usaha pariwisata terus meningkat. Bukan hanya dari jumlah tenaga kerja, share terhadap penyerapan tenaga kerja nasional juga terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa pariwisata dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi tingkat pengangguran. Pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja pada industri pariwisata mencapai 12,74 juta orang atau 10,53 persen terhadap total tenaga kerja nasional yang berjumlah 121,02 juta orang.

Gambar 5.1. Jumlah Tenaga Kerja pada Usaha Pariwisata, Tahun 2011-2017



Sumber: BPS

Dari 12,74 juta orang yang berkerja pada usaha pariwisata, porsi terbesar (30,57 persen) merupakan mereka yang berstatus berusaha sendiri, sementara yang berstatus berusaha dibantu buruh, baik dibayar maupun tidak dibayar, dan sebagai karyawan/buruh masing-masing sebesar 27,66 persen dan 24,23 persen. Untuk yang berstatus sebagai pekerja tidak dibayar mencapai 16,17 persen. Sedangkan untuk yang berstatus sebagai pekerja bebas hanya sebesar 1,36 persen.

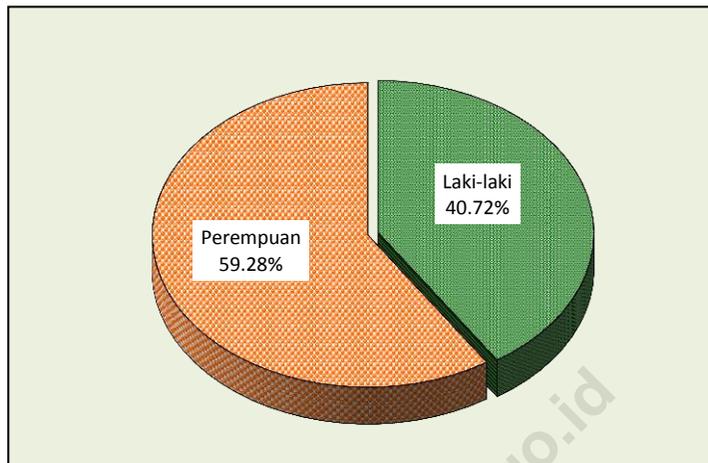
Tabel 5.1. Jumlah Tenaga Kerja pada Usaha Pariwisata Menurut Status Pekerjaan Utama, Tahun 2017

Status Pekerjaan	Jumlah (000 org)	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)
01. Berusaha sendiri	3 894,8	30,57
02. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	3 057,9	24,00
03. Berusaha dibantu buruh tetap/brh dibayar	466,3	3,66
04. Buruh/karyawan	3 086,7	24,23
05. Pekerja bebas	173,6	1,36
06. Pekerja tak dibayar	2 060,2	16,17
Jumlah	12 739,4	100,00

Sumber: BPS, 2017

Dilihat menurut jenis kelamin, pekerja pada usaha pariwisata didominasi oleh tenaga kerja perempuan (59,28 persen), sementara tenaga kerja laki-laki hanya sebesar 40,56 persen. Ini menunjukkan bahwa industri pariwisata menjadi lapangan usaha yang sangat potensial bagi perempuan di Indonesia untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hasil ini menunjukkan bahwa, sebagaimana umumnya usaha-usaha pada sektor jasa yang lain, usaha-usaha yang berhubungan dengan kegiatan kepariwisataan ramah terhadap tenaga kerja perempuan.

Gambar 5.2. Distribusi Tenaga Kerja pada Usaha Pariwisata Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017

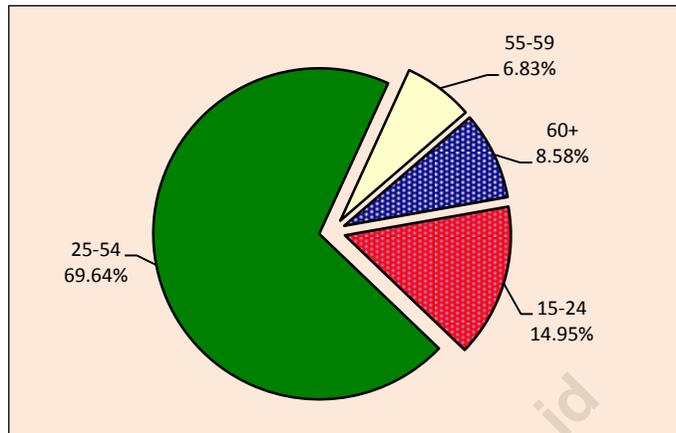


Sumber: BPS, 2017

Sedangkan dilihat menurut kelompok umur, tenaga kerja pada usaha pariwisata didominasi mereka yang berusia antara 25 tahun sampai dengan 54 tahun yang mencapai 69,38 persen dari total pekerja. Hasil ini tidak mengejutkan karena pada usia-usia tersebut merupakan masa paling produktif bagi tenaga kerja secara umum. Urutan terbesar kedua adalah tenaga kerja yang berumur antara 15 tahun sampai dengan 24 tahun yang sebesar 15,42 persen. Ini menunjukkan banyak tenaga kerja muda yang belajar atau memulai bekerja pada sektor pariwisata.

Hasil yang cukup menarik adalah terkait tenaga kerja yang berusia di atas 60 tahun. Jumlah tenaga kerja pada kelompok usia tersebut cukup besar (8,58 persen) dan lebih besar dari pada jumlah pekerja yang berusia antara 55 tahun sampai dengan 59 tahun (6,83 persen). Angka ini menunjukkan bahwa banyak orang lanjut usia yang bekerja pada usaha pariwisata di usia yang sudah tidak produktif lagi. Ini juga menunjukkan pariwisata menjadi lapangan usaha yang cukup menjanjikan bagi para lansia di Indonesia.

Gambar 5.3. Distribusi Tenaga Kerja pada Usaha Pariwisata Menurut Kelompok Umur, Tahun 2017

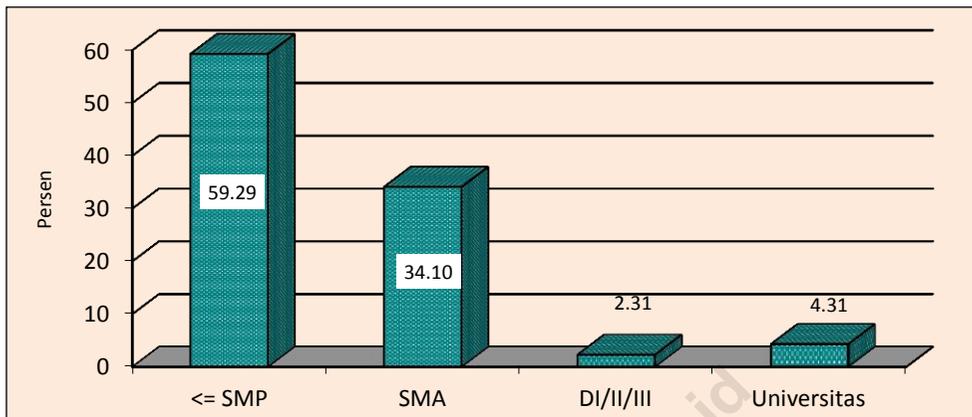


Sumber: BPS, 2017

Apabila dilihat menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, tenaga kerja pada usaha pariwisata didominasi oleh mereka yang menamatkan pendidikan sampai SMP (57,22 persen). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang tidak memerlukan pendidikan pada level tinggi. Dengan kata lain, secara umum bekerja pada industri pariwisata tidak memerlukan keahlian yang tinggi. Meskipun demikian ada jenis usaha pariwisata yang memerlukan keahlian khusus, seperti pada usaha perhotelan, biro perjalanan wisata, atau pramuwisata. Hasil ini juga menunjukkan bahwa pariwisata dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif bagi pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Sementara tenaga kerja pada usaha pariwisata yang menamatkan sampai jenjang SMA sebesar 34,10 persen. Jumlah tenaga kerja dengan jenjang pendidikan tinggi baik diploma maupun sarjana relatif rendah, yaitu masing-masing sebesar 2,31 persen dan 4,31 persen. Usaha pariwisata yang memerlukan level pendidikan cukup tinggi biasanya pada usaha penyediaan akomodasi, terutama untuk hotel-hotel berbintang.

Gambar 5.4. Distribusi Tenaga Kerja pada Usaha Pariwisata Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, Tahun 2017



Sumber: BPS, 2017

Menurut lapangan usaha, tenaga kerja yang terserap pada usaha-usaha pariwisata dapat dilihat pada Tabel 5.2. Dari Tabel 5.2 tersebut dapat dilihat bahwa usaha pariwisata yang menyerap tenaga kerja paling besar adalah usaha penyedia makan minum dan perdagangan yang masing-masing mempunyai share mencapai 48,79 persen dan 36,76 persen. Hal ini dapat dipahami, selain karena jumlah usahanya yang relatif banyak dan tersebar, kedua usaha ini juga sangat berkaitan dengan aktivitas para wisatawan dalam perjalanan yang mereka lakukan, baik sebelum, selama perjalanan, maupun setelah melakukan perjalanan.

Lapangan usaha lain yang cukup besar kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja adalah usaha penyediaan akomodasi dan kegiatan olah raga dan rekreasi lainnya yang masing-masing menyumbang 7,20 persen dan 1,94 persen. Sementara kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas menyumbang 1,54 persen. Usaha angkutan dan jasa agen perjalanan wisata mempunyai kontribusi masing-masing sebesar 0,56 persen dan 0,64 persen.

Tabel 5.2. Jumlah Tenaga Kerja pada Usaha Pariwisata Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2017

Lapangan Usaha	Jumlah (000 org)	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)
01. Perdagangan	4 682,5	36,76
02. Angkutan	71,0	0,56
03. Penyediaan Akomodasi	917,1	7,20
04. Penyediaan Makan minum	6 215,0	48,79
05. Jasa Agen Perjalanan	81,5	0,64
06. Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas	196,3	1,54
07. Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	43,6	0,34
08. Kegiatan Olahraga dan Rekreasi Lainnya	247,5	1,94
09. Lainnya	284,9	2,24
Jumlah	12 739,4	100,00

Sumber: BPS, 2016

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, Kerangka Teori dan Analisis Tabel Input Output, Jakarta, November 2008
- _____, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, Jakarta, Desember 2009
- _____, Statistik Kunjungan Tamu Asing 2017, Jakarta, Agustus 2018
- _____, Statistik Angkatan Kerja Nasional 2017, Jakarta, Agustus 2017
- _____, Tabel Input Output Indonesia 2010, Jakarta, Desember 2015
- Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya, Klasifikasi Lapangan Usaha Pariwisata Indonesia (KLUPI) 1999, Jakarta, Desember 1999
- International Monetary Fund, Balance of Payments and International Investment Position Sixth Ed. (BPM6), Draft, September 2007
- United Nations and World Tourism Organization, International Recommendations for Tourism Statistics, 2008, Madrid, New York, 2008
- , UNWTO Tourism Highlights 2018 Edition, Madrid, New York, 2018
- United Nations, World Tourism Organization and OECD, 2008 Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework (TSA: RMF 2008), Madrid, New York, 2008
- United Nations, European Commission, IMF, and WTO, Manual on Statistics of International Trade in Services, New York, 2002
- United Nations, Central Product Classification Ver.2, New York, 2006
- _____, International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Rev.4, New York, March 2006
- _____, System of National Accounts 1993. Prepared by ISWGNA (Eurostat, IMF, OECD, UN, World Bank), Washington DC, 1993.

World Travel and Tourism Council, Update Principles for Travel and Tourism National Satellite Account, September 1998.

<https://www.bps.go.id>

LAMPIRAN 1. Tabel-Tabel Pokok Nesparnas

Tabel 1. Struktur Pengeluaran Wisman Menurut 10 Negara Asal Terbesar dan Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi Tahun 2017 (miliar rupiah)

Jenis Produk	Negara Asal					
	Malaysia	Tiongkok	Singapura	Timor Leste	Australia	Jepang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Produk Karakteristik Pariwisata						
1. Akomodasi dan sejenisnya	5.641,0	14.645,9	4.419,5	12.378,3	1.349,1	4.229,9
2. Restoran dan sejenisnya	2.832,1	6.035,6	2.425,8	5.936,2	730,0	1.560,3
3. Angkutan KA	125,0	226,1	77,1	133,1	20,8	65,8
4. Angkutan jalan raya	1.632,3	2.858,4	975,1	1.683,2	449,2	831,7
5. Angkutan air	244,6	518,7	251,3	149,6	39,9	257,0
6. Angkutan udara	1.691,7	2.259,1	525,5	2.197,6	295,8	1.817,8
7. Sewa kendaraan	36,3	63,5	21,7	37,4	10,0	18,5
8. Agen perjalanan dan jasa reservasi	201,7	746,4	109,3	409,6	56,4	159,7
9. Pertunjukan seni, budaya, museum dan peninggalan sejarah	73,7	157,6	88,7	156,9	22,8	42,2
10. Jasa rekreasi/hiburan	663,0	1.418,6	798,2	1.412,1	205,0	379,7
11. Cinderamata	1.791,0	2.720,7	886,7	1.320,7	331,4	631,3
12. Kecantikan dan kesehatan	209,3	828,5	414,0	971,3	81,1	205,8
13. Pertemuan, seminar, konferensi	67,2	248,8	36,4	136,5	18,8	53,2
Produk Konsumsi Lainnya						
14. Belanja	1.433,3	2.727,2	1.362,5	2.179,3	406,2	546,9
15. Bahan bakar dan pelumas	-	-	-	-	-	-
16. Lainnya	282,5	204,5	346,6	91,3	53,2	81,4
Total pengeluaran	16.924,7	35.659,5	12.738,6	29.193,1	4.069,7	10.881,2
Jumlah kunjungan (000)	2.121,9	2.093,2	1.554,1	1.256,9	960,0	573,3

Tabel 1. Struktur Pengeluaran Wisman Menurut 10 Negara Asal terbesar dan Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi Tahun 2017 (miliar rupiah)

Lanjutan

Jenis Produk	Negara Asal					Jumlah
	India	Korea Selatan	Inggris	Amerika Serikat	Lainnya	
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Produk Karakteristik Pariwisata						
1. Akomodasi dan sejenisnya	3.351,2	2.580,1	3.989,9	3.509,1	23.733,5	79.827,4
2. Restoran dan sejenisnya	1.406,7	1.206,0	1.861,6	1.604,4	10.486,1	36.085,0
3. Angkutan KA	48,1	42,3	47,8	45,7	302,3	1.134,0
4. Angkutan jalan raya	608,5	534,8	603,9	577,3	3.824,6	14.578,9
5. Angkutan air	154,4	65,9	205,0	105,0	437,4	2.429,0
6. Angkutan udara	343,6	955,9	422,6	313,9	6.519,5	17.343,2
7. Sewa kendaraan	13,5	11,9	13,4	12,8	85,0	324,0
8. Agen perjalanan dan jasa reservasi	142,4	107,3	213,5	93,8	1.079,0	3.319,0
9. Pertunjukan seni, budaya, museum dan peninggalan sejarah	48,4	33,5	48,6	46,2	312,7	1.031,2
10. Jasa rekreasi/hiburan	436,0	301,1	437,5	415,9	2.814,0	9.281,0
11. Cinderamata	558,1	488,4	348,6	430,1	2.950,6	12.457,6
12. Kecantikan dan kesehatan	207,4	148,0	166,9	137,4	1.107,2	4.477,0
13. Pertemuan, seminar, konferensi	47,5	35,8	71,2	31,3	359,7	1.106,3
Produk Konsumsi Lainnya						
14. Belanja	625,9	463,1	410,3	421,1	3.222,1	13.798,0
15. Bahan bakar dan pelumas	-	-	-	-	-	-
16. Lainnya	58,8	41,7	99,2	45,4	395,6	1.700,1
Total pengeluaran	8.050,5	7.015,8	8.940,0	7.789,4	57.629,2	198.891,6
Jumlah kunjungan (000)	536,9	423,2	378,1	344,8	3.797,4	14.039,8

Tabel 2.a. Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Asal dan Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi Tahun 2017 (miliar rupiah)

Jenis Produk	Provinsi Asal					
	Sumatera Utara	Sumatera Barat	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Produk Karakteristik Pariwisata						
1. Akomodasi dan sejenisnya	308,9	164,2	1.615,4	2.160,0	623,3	196,5
2. Restoran dan sejenisnya	2.005,6	1.414,9	9.755,2	10.767,9	5.359,1	1.465,2
3. Angkutan KA	18,5	0,9	1.183,6	418,6	178,0	89,0
4. Angkutan jalan raya	532,8	254,6	2.772,4	2.623,5	1.712,8	219,8
5. Angkutan air	46,6	3,2	68,4	39,1	117,7	8,3
6. Angkutan udara	635,2	300,9	1.891,4	1.566,4	293,2	607,8
7. Sewa kendaraan	416,8	128,2	1.076,1	1.575,0	1.212,1	179,5
8. Agen perjalanan dan jasa reservasi	10,7	12,2	266,0	230,7	463,4	80,3
9. Pertunjukan seni, budaya, museum dan peninggalan sejarah	20,4	5,8	112,9	209,2	146,4	14,3
10. Jasa rekreasi/hiburan	170,3	83,7	1.087,6	1.397,3	628,2	97,6
11. Cinderamata	330,1	162,4	1.593,4	2.469,4	1.258,8	244,1
12. Kecantikan dan kesehatan	362,3	71,7	129,6	212,1	193,3	17,8
13. Pertemuan, seminar, konferensi	13,2	1,6	12,8	14,5	7,5	6,6
Produk Konsumsi Lainnya						
14. Belanja	722,9	562,9	3.273,5	3.892,7	1.872,5	323,0
15. Bahan bakar dan pelumas	348,7	232,0	1.711,1	2.146,6	1.090,8	183,6
16. Lainnya	65,6	28,6	1.105,3	748,4	345,4	30,8
Total pengeluaran	6.008,7	3.427,7	27.654,8	30.471,4	15.502,6	3.764,4
Jumlah Perjalanan (000)	9.364,7	5.483,0	24.840,0	43.779,2	41.482,6	6.498,7

Tabel 2.a. Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Asal dan Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi Tahun 2017 (miliar rupiah)

Lanjutan

Jenis Produk	Provinsi Asal					Jumlah
	Jawa Timur	Banten	Bali	Sulawesi Selatan	Lainnya	
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Produk Karakteristik Pariwisata						
1. Akomodasi dan sejenisnya	1.326,7	298,6	221,4	470,5	8.905,4	16.291,0
2. Restoran dan sejenisnya	6.879,2	2.295,8	1.651,6	1.731,8	33.219,1	76.545,4
3. Angkutan KA	354,6	45,6	2,8	6,2	141,9	2.439,8
4. Angkutan jalan raya	1.878,8	562,1	234,1	413,7	6.002,8	17.207,4
5. Angkutan air	151,1	66,9	112,1	147,3	5.589,8	6.350,4
6. Angkutan udara	867,1	228,7	243,3	736,6	28.650,9	36.021,6
7. Sewa kendaraan	1.379,2	300,6	201,9	295,0	4.413,2	11.177,5
8. Agen perjalanan dan jasa reservasi	416,5	76,8	7,4	5,6	96,2	1.665,8
9. Pertunjukan seni, budaya, museum dan peninggalan sejarah	143,3	41,8	28,4	10,4	168,6	901,7
10. Jasa rekreasi/hiburan	863,5	208,1	112,2	139,9	1.543,2	6.331,5
11. Cinderamata	1.621,7	428,6	242,4	230,5	3.263,0	11.844,5
12. Kecantikan dan kesehatan	180,7	39,6	83,0	69,0	6.574,8	7.933,9
13. Pertemuan, seminar, konferensi	32,9	15,5	6,0	11,8	619,0	741,6
Produk Konsumsi Lainnya						
14. Belanja	2.649,3	798,9	560,5	976,3	26.642,3	42.274,7
15. Bahan bakar dan pelumas	1.398,9	550,8	390,7	293,7	3.226,6	11.573,4
16. Lainnya	391,2	379,1	142,1	32,1	905,6	4.174,2
Total pengeluaran	20.534,7	6.337,4	4.240,0	5.570,5	129.962,2	253.474,3
Jumlah Perjalanan (000)	43.689,3	9.551,7	8.143,6	8.812,2	69.177,0	270.822,0

Tabel 2.b. Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Tujuan dan Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi Tahun 2017 (miliar rupiah)

Jenis Produk	Provinsi Tujuan					
	Sumatera Utara	Sumatera Barat	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Produk Karakteristik Pariwisata						
1. Akomodasi dan sejenisnya	402,5	163,9	3.895,0	3.132,5	1.308,9	1.416,1
2. Restoran dan sejenisnya	2.589,7	1.520,4	13.605,4	12.862,5	11.098,9	4.104,9
3. Angkutan KA	16,2	1,0	264,4	372,7	556,0	235,8
4. Angkutan jalan raya	669,9	293,4	2.111,5	2.645,4	3.037,4	875,4
5. Angkutan air	48,4	14,0	604,8	387,9	568,4	175,8
6. Angkutan udara	910,7	222,4	7.765,9	4.553,8	4.790,8	3.388,1
7. Sewa kendaraan	542,9	190,6	1.293,5	1.709,5	1.437,0	755,8
8. Agen perjalanan dan jasa reservasi	21,3	5,5	227,0	299,1	316,7	251,8
9. Pertunjukan seni, budaya, museum dan peninggalan sejarah	18,3	9,9	129,5	124,5	172,3	149,9
10. Jasa rekreasi/hiburan	199,5	119,9	1.050,6	1.292,7	858,1	480,1
11. Cinderamata	418,0	210,2	2.151,9	2.547,5	2.040,8	484,0
12. Kecantikan dan kesehatan	240,1	122,8	1.922,0	469,9	473,2	137,1
13. Pertemuan, seminar, konferensi	4,7	1,7	274,8	125,8	12,9	66,3
Produk Konsumsi Lainnya						
14. Belanja	1.151,3	732,9	14.810,6	4.907,8	4.048,4	2.575,8
15. Bahan bakar dan pelumas	454,7	334,5	655,5	2.054,1	1.566,8	829,2
16. Lainnya	108,7	37,3	547,6	954,0	633,7	226,0
Total pengeluaran	7.796,8	3.980,4	51.309,9	38.439,8	32.920,4	16.152,1
Jumlah Perjalanan (000)	10.579,5	6.468,5	15.707,6	44.135,3	40.987,6	13.759,9

Tabel 2.b. Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Tujuan dan Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi Tahun 2017 (miliar rupiah)

Lanjutan

Jenis Produk (1)	Provinsi Tujuan					Jumlah (13)
	Jawa Timur (8)	Banten (9)	Bali (10)	Sulawesi Selatan (11)	Lainnya (12)	
Produk Karakteristik Pariwisata						
1. Akomodasi dan sejenisnya	2.154,4	239,5	1.638,3	490,1	1.449,7	16.291,0
2. Restoran dan sejenisnya	11.992,8	2.040,3	2.968,1	3.030,2	10.732,2	76.545,4
3. Angkutan KA	453,7	19,6	-	-	520,3	2.439,8
4. Angkutan jalan raya	3.176,5	442,7	512,6	817,5	2.625,2	17.207,4
5. Angkutan air	789,1	100,8	165,3	430,7	3.065,2	6.350,4
6. Angkutan udara	6.942,2	446,6	1.925,4	1.930,3	3.145,5	36.021,6
7. Sewa kendaraan	1.855,5	448,7	412,3	454,0	2.077,8	11.177,5
8. Agen perjalanan dan jasa reservasi	235,0	60,6	171,6	33,3	43,8	1.665,8
9. Pertunjukan seni, budaya, museum dan peninggalan sejarah	147,8	12,8	106,1	9,3	21,2	901,7
10. Jasa rekreasi/hiburan	988,5	302,4	299,8	217,1	522,7	6.331,5
11. Cinderamata	2.401,3	361,5	613,7	437,4	178,3	11.844,5
12. Kecantikan dan kesehatan	618,5	24,6	811,6	487,4	2.626,6	7.933,9
13. Pertemuan, seminar, konferensi	81,0	23,5	8,4	59,6	82,9	741,6
Produk Konsumsi Lainnya						
14. Belanja	6.052,6	650,2	1.358,2	1.966,7	4.020,2	42.274,7
15. Bahan bakar dan pelumas	1.713,1	326,6	367,5	398,9	2.872,5	11.573,4
16. Lainnya	985,6	99,9	136,8	192,8	251,9	4.174,2
Total pengeluaran	40.587,8	5.600,5	11.495,6	10.955,2	34.236,0	253.474,3
Jumlah Perjalanan (000)	44.485,5	10.194,8	9.225,3	9.685,9	65.592,0	270.822,0

Tabel 3. Struktur Pengeluaran Wisatawan Indonesia yang ke Luar Negeri Menurut Kategori Pengeluaran dan Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi Tahun 2017 (miliar rupiah)

Jenis Produk (1)	Perjalanan			Jumlah (5)
	Pre-trip (2)	Trip (3)	Post-trip (4)	
Produk Karakteristik Pariwisata				
1. Akomodasi dan sejenisnya	69,2	36.068,7	32,6	36.170,6
2. Restoran dan sejenisnya	774,1	16.382,0	364,7	17.520,9
3. Angkutan KA	32,0	68,7	15,1	115,8
4. Angkutan jalan raya	225,7	904,6	106,4	1.236,7
5. Angkutan air	83,3	1.963,3	39,3	2.085,9
6. Angkutan udara	472,6	3.728,1	222,6	4.423,3
7. Sewa kendaraan	146,6	666,1	69,1	881,9
8. Agen perjalanan dan jasa reservasi	1.340,9	2.327,3	631,8	4.299,9
9. Pertunjukan seni, budaya, museum dan peninggalan sejarah	-	1.388,7	-	1.388,7
10. Jasa rekreasi/hiburan	-	5.554,8	-	5.554,8
11. Cinderamata	-	18.109,7	-	18.109,7
12. Kecantikan dan kesehatan	-	11.036,9	-	11.036,9
13. Pertemuan, seminar, konferensi	-	1.551,5	-	1.551,5
Produk Konsumsi Lainnya				
14. Belanja	2.006,2	9.751,4	945,2	12.702,7
15. Bahan bakar dan pelumas	151,8	-	71,5	223,4
16. Lainnya	149,0	1.393,0	70,2	1.612,2
Total pengeluaran	5.451,6	110.894,8	2.568,4	118.914,8
Jumlah Perjalanan (000)	-	8.855,7	-	-

Tabel 4. Struktur Pengeluaran Wisatawan Menurut Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi dan Jenis Wisatawan Tahun 2017 (miliar rupiah)

Jenis Produk	Wisatawan			Jumlah
	Wisman	Wisnus	Wisnas (Pre & Post)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Produk Karakteristik Pariwisata				
1. Akomodasi dan sejenisnya	79.827,4	16.291,0	101,9	96.220,2
2. Restoran dan sejenisnya	36.085,0	76.545,4	1.138,8	113.769,2
3. Angkutan KA	1.134,0	2.439,8	47,1	3.620,9
4. Angkutan jalan raya	14.578,9	17.207,4	332,1	32.118,4
5. Angkutan air	2.429,0	6.350,4	122,6	8.901,9
6. Angkutan udara	17.343,2	36.021,6	695,2	54.060,0
7. Sewa kendaraan	324,0	11.177,5	215,7	11.717,3
8. Agen perjalanan dan jasa reservasi	3.319,0	1.665,8	1.972,7	6.957,4
9. Pertunjukan seni, budaya, museum dan peninggalan sejarah	1.031,2	901,7	-	1.932,9
10. Jasa rekreasi/hiburan	9.281,0	6.331,5	-	15.612,5
11. Cinderamata	12.457,6	11.844,5	-	24.302,1
12. Kecantikan dan kesehatan	4.477,0	7.933,9	-	12.410,9
13. Pertemuan, seminar, konferensi	1.106,3	741,6	-	1.847,9
Produk Konsumsi Lainnya				
14. Belanja	13.798,0	42.274,7	2.951,4	59.024,1
15. Bahan bakar dan pelumas	-	11.573,4	223,4	11.796,8
16. Lainnya	1.700,1	4.174,2	219,2	6.093,5
Total pengeluaran	198.891,6	253.474,3	8.020,0	460.386,0

Tabel 5. Struktur Input Terkait Pariwisata (Persen)

Struktur Input	Sektor Pariwisata				
	Penyediaan akomodasi	Penyediaan Makan Minum	Angkutan Rel	Angkutan Darat selain Rel	Angkutan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Input Antara	38,00	55,96	62,17	45,50	67,09
1. Pertanian	8,87	15,09	0,11	-	0,12
2. Pertambangan	0,01	-	0,03	-	-
3. Industri	19,36	27,47	19,91	29,77	33,01
4. Listrik, gas dan air	1,22	0,36	6,88	0,34	0,68
5. Bangunan	0,70	0,07	6,20	0,55	3,21
6. Perdagangan	3,54	11,47	2,63	8,06	2,25
7. Angkutan	0,28	0,20	2,13	2,90	15,30
8. Penyediaan akomodasi	0,05	0,02	0,55	0,02	0,20
9. Penyediaan makan minum	0,17	0,00	0,10	0,04	0,17
10. Komunikasi	1,16	0,41	0,38	0,44	1,42
11. Lembaga Keuangan dan jasa perusahaan	2,31	0,61	3,68	3,08	9,96
12. Jasa-jasa	0,33	0,25	19,57	0,30	0,77
II. Input Primer	62,00	44,04	37,83	54,50	32,91
1. Kompensasi TK	16,24	16,28	29,89	17,91	10,15
2. Surplus usaha	45,32	27,42	7,64	36,17	22,50
3. Pajak dikurangi subsidi lainnya atas produksi	0,44	0,35	0,30	0,42	0,26
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 5. Struktur Input Terkait Pariwisata (Persen)

Lanjutan

Struktur Input	Sektor Pariwisata			
	Angkutan Udara	Jasa Penunjang Angkutan	Lemb Keu dan Jasa Perusahaan	Jasa hib., rek. & budaya
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
I. Input Antara	49,10	39,16	41,55	62,17
1. Pertanian	0,47	0,00	0,01	0,11
2. Pertambangan	-	0,16	0,37	0,03
3. Industri	13,09	2,16	9,13	19,91
4. Listrik, gas dan air	0,08	1,81	0,88	6,88
5. Bangunan	0,04	9,33	6,88	6,20
6. Perdagangan	2,34	1,04	1,33	2,63
7. Angkutan	13,97	14,43	2,34	2,13
8. Penyediaan akomodasi	0,02	0,11	0,05	0,55
9. Penyediaan makan minum	5,76	0,07	0,06	0,10
10. Komunikasi	3,96	5,00	3,83	0,38
11. Lembaga Keuangan dan jasa perusahaan	8,89	4,54	14,63	3,68
12. Jasa-jasa	0,47	0,49	2,06	19,57
II. Input Primer	50,90	60,84	58,45	37,83
1. Kompensasi TK	20,73	22,22	17,87	29,89
2. Surplus usaha	29,76	38,14	40,24	7,64
3. Pajak dikurangi subsidi lainnya atas produksi	0,40	0,48	0,33	0,30
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 6. Struktur PMTB Pariwisata Baik yang Bersifat Langsung maupun Tidak Langsung Tahun 2017 (miliar rupiah)

Jenis Barang Modal	Penanam Modal			Jumlah
	Swasta/ BUMN/ BUMD	Pemerintah		
		Pusat	Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bangunan Hotel & Akomodasi lainnya	24.433,2	-	-	24.433,2
2. Bangunan Restoran & sejenisnya	12.055,0	-	-	12.055,0
3. Bangunan Bukan Tempat Tinggal	25.902,4	6,5	7,1	25.916,0
4. Bangunan olahraga, rekreasi, hiburan, seni dan budaya	11.645,8	16,6	16,7	11.679,2
5. Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Pelabuhan)	37.958,5	14,1	12,0	37.984,7
6. Bangunan Lainnya	16.528,1	-	-	16.528,1
7. Mesin dan Peralatan	10.722,0	127,7	119,7	10.969,4
8. Alat Angkutan	6.350,6	40,0	59,0	6.449,5
9. Barang modal Lainnya	13.969,1	1,7	3,5	3.974,3
Jumlah	159.564,7	206,6	218,1	159.989,4

Tabel 7. Jumlah Tenaga Kerja pada Usaha Pariwisata Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2017

Lapangan Usaha	Banyaknya (000 orang)	Distribusi (Persen)
(1)	(2)	(3)
1. Perdagangan	4.682,5	36,76
2. Angkutan	71,0	0,56
3. Penyediaan akomodasi	917,1	7,20
4. Penyediaan makan minum	6.215,0	48,79
5. Jasa agen perjalanan	81,5	0,64
6. Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas	196,3	1,54
Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan		
7. Kebudayaan Lainnya	43,6	0,34
8. Kegiatan Olahraga dan Rekreasi Lainnya	247,5	1,94
9. Lainnya	284,9	2,24
Jumlah	12.739,4	100,00

Tabel 8. Struktur Pengeluaran Pemerintah Dalam Promosi dan Pembinaan Pariwisata (*Current Expenditure*) Menurut Jenis Aktivitas Tahun 2017 (Miliar Rupiah)

Jenis Aktivitas	Pemerintah		
	Pusat	Daerah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Promosi pariwisata	3.223,4	1.471,9	4.695,3
2. Perencanaan dan koordinasi pemb. Pariwisata	959,5	1.914,8	2.874,3
3. Penyusunan statistik dan informasi pariwisata	521,7	1.203,0	1.724,7
4. Penelitian dan Pengembangan	1.316,9	1.354,0	2.670,9
5. Penyelenggaraan dan pelayanan informasi pariwisata	10,2	644,3	654,5
6. Pengamanan dan perlindungan wisatawan	3,9	219,3	223,1
7. Pengawasan dan pengaturan	48,0	272,2	320,2
8. Lainnya	266,7	194,9	461,6
Jumlah	6.350,3	7.274,4	13.624,7

Tabel 9. Peranan Pariwisata dalam Struktur Perekonomian Tahun 2017

Lapangan Usaha	Produksi/Output		NTB	
	Total (Miliar Rp)	% Par	Total (Miliar Rp)	% Par
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan	89.458,8	3,97	69.469,2	3,89
2. Pertambangan dan penggalian	35.154,3	2,56	26.183,2	2,55
3. Industri pengolahan	324.121,6	4,14	118.574,4	4,33
4. Pengadaan listrik, gas, dan air	14.571,1	2,34	4.028,9	2,34
5. Konstruksi	137.768,8	3,36	47.415,8	3,36
6. Perdagangan, reparasi mobil dan motor	60.351,4	2,31	40.842,0	2,31
7. Penyediaan akomodasi	97.895,2	64,35	59.085,9	64,35
8. Penyediaan makan minum	119.446,6	17,39	51.411,4	17,39
9. Angkutan rel	3.730,3	15,04	1.379,9	15,04
10. Angkutan darat	56.132,8	8,39	27.531,2	8,39
11. Angkutan air	10.925,6	6,21	3.545,3	6,21
12. Angkutan udara	56.883,8	8,51	18.795,8	8,51
13. Jasa penunjang angkutan	15.798,6	7,54	9.069,7	7,58
14. Informasi dan komunikasi	22.810,3	2,76	14.218,9	2,76
15. Jasa lainnya	77.602,8	1,96	45.224,9	1,79
Jumlah	1.122.651,9	4,29	536.776,5	4,11

Tabel 9. Peranan Pariwisata dalam Struktur Perekonomian Tahun 2017

Lanjutan

Lapangan Usaha	Kompensasi TK		Pajak atas Produksi Neto	
	Total (Miliar Rp)	% Par	Total (Miliar Rp)	% Par
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan	16.308,9	3,66	554,7	3,80
2. Pertambangan dan pengalihan	4.593,8	2,16	230,5	2,55
3. Industri pengolahan	36.017,5	4,39	975,4	4,43
4. Pengadaan listrik, gas, dan air	906,9	2,34	27,9	2,34
5. Konstruksi	18.951,6	3,36	393,2	3,36
6. Perdagangan, reparasi mobil dan motor	11.792,0	2,31	304,8	2,31
7. Penyediaan akomodasi	15.478,7	64,35	421,7	64,35
8. Penyediaan makan minum	18.998,6	17,39	406,8	17,39
9. Angkutan rel	1.090,4	15,04	10,9	15,04
10. Angkutan darat	9.045,8	8,39	210,2	8,39
11. Angkutan air	1.261,4	6,21	27,9	6,21
12. Aangkutan udara	7.656,7	8,51	148,1	8,51
13. Jasa penunjang angkutan	3.288,7	7,60	71,8	7,58
14. Informasi dan komunikasi	3.922,5	2,76	113,0	2,76
15. Jasa lainnya	22.345,5	1,74	283,2	1,10
Jumlah	171.658,9	3,88	4.180,2	3,79

<https://www.bps.go.id>

LAMPIRAN 2. Tabel Lainnya

Tabel 1. Konsumsi Wisatawan, Investasi dan Belanja Pemerintah dan Swasta Tahun 2017

miliar Rp

No	Sektor	Konsumsi			Pengembangan		Jumlah
		Wisman	Wisnus	Wisnas	Investasi	Promosi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Padi	-	-	-	-	-	-
2.	Tanaman kacang-kacangan	-	18,2	-	-	-	18,2
3.	Jagung	-	7,4	-	-	-	7,4
4.	Tanaman umbi-umbian	-	21,7	-	-	-	21,7
5.	Sayur-sayuran dan buah-buahan	1.788,1	1.369,4	-	-	-	3.157,5
6.	Tanaman bahan makanan lainnya	22,6	25,7	-	-	-	48,3
7.	Karet	-	-	-	-	-	-
8.	Tebu	-	-	-	-	-	-
9.	Kelapa	-	-	-	-	-	-
10.	Kelapa sawit	-	-	-	-	-	-
11.	Tembakau	-	-	-	-	-	-
12.	Kopi	-	-	-	-	-	-
13.	Teh	-	-	-	-	-	-
14.	Cengkeh	-	-	-	-	-	-
15.	Hasil tanaman serat	-	-	-	-	-	-
16.	Tanaman perkebunan lainnya	-	-	-	-	-	-
17.	Tanaman lainnya	-	-	-	-	-	-
18.	Peternakan	-	-	-	-	-	-
19.	Pemotongan hewan	46,5	103,8	10,5	-	-	160,8
20.	Unggas dan hasil-hasilnya	50,4	112,5	11,4	-	-	174,2
21.	Kayu	-	-	-	-	-	-
22.	Hasil hutan lainnya	-	-	-	-	-	-
23.	Perikanan	-	1.361,4	-	-	-	1.361,4
24.	Penambangan batubara dan bijih logam	-	-	-	-	-	-
25.	Penambangan minyak, gas dan panas bumi	-	-	-	-	-	-
26.	Penambangan dan penggalian lainnya	-	-	-	-	-	-
27.	Industri pengolahan dan pengawetan makanan	871,7	1.946,9	197,1	-	-	3.015,7
28.	Industri minyak dan lemak	-	-	-	-	-	-
29.	Industri penggilingan padi	-	-	-	-	-	-
30.	Industri tepung, segala jenis	581,3	598,8	131,3	-	-	1.311,4
31.	Industri gula	674,2	2.014,3	126,1	-	-	2.814,6
32.	Industri makanan lainnya	853,1	2.491,9	160,6	-	-	3.505,6
33.	Industri minuman	678,8	2.380,1	166,1	-	-	3.225,0
34.	Industri rokok	443,2	1.364,5	119,6	-	-	1.927,2
35.	Industri pemintalan	544,3	3.446,3	139,7	-	-	4.130,3

Tabel 1. Lanjutan

miliar Rp

No	Sektor	Konsumsi			Pengembangan		Jumlah
		Wisnus	Wisnas	Wisman	Investasi	Promosi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
36.	Industri tekstil, pakaian dan kulit	6.655,7	18.347,7	1.392,7	5.317,2	-	31.713,3
37.	Industri bambu, kayu dan rotan	6.960,1	8.204,3	784,1	8.657,1	-	24.605,6
38.	Industri kertas, barang dari kertas dan karton	210,0	1.331,7	-	-	-	1.541,7
39.	Industri pupuk dan pestisida	-	-	-	-	-	-
40.	Industri kimia	771,0	140,0	56,8	-	-	967,8
41.	Pengilangan minyak bumi	-	10.569,5	219,2	-	-	10.788,7
42.	Industri barang karet dan plastik	-	3.594,3	-	-	-	3.594,3
43.	Industri barang-barang dari mineral bukan logam	3.084,0	559,9	227,2	-	-	3.871,1
44.	Industri semen	-	-	-	-	-	-
45.	Industri dasar besi dan baja	-	-	-	-	-	-
46.	Industri logam dasar bukan besi	-	-	-	-	-	-
47.	Industri barang dari logam	-	-	-	-	-	-
48.	Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik	1.722,0	1.763,7	66,1	10.969,4	-	14.521,2
49.	Industri alat pengangkutan dan perbaikannya	-	-	-	6.449,5	-	6.449,5
50.	Industri barang lain yang belum digolongkan dimanapun	3.198,0	3.275,5	122,7	-	-	6.596,2
51.	Listrik, gas dan air bersih	-	-	-	-	-	-
52.	Bangunan	-	-	-	128.596,1	-	128.596,1
53.	Perdagangan	-	-	-	-	-	-
54.	Penyediaan Akomodasi	79.827,4	16.291,0	101,9	-	-	96.220,2
55.	Penyediaan Makan dan Minum	36.085,0	76.545,4	1.138,8	-	-	113.769,2
56.	Angkutan kereta api	1.134,0	2.439,8	47,1	-	-	3.620,9
57.	Angkutan darat	14.902,9	28.384,9	547,8	-	-	43.835,6
58.	Angkutan air	2.429,0	6.350,4	122,6	-	-	8.901,9
59.	Angkutan udara	17.343,2	36.021,6	695,2	-	-	54.060,0
60.	Jasa penunjang angkutan	1.423,4	4.022,9	1.148,4	-	-	6.594,6
61.	Jasa Pos dan Kurir	474,5	1.005,7	287,1	-	-	1.767,3
62.	Komunikasi	2.436,0	3.337,8	-	-	-	5.773,8
63.	Lembaga keuangan	1.387,4	1.254,6	-	-	-	2.642,0
64.	Jasa Real Estat	182,4	256,3	-	-	-	438,7
65.	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	386,2	542,7	-	-	-	929,0
66.	Jasa Persewaan dan Jasa Penunjang Usaha	504,3	708,6	-	-	-	1.212,8
67.	Pemerintahan umum dan pertahanan	-	-	-	-	13.624,7	13.624,7
68.	Jasa sosial kemasyarakatan	629,2	952,0	-	-	-	1.581,2
69.	Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	10.312,2	7.233,2	-	-	-	17.545,4
70.	Jasa Lainnya	279,8	3.078,1	-	-	-	3.357,8
Jumlah		198.891,6	253.474,3	8.020,0	159.989,4	13.624,7	634.000,1

Tabel 2. Dampak Ekonomi Pariwisata terhadap Output Tahun 2017

miliar Rp

No	Sektor	Konsumsi			Pengembangan		Jumlah
		Wisman	Wisnus	Wisnas	Investasi	Promosi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Padi	4.990,5	5.255,8	86,7	145,4	70,6	10.548,9
2.	Tanaman kacang-kacangan	322,2	482,1	12,4	9,4	4,7	830,8
3.	Jagung	1.004,0	1.209,1	43,9	35,4	12,7	2.305,2
4.	Tanaman umbi-umbian	1.105,4	1.381,0	28,9	30,9	17,6	2.563,8
5.	Sayur-sayuran dan buah-buahan	6.685,6	6.797,8	101,7	146,4	68,2	13.799,7
6.	Tanaman bahan makanan lainnya	31,5	32,9	0,1	0,2	0,0	64,8
7.	Karet	344,0	1.533,0	22,7	1.155,6	25,6	3.080,9
8.	Tebu	364,6	685,7	32,3	28,6	4,2	1.115,4
9.	Kelapa	541,1	907,5	30,1	29,5	8,9	1.517,0
10.	Kelapa sawit	1.236,0	1.639,0	40,7	192,3	22,9	3.131,0
11.	Tembakau	21,7	42,9	3,6	0,1	0,0	68,3
12.	Kopi	199,8	285,1	9,1	6,3	2,6	503,0
13.	Teh	30,3	45,5	1,7	0,9	0,4	78,7
14.	Cengkeh	77,6	133,9	7,9	8,7	1,0	229,1
15.	Hasil tanaman serat	2,6	5,8	0,4	2,6	0,0	11,5
16.	Tanaman perkebunan lainnya	777,1	1.053,0	41,5	71,5	10,8	1.953,9
17.	Tanaman lainnya	2.251,2	1.224,3	21,4	180,2	17,3	3.694,3
18.	Peternakan	1.187,6	1.316,6	32,5	64,5	15,1	2.616,2
19.	Pemotongan hewan	5.203,0	5.558,2	106,5	168,3	71,2	11.107,2
20.	Unggas dan hasil-hasilnya	3.611,4	3.574,6	66,1	81,9	47,3	7.381,3
21.	Kayu	1.404,9	1.661,9	145,8	4.434,7	29,9	7.677,2
22.	Hasil hutan lainnya	397,4	522,4	41,7	1.004,5	7,1	1.973,1
23.	Perikanan	5.092,4	7.772,4	146,3	118,1	78,3	13.207,5
24.	Penambangan batubara dan bijih logam	823,8	883,6	47,9	4.751,1	40,3	6.546,7
25.	Penambangan minyak, gas dan panas bumi	4.257,1	11.207,3	296,4	5.450,6	224,6	21.436,0
26.	Penambangan dan penggalian lainnya	411,6	429,6	27,7	6.276,2	26,5	7.171,6
27.	Industri pengolahan dan pengawetan makanan	5.205,5	5.518,6	261,7	73,1	46,2	11.105,1
28.	Industri minyak dan lemak	2.727,2	3.619,5	80,9	98,9	44,4	6.570,9
29.	Industri penggilingan padi	6.253,2	6.534,0	102,8	135,6	88,7	13.114,2
30.	Industri tepung, segala jenis	5.927,8	6.436,7	315,2	266,6	73,7	13.019,9
31.	Industri gula	2.003,9	3.804,3	185,1	163,2	21,6	6.178,1
32.	Industri makanan lainnya	6.939,5	9.777,0	319,1	217,7	88,8	17.342,1
33.	Industri minuman	2.054,4	3.702,8	193,8	39,2	17,4	6.007,6
34.	Industri rokok	842,0	1.661,8	137,6	2,8	1,5	2.645,7
35.	Industri pemintalan	1.476,3	6.593,5	330,5	621,6	5,9	9.027,9

Tabel 2. Lanjutan

miliar Rp

No	Sektor	Konsumsi			Pengembangan		Jumlah
		Wisnus	Wisnas	Wisman	Investasi	Promosi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
36.	Industri tekstil, pakaian dan kulit	8.363,9	21.876,5	1.645,3	6.612,0	49,8	38.547,4
37.	Industri bambu, kayu dan rotan	8.452,7	9.798,6	917,6	16.728,0	31,0	35.927,9
38.	Industri kertas, barang dari kertas dan karton	1.741,8	3.701,7	61,8	1.386,7	856,0	7.748,1
39.	Industri pupuk dan pestisida	577,8	646,4	15,3	51,6	11,2	1.302,2
40.	Industri kimia	3.267,1	4.222,6	242,4	5.823,7	164,5	13.720,3
41.	Pengilangan minyak bumi	7.902,4	24.194,3	577,7	8.477,2	433,8	41.585,6
42.	Industri barang karet dan plastik	1.313,4	6.077,4	78,7	4.630,1	103,7	12.203,3
43.	Industri barang-barang dari mineral bukan logam	3.861,5	1.451,7	276,8	10.666,7	77,0	16.333,7
44.	Industri semen	115,9	126,5	8,6	4.225,4	13,5	4.489,9
45.	Industri dasar besi dan baja	314,1	339,9	18,9	5.328,4	21,9	6.023,2
46.	Industri logam dasar bukan besi	311,1	368,5	16,1	2.829,4	19,1	3.544,1
47.	Industri barang dari logam	757,2	906,5	42,1	8.752,1	52,5	10.510,4
48.	Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik	3.179,0	3.818,1	145,6	15.450,3	84,1	22.677,0
49.	Industri alat pengangkutan dan perbaikannya	1.847,5	3.144,1	87,7	8.939,4	64,1	14.082,6
50.	Industri barang lain yang belum digolongkan dimanapun	4.828,3	4.966,1	151,3	428,0	40,6	10.414,3
51.	Listrik, gas dan air bersih	4.691,8	5.291,3	220,8	4.119,8	247,4	14.571,1
52.	Bangunan	2.634,0	3.456,8	203,6	131.066,6	407,7	137.768,8
53.	Perdagangan	16.885,9	23.782,3	729,9	18.391,9	561,5	60.351,4
54.	Penyediaan Akomodasi	80.196,3	16.797,6	122,8	513,2	265,2	97.895,2
55.	Penyediaan Makan dan Minum	37.277,1	78.460,8	1.187,1	1.436,6	1.085,0	119.446,6
56.	Angkutan kereta api	1.161,5	2.475,6	48,4	36,6	8,2	3.730,3
57.	Angkutan darat	17.041,0	31.358,3	663,6	6.599,6	470,3	56.132,8
58.	Angkutan air	2.943,7	7.397,0	238,0	316,6	30,3	10.925,6
59.	Angkutan udara	18.144,4	37.323,4	765,4	393,2	257,5	56.883,8
60.	Jasa penunjang angkutan	3.485,5	8.379,7	1.305,8	365,5	69,7	13.606,2
61.	Jasa Pos dan Kurir	571,0	1.135,8	292,6	184,9	8,2	2.192,5
62.	Komunikasi	7.955,8	10.491,6	277,9	3.655,4	429,7	22.810,3
63.	Lembaga keuangan	6.256,5	7.371,2	227,3	3.755,2	639,3	18.249,6
64.	Jasa Real Estat	603,4	875,9	20,8	456,8	19,7	1.976,6
65.	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	1.257,0	1.658,3	40,0	1.736,1	88,2	4.779,7
66.	Jasa Persewaan dan Jasa Penunjang Usaha	3.177,7	4.756,1	130,8	1.444,7	173,0	9.682,3
67.	Pemerintahan umum dan pertahanan	897,5	1.398,8	33,5	789,7	13.657,9	16.777,5
68.	Jasa sosial masyarakatan	995,6	1.380,7	17,1	372,5	60,7	2.826,6
69.	Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	10.468,8	7.342,2	0,2	2,6	0,3	17.814,0
70.	Jasa Lainnya	594,5	4.656,9	7,7	231,5	5,9	5.496,5
Jumlah		339.876,8	444.718,0	14.141,6	302.211,0	21.704,4	1.122.651,9

Tabel 3. Dampak Ekonomi Pariwisata terhadap Nilai Tambah Bruto Tahun 2017

miliar Rp

No	Sektor	Konsumsi			Pengembangan		Jumlah
		Wisman	Wisnus	Wisnas	Investasi	Promosi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Padi	4.366,1	4.598,2	75,8	127,2	61,8	9.229,1
2.	Tanaman kacang-kacangan	244,9	366,4	9,4	7,1	3,6	631,4
3.	Jagung	853,3	1.027,7	37,3	30,1	10,8	1.959,2
4.	Tanaman umbi-umbian	919,5	1.148,7	24,1	25,7	14,6	2.132,5
5.	Sayur-sayuran dan buah-buahan	6.013,8	6.114,8	91,4	131,7	61,3	12.413,1
6.	Tanaman bahan makanan lainnya	29,7	31,1	0,1	0,2	0,0	61,1
7.	Karet	294,4	1.312,0	19,4	989,0	21,9	2.636,7
8.	Tebu	269,0	505,8	23,8	21,1	3,1	822,8
9.	Kelapa	489,4	820,9	27,2	26,7	8,1	1.372,2
10.	Kelapa sawit	937,4	1.243,0	30,9	145,8	17,4	2.374,5
11.	Tembakau	15,4	30,5	2,5	0,1	0,0	48,5
12.	Kopi	167,6	239,1	7,6	5,3	2,2	421,9
13.	Teh	24,7	37,1	1,4	0,7	0,3	64,2
14.	Cengkeh	68,7	118,6	7,0	7,7	0,9	202,9
15.	Hasil tanaman serat	2,2	4,9	0,4	2,2	0,0	9,7
16.	Tanaman perkebunan lainnya	666,4	903,0	35,6	61,3	9,2	1.675,5
17.	Tanaman lainnya	1.860,7	1.011,9	17,6	149,0	14,3	3.053,4
18.	Peternakan	941,5	1.043,8	25,7	51,1	11,9	2.074,2
19.	Pemotongan hewan	1.983,0	2.118,4	40,6	64,2	27,1	4.233,3
20.	Unggas dan hasil-hasilnya	2.224,5	2.201,8	40,7	50,5	29,1	4.546,7
21.	Kayu	1.206,8	1.427,5	125,2	3.809,4	25,7	6.594,7
22.	Hasil hutan lainnya	340,2	447,2	35,7	859,9	6,1	1.689,1
23.	Perikanan	4.326,9	6.604,1	124,3	100,4	66,5	11.222,2
24.	Penambangan batubara dan bijih logam	590,7	633,6	34,3	3.407,0	28,9	4.694,6
25.	Penambangan minyak, gas dan panas bumi	3.106,7	8.178,9	216,3	3.977,8	163,9	15.643,5
26.	Penambangan dan penggalian lainnya	335,5	350,1	22,6	5.115,2	21,6	5.845,0
27.	Industri pengolahan dan pengawetan makanan	1.663,2	1.763,2	83,6	23,4	14,8	3.548,2
28.	Industri minyak dan lemak	962,7	1.277,6	28,6	34,9	15,7	2.319,5
29.	Industri penggilingan padi	1.361,6	1.422,7	22,4	29,5	19,3	2.855,5
30.	Industri tepung, segala jenis	1.740,9	1.890,4	92,6	78,3	21,6	3.823,8
31.	Industri gula	541,3	1.027,6	50,0	44,1	5,8	1.668,8
32.	Industri makanan lainnya	2.063,3	2.906,9	94,9	64,7	26,4	5.156,2
33.	Industri minuman	767,3	1.382,9	72,4	14,6	6,5	2.243,7
34.	Industri rokok	455,3	898,7	74,4	1,5	0,8	1.430,8
35.	Industri pemintalan	458,4	2.047,3	102,6	193,0	1,8	2.803,2

Tabel 3. Lanjutan

miliar Rp

No	Sektor	Konsumsi			Pengembangan		Jumlah
		Wisnus	Wisnas	Wisman	Investasi	Promosi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
36.	Industri tekstil, pakaian dan kulit	3.561,2	9.314,5	700,5	2.815,2	21,2	16.412,5
37.	Industri bambu, kayu dan rotan	3.571,3	4.140,0	387,7	7.067,7	13,1	15.179,7
38.	Industri kertas, barang dari kertas dan karton	589,1	1.251,9	20,9	469,0	289,5	2.620,3
39.	Industri pupuk dan pestisida	219,4	245,5	5,8	19,6	4,2	494,6
40.	Industri kimia	1.102,7	1.425,2	81,8	1.965,6	55,5	4.630,9
41.	Pengilangan minyak bumi	3.657,4	11.197,7	267,4	3.923,5	200,8	19.246,8
42.	Industri barang karet dan plastik	346,9	1.605,3	20,8	1.223,0	27,4	3.223,4
43.	Industri barang-barang dari mineral bukan logam	1.579,5	593,8	113,2	4.363,0	31,5	6.681,0
44.	Industri semen	36,9	40,3	2,8	1.345,2	4,3	1.429,4
45.	Industri dasar besi dan baja	87,9	95,1	5,3	1.490,9	6,1	1.685,3
46.	Industri logam dasar bukan besi	72,9	86,3	3,8	662,7	4,5	830,1
47.	Industri barang dari logam	268,6	321,6	15,0	3.105,3	18,6	3.729,2
48.	Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik	853,9	1.025,5	39,1	4.149,9	22,6	6.091,0
49.	Industri alat pengangkutan dan perbaikannya	896,1	1.525,0	42,5	4.335,9	31,1	6.830,6
50.	Industri barang lain yang belum digolongkan dimanapun	1.687,6	1.735,8	52,9	149,6	14,2	3.640,1
51.	Listrik, gas dan air bersih	1.297,3	1.463,0	61,1	1.139,1	68,4	4.028,9
52.	Bangunan	906,6	1.189,7	70,1	45.109,1	140,3	47.415,8
53.	Perdagangan	11.427,3	16.094,3	493,9	12.446,4	380,0	40.842,0
54.	Penyediaan Akomodasi	48.403,5	10.138,4	74,1	309,7	160,1	59.085,9
55.	Penyediaan Makan dan Minum	16.044,6	33.770,6	510,9	618,3	467,0	51.411,4
56.	Angkutan kereta api	429,6	915,8	17,9	13,5	3,0	1.379,9
57.	Angkutan darat	8.358,0	15.380,1	325,5	3.236,9	230,7	27.531,2
58.	Angkutan air	955,2	2.400,3	77,2	102,7	9,8	3.545,3
59.	Angkutan udara	5.995,4	12.332,6	252,9	129,9	85,1	18.795,8
60.	Jasa penunjang angkutan	2.027,1	4.873,3	759,4	212,6	40,5	7.912,9
61.	Jasa Pos dan Kurir	301,3	599,3	154,4	97,6	4,3	1.156,8
62.	Komunikasi	4.959,2	6.540,0	173,2	2.278,6	267,8	14.218,9
63.	Lembaga keuangan	4.528,2	5.335,0	164,5	2.717,9	462,7	13.208,3
64.	Jasa Real Estat	498,9	724,2	17,2	377,7	16,3	1.634,3
65.	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	696,0	918,2	22,2	961,3	48,9	2.646,6
66.	Jasa Persewaan dan Jasa Penunjang Usaha	1.990,7	2.979,4	81,9	905,0	108,4	6.065,5
67.	Pemerintahan umum dan pertahanan	556,9	867,9	20,8	490,0	8.473,9	10.409,4
68.	Jasa sosial masyarakatan	579,6	803,7	10,0	216,8	35,3	1.645,4
69.	Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	4.007,1	2.810,3	0,1	1,0	0,1	6.818,6
70.	Jasa Lainnya	302,5	2.369,6	3,9	117,8	3,0	2.796,9
Jumlah		175.089,4	214.245,8	6.749,1	128.218,8	12.473,5	536.776,5

Tabel 4. Dampak Ekonomi Pariwisata terhadap Kompensasi Tenaga Kerja Tahun 2017

miliar Rp

No	Sektor	Konsumsi			Pengembangan		Jumlah
		Wisman	Wisnus	Wisnas	Investasi	Promosi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Padi	911,8	960,2	15,8	26,6	12,9	1.927,3
2.	Tanaman kacang-kacangan	43,6	65,2	1,7	1,3	0,6	112,3
3.	Jagung	135,8	163,6	5,9	4,8	1,7	311,9
4.	Tanaman umbi-umbian	148,1	185,0	3,9	4,1	2,4	343,5
5.	Sayur-sayuran dan buah-buahan	1.017,6	1.034,7	15,5	22,3	10,4	2.100,4
6.	Tanaman bahan makanan lainnya	5,3	5,5	0,0	0,0	0,0	10,8
7.	Karet	110,8	493,8	7,3	372,2	8,3	992,4
8.	Tebu	71,8	135,1	6,4	5,6	0,8	219,7
9.	Kelapa	115,2	193,3	6,4	6,3	1,9	323,1
10.	Kelapa sawit	337,4	447,4	11,1	52,5	6,3	854,7
11.	Tembakau	4,8	9,5	0,8	0,0	0,0	15,2
12.	Kopi	49,7	70,9	2,3	1,6	0,7	125,2
13.	Teh	9,6	14,4	0,5	0,3	0,1	24,9
14.	Cengkeh	17,3	29,9	1,8	2,0	0,2	51,1
15.	Hasil tanaman serat	0,3	0,8	0,1	0,4	0,0	1,5
16.	Tanaman perkebunan lainnya	160,9	218,0	8,6	14,8	2,2	404,5
17.	Tanaman lainnya	473,6	257,5	4,5	37,9	3,6	777,2
18.	Peternakan	356,3	395,0	9,7	19,4	4,5	784,9
19.	Pemotongan hewan	558,6	596,7	11,4	18,1	7,6	1.192,4
20.	Unggas dan hasil-hasilnya	787,0	778,9	14,4	17,9	10,3	1.608,5
21.	Kayu	276,8	327,4	28,7	873,6	5,9	1.512,4
22.	Hasil hutan lainnya	78,0	102,6	8,2	197,2	1,4	387,4
23.	Perikanan	858,9	1.310,9	24,7	19,9	13,2	2.227,6
24.	Penambangan batubara dan bijih logam	105,0	112,6	6,1	605,5	5,1	834,4
25.	Penambangan minyak, gas dan panas bumi	327,9	863,3	22,8	419,9	17,3	1.651,3
26.	Penambangan dan penggalian lainnya	121,0	126,3	8,1	1.844,9	7,8	2.108,2
27.	Industri pengolahan dan pengawetan makanan	404,3	428,6	20,3	5,7	3,6	862,4
28.	Industri minyak dan lemak	243,9	323,7	7,2	8,8	4,0	587,6
29.	Industri penggilingan padi	356,3	372,3	5,9	7,7	5,1	747,3
30.	Industri tepung, segala jenis	480,4	521,6	25,5	21,6	6,0	1.055,1
31.	Industri gula	177,5	337,0	16,4	14,5	1,9	547,3
32.	Industri makanan lainnya	612,7	863,2	28,2	19,2	7,8	1.531,1
33.	Industri minuman	358,7	646,4	33,8	6,8	3,0	1.048,8
34.	Industri rokok	147,8	291,7	24,2	0,5	0,3	464,4
35.	Industri pemintalan	108,1	482,9	24,2	45,5	0,4	661,2

Tabel 4. Lanjutan

miliar Rp

No	Sektor	Konsumsi			Pengembangan		Jumlah
		Wisnus	Wisnas	Wisman	Investasi	Promosi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
36.	Industri tekstil, pakaian dan kulit	1.197,7	3.132,7	235,6	946,8	7,1	5.520,0
37.	Industri bambu, kayu dan rotan	937,9	1.087,3	101,8	1.856,2	3,4	3.986,6
38.	Industri kertas, barang dari kertas dan karton	184,8	392,8	6,6	147,2	90,8	822,2
39.	Industri pupuk dan pestisida	82,9	92,7	2,2	7,4	1,6	186,7
40.	Industri kimia	375,8	485,7	27,9	669,8	18,9	1.578,0
41.	Pengilangan minyak bumi	958,2	2.933,7	70,1	1.027,9	52,6	5.042,6
42.	Industri barang karet dan plastik	113,6	525,6	6,8	400,4	9,0	1.055,3
43.	Industri barang-barang dari mineral bukan logam	560,9	210,9	40,2	1.549,5	11,2	2.372,6
44.	Industri semen	12,5	13,6	0,9	454,4	1,5	482,8
45.	Industri dasar besi dan baja	17,4	18,8	1,1	295,5	1,2	334,0
46.	Industri logam dasar bukan besi	15,0	17,8	0,8	136,6	0,9	171,1
47.	Industri barang dari logam	78,3	93,8	4,4	905,3	5,4	1.087,1
48.	Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik	317,2	380,9	14,5	1.541,5	8,4	2.262,5
49.	Industri alat pengangkutan dan perbaikannya	286,6	487,8	13,6	1.386,9	9,9	2.184,9
50.	Industri barang lain yang belum digolongkan dimanapun	661,0	679,9	20,7	58,6	5,6	1.425,7
51.	Listrik, gas dan air bersih	292,0	329,3	13,7	256,4	15,4	906,9
52.	Bangunan	362,3	475,5	28,0	18.029,6	56,1	18.951,6
53.	Perdagangan	3.299,3	4.646,8	142,6	3.593,6	109,7	11.792,0
54.	Penyediaan Akomodasi	12.680,2	2.656,0	19,4	81,1	41,9	15.478,7
55.	Penyediaan Makan dan Minum	5.929,1	12.479,6	188,8	228,5	172,6	18.998,6
56.	Angkutan kereta api	339,5	723,6	14,1	10,7	2,4	1.090,4
57.	Angkutan darat	2.746,2	5.053,4	106,9	1.063,5	75,8	9.045,8
58.	Angkutan air	339,9	854,0	27,5	36,6	3,5	1.261,4
59.	Angkutan udara	2.442,3	5.023,8	103,0	52,9	34,7	7.656,7
60.	Jasa penunjang angkutan	740,4	1.780,1	277,4	77,7	14,8	2.890,4
61.	Jasa Pos dan Kurir	103,7	206,3	53,2	33,6	1,5	398,3
62.	Komunikasi	1.368,1	1.804,2	47,8	628,6	73,9	3.922,5
63.	Lembaga keuangan	1.384,7	1.631,4	50,3	831,1	141,5	4.038,9
64.	Jasa Real Estat	27,2	39,5	0,9	20,6	0,9	89,0
65.	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	152,3	200,9	4,8	210,3	10,7	579,0
66.	Jasa Persewaan dan Jasa Penunjang Usaha	767,8	1.149,2	31,6	349,1	41,8	2.339,5
67.	Pemerintahan umum dan pertahanan	495,5	772,2	18,5	436,0	7.539,5	9.261,5
68.	Jasa sosial kemasyarakatan	428,2	593,8	7,4	160,2	26,1	1.215,6
69.	Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	1.877,4	1.316,7	0,0	0,5	0,1	3.194,7
70.	Jasa Lainnya	176,0	1.378,6	2,3	68,5	1,8	1.627,2
Jumlah		51.724,6	66.834,8	2.097,9	42.252,3	8.749,4	171.658,9

Tabel 5. Dampak Ekonomi Pariwisata terhadap Pajak atas Produksi Neto Tahun 2017

miliar Rp

No	Sektor	Konsumsi			Pengembangan		Jumlah
		Wisman	Wisnus	Wisnas	Investasi	Promosi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Padi	29,0	30,6	0,5	0,8	0,4	61,3
2.	Tanaman kacang-kacangan	2,0	3,0	0,1	0,1	0,0	5,1
3.	Jagung	8,3	10,0	0,4	0,3	0,1	19,0
4.	Tanaman umbi-umbian	6,2	7,8	0,2	0,2	0,1	14,5
5.	Sayur-sayuran dan buah-buahan	40,9	41,6	0,6	0,9	0,4	84,5
6.	Tanaman bahan makanan lainnya	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,7
7.	Karet	3,3	14,6	0,2	11,0	0,2	29,4
8.	Tebu	2,2	4,1	0,2	0,2	0,0	6,7
9.	Kelapa	5,9	9,9	0,3	0,3	0,1	16,6
10.	Kelapa sawit	10,2	13,5	0,3	1,6	0,2	25,8
11.	Tembakau	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7
12.	Kopi	2,0	2,8	0,1	0,1	0,0	5,0
13.	Teh	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,8
14.	Cengkeh	0,7	1,3	0,1	0,1	0,0	2,2
15.	Hasil tanaman serat	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
16.	Tanaman perkebunan lainnya	7,3	9,9	0,4	0,7	0,1	18,3
17.	Tanaman lainnya	12,9	7,0	0,1	1,0	0,1	21,2
18.	Peternakan	6,7	7,5	0,2	0,4	0,1	14,8
19.	Pemotongan hewan	13,8	14,7	0,3	0,4	0,2	29,4
20.	Unggas dan hasil-hasilnya	14,7	14,6	0,3	0,3	0,2	30,1
21.	Kayu	13,6	16,0	1,4	42,8	0,3	74,1
22.	Hasil hutan lainnya	3,8	5,0	0,4	9,7	0,1	19,0
23.	Perikanan	29,1	44,4	0,8	0,7	0,4	75,4
24.	Penambangan batubara dan bijih logam	5,2	5,6	0,3	30,0	0,3	41,4
25.	Penambangan minyak, gas dan panas bumi	27,5	72,4	1,9	35,2	1,5	138,5
26.	Penambangan dan penggalian lainnya	2,9	3,0	0,2	44,3	0,2	50,6
27.	Industri pengolahan dan pengawetan makanan	11,6	12,3	0,6	0,2	0,1	24,7
28.	Industri minyak dan lemak	6,2	8,3	0,2	0,2	0,1	15,0
29.	Industri penggilingan padi	10,4	10,9	0,2	0,2	0,1	21,9
30.	Industri tepung, segala jenis	12,1	13,1	0,6	0,5	0,2	26,6
31.	Industri gula	3,8	7,1	0,3	0,3	0,0	11,6
32.	Industri makanan lainnya	14,5	20,4	0,7	0,5	0,2	36,2
33.	Industri minuman	5,5	9,9	0,5	0,1	0,0	16,1
34.	Industri rokok	3,3	6,5	0,5	0,0	0,0	10,3
35.	Industri pemintalan	3,7	16,6	0,8	1,6	0,0	22,7

Tabel 5. Lanjutan

miliar Rp

No	Sektor	Konsumsi			Pengembangan		Jumlah
		Wisnus	Wisnas	Wisman	Investasi	Promosi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
36.	Industri tekstil, pakaian dan kulit	28,5	74,5	5,6	22,5	0,2	131,2
37.	Industri bambu, kayu dan rotan	28,9	33,5	3,1	57,1	0,1	122,7
38.	Industri kertas, barang dari kertas dan karton	4,9	10,4	0,2	3,9	2,4	21,7
39.	Industri pupuk dan pestisida	2,1	2,4	0,1	0,2	0,0	4,7
40.	Industri kimia	10,5	13,5	0,8	18,7	0,5	44,0
41.	Pengilangan minyak bumi	29,2	89,4	2,1	31,3	1,6	153,7
42.	Industri barang karet dan plastik	3,2	14,6	0,2	11,2	0,3	29,4
43.	Industri barang-barang dari mineral bukan logam	14,7	5,5	1,1	40,6	0,3	62,1
44.	Industri semen	0,4	0,5	0,0	15,4	0,0	16,3
45.	Industri dasar besi dan baja	0,7	0,8	0,0	12,4	0,1	14,0
46.	Industri logam dasar bukan besi	0,6	0,7	0,0	5,5	0,0	6,9
47.	Industri barang dari logam	2,2	2,6	0,1	25,2	0,2	30,3
48.	Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik	8,3	10,0	0,4	40,5	0,2	59,5
49.	Industri alat pengangkutan dan perbaikannya	8,0	13,6	0,4	38,6	0,3	60,9
50.	Industri barang lain yang belum digolongkan dimanapun	15,2	15,7	0,5	1,3	0,1	32,8
51.	Listrik, gas dan air bersih	9,0	10,1	0,4	7,9	0,5	27,9
52.	Bangunan	7,5	9,9	0,6	374,0	1,2	393,2
53.	Perdagangan	85,3	120,1	3,7	92,9	2,8	304,8
54.	Penyediaan Akomodasi	345,4	72,4	0,5	2,2	1,1	421,7
55.	Penyediaan Makan dan Minum	127,0	267,2	4,0	4,9	3,7	406,8
56.	Angkutan kereta api	3,4	7,3	0,1	0,1	0,0	10,9
57.	Angkutan darat	63,8	117,4	2,5	24,7	1,8	210,2
58.	Angkutan air	7,5	18,9	0,6	0,8	0,1	27,9
59.	Angkutan udara	47,3	97,2	2,0	1,0	0,7	148,1
60.	Jasa penunjang angkutan	16,0	38,6	6,0	1,7	0,3	62,6
61.	Jasa Pos dan Kurir	2,4	4,7	1,2	0,8	0,0	9,2
62.	Komunikasi	39,4	52,0	1,4	18,1	2,1	113,0
63.	Lembaga keuangan	25,8	30,4	0,9	15,5	2,6	75,3
64.	Jasa Real Estat	21,6	31,4	0,7	16,4	0,7	70,9
65.	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	5,7	7,5	0,2	7,9	0,4	21,7
66.	Jasa Persewaan dan Jasa Penunjang Usaha	15,7	23,6	0,6	7,2	0,9	48,0
67.	Pemerintahan umum dan pertahanan	-	-	-	-	-	-
68.	Jasa sosial kemasyarakatan	2,1	3,0	0,0	0,8	0,1	6,1
69.	Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	25,8	18,1	0,0	0,0	0,0	43,9
70.	Jasa Lainnya	1,9	14,7	0,0	0,7	0,0	17,4
Jumlah		1.330,3	1.677,9	54,1	1.086,7	31,2	4.180,2

LAMPIRAN 3. Kode Klasifikasi Usaha Pariwisata

Kategori lapangan Usaha

47 Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor

47112 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/minimarket (Tradisional)

47242 Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya

47249 Perdagangan Eceran Makanan Lainnya

47781 Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu,

47782 Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang

47783 Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam

47784 Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik

47785 Perdagangan Eceran Lukisan

47789 Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya

49 Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa

49112 Angkutan Jalan Rel Khusus Wisata

49222 Angkutan Bus Pariwisata

49425 Angkutan Darat Lainnya Untuk Wisata

50 Angkutan Perairan

50113 Angkutan Laut Domestik Khusus Untuk Wisata

50123 Angkutan Laut Internasional Khusus Untuk Wisata

50213 Angkutan Sungai dan Danau Dengan Trayek Tidak Tetap Da

51 Angkutan Udara

51107 Angkutan Udara Khusus Untuk Wisata

55 Penyediaan Akomodasi

55111 Hotel Bintang Lima

55112 Hotel Bintang Empat

55113 Hotel Bintang Tiga

55114 Hotel Bintang Dua

55115 Hotel Bintang Satu

55120 Hotel Melati

55130 Pondok Wisata (Home Stay)

55191 Penginapan Remaja (Youth Hostel)

55192 Bumi Perkemahan

55193 Persinggahan Karavan

55194 Vila

Kategori lapangan Usaha

- 55195 Apartemen Hotel
- 55199 Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya
- 55900 Penyediaan Akomodasi Lainnya

56 Penyediaan Makanan dan Minuman

- 56101 Restoran
- 56102 Warung Makan
- 56103 Kedai Makanan
- 56104 Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap
- 56210 Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)
- 56290 Penyediaan Makanan Lainnya
- 56301 Bar
- 56303 Rumah Minum/Kafe
- 56304 Kedai Minuman
- 56305 Rumah/Kedai Obat Tradisional
- 56306 Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap

59 Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik

- 59140 Kegiatan Pemutaran Film

68 Real Estat

- 68110 Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
- 68120 Kawasan Pariwisata

70 Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen

- 70201 Jasa Konsultan Pariwisata

79 Jasa Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya

- 79111 Jasa Agen Perjalanan Wisata
- 79120 Jasa Biro Perjalanan Wisata
- 79910 Jasa Informasi Pariwisata
- 79920 Jasa Pramuwisata

82 Jasa Administrasi Kantor, Jasa Penunjang Kantor dan Jasa Penunjang Usaha Lainnya

- 82301 Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Kon
- 82302 Jasa Event Organizer

84 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

- 84126 Pembinaan Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahraga

Kategori lapangan Usaha

85 Pendidikan

85498 Jasa Pendidikan Kerajinan dan Industri

85499 Jasa Pendidikan Lainnya Swasta

90 Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas

90001 Kegiatan Seni Pertunjukan

90002 Kegiatan Pekerja Seni

90003 Jasa Penunjang Hiburan

90004 Jasa Impresariat Bidang Seni

90009 Kegiatan Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya

91 Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya

91011 Perpustakaan dan Arsip Pemerintah

91012 Perpustakaan Swasta

91021 Museum Yang Dikelola Pemerintah

91022 Museum Yang Dikelola Swasta

91023 Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah

91024 Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta

91025 Taman Budaya

91029 Wisata Budaya Lainnya

91031 Kegiatan Taman Konservasi Alam

91032 Taman Nasional (TN)

91033 Taman Hutan Raya (Tahura)

91034 Taman Wisata Alam (TWA)

91035 Hutan Lindung (HL), Suaka Margasatwa (SM), dan Cagar A

91036 Taman Laut

91037 Taman Buru, Kebun Buru dan Areal Buru

91039 Kegiatan Taman Konservasi Alam Lainnya

92 Kegiatan Perjudian dan Pertaruhan

92000 Kegiatan Perjudian dan Pertaruhan

93 Kegiatan Olahraga dan Rekreasi Lainnya

93111 Fasilitas Billiard

93112 Lapangan Golf

93113 Gelanggang Bowling

93114 Gelanggang Renang

93116 Lapangan Tenis Lapangan

93117 Kegiatan Pusat Kebugaran/Fitness Center

Kategori lapangan Usaha

- 93118 Sport Centre
- 93119 Kegiatan Fasilitas Olahraga Lainnya
- 93191 Promotor Kegiatan Olahraga
- 93210 Kegiatan Taman Bertema Atau Taman Hiburan
- 93221 Pemandian Alam
- 93222 Wisata Gua
- 93223 Wisata Petualangan Alam
- 93229 Daya Tarik Wisata Alam Lainnya
- 93231 Wisata Agro
- 93232 Taman Rekreasi/Taman Wisata
- 93233 Kolam Pemancingan
- 93241 Arung Jeram
- 93242 Wisata Selam
- 93243 Dermaga Marina
- 93249 Wisata Tirta Lainnya
- 93291 Klub Malam dan Atau Diskotik
- 93292 Karaoke
- 93293 Usaha Arena Permainan
- 93299 Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl

96 Jasa Perorangan Lainnya

- 96121 Panti Pijat
- 96122 SPA (Sante Par Aqua)

DATA

MENCERDAKAN BANGSA

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Kotak Pos 1003, Jakarta -- 1000
Telepon: 3811195, 3842508, 3810291 -- 5
Telex: 45159, 45169, 45325, 45375, 45385
Fax: 3857046, E-mail: bpsHQ@bps.go.id
Homepage: <http://www.bps.go.id>